

## BAB II

### EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2011 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

#### 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah, dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi

###### 2.1.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah:

###### a. Luas dan batas wilayah administrasi

Sumatera Utara memiliki luas total sebesar 181.860,65 km<sup>2</sup> yang terdiri dari luas daratan sebesar 71.680,68 km<sup>2</sup> atau 3,73 % dari luas wilayah Republik Indonesia dan luas perairan sebesar 110.000,65 km<sup>2</sup>, sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulau-pulau Batu serta beberapa pulau kecil, baik di perairan bagian barat maupun di bagian timur Pulau Sumatera.

Perkembangan wilayah Provinsi Sumatera Utara mengikuti dinamika kehidupan sosial ekonomi dan perpolitikan di Indonesia. Sampai dengan akhir tahun 2009, secara administratif wilayah Provinsi Sumatera terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 Kota, 417 Kecamatan dan 5744 Desa/Kelurahan. Kabupaten Mandailing Natal merupakan kabupaten dengan wilayah terluas yaitu 6.620,70 (9,24%). Sedangkan luas terkecil adalah Kota Sibolga yaitu 10,77km<sup>2</sup> (0,02%). Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1. dibawah ini :

**Tabel. 2.1**  
*Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara*

No.	Kabupaten/Kota	Ibukota	Banyaknya		Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
			Kecamatan	Desa/Kel	
1	Kab. Nias	Gido	9	119	980,32
2	Kab. Nias Selatan	Teluk Dalam	18	356	1.625,91
3	Kab. Nias Barat	Lahomi	8	110	544,09
4	Kab. Nias Utara	Lotu	11	113	1.501,63
5	Kab. Mandailing Natal	Panyabungan	23	395	6.620,70
6	Kab. Tapanuli Selatan	Sipirok	12	248	4.352,86
7	Kab. Tapanuli Tengah	Pandan	20	177	2.158,00
8	Kab. Tapanuli Utara	Tarutung	15	243	3.764,65
9	Kab. Toba Samosir	Balige	16	216	2.352,35
10	Kab. Labuhan Batu	Rantau Prapat	9	98	2.561,38
11	Kab. Asahan	Kisaran	25	204	3.675,79
12	Kab. Simalungun	Pamatang Raya	31	367	4.368,60
13	Kab. Dairi	Sidikalang	15	169	1.927,80
14	Kab. Karo	Kabanjahe	17	262	2.127,25
15	Kab. Deli Serdang	Lubuk Pakam	22	394	2.486,14
16	Kab. Langkat	Stabat	23	277	6.263,29
17	Kab. Humbang Hasundutan	Dolok Sanggul	10	144	2.297,20
18	Kab. Pakpak Bharat	Salak	8	52	1.218,30

No.	Kabupaten/Kota	Ibukota	Banyaknya		Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
			Kecamatan	Desa/Kel	
19	Kab. Samosir	Pangururan	9	117	2.433,50
20	Kab. Serdang Bedagai	Sei Rampah	17	243	1.913,33
21	Kab. Batu Bara	Limapuluh	7	100	904,96
22	Kab. Padang Lawas Utara	Gunung Tua	9	388	3.918,05
23	Kab. Padang Lawas	Sibuhuan	9	304	3.892,74
24	Kab. Labuhan Batu Utara	Aek Kanopan	8	90	3.545,80
25	Kab. Labuhan Batu Selatan	Kota Pinang	5	54	3.116,00
26	Kota Sibolga	Sibolga	4	17	10,77
27	Kota Tanjung Balai	Tanjung Balai	6	31	61,52
28	Kota Pematang Siantar	Pematang Siantar	8	53	79,97
29	Kota Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	5	35	38,44
30	Kota Medan	Medan	21	151	265,10
31	Kota Binjai	Binjai	5	37	90,24
32	Kota Padang Sidempuan	Padangsidempuan	6	79	114,65
33	Kota Gunung Sitoli	Gunung Sitoli	6	101	469,36
	<b>Provinsi Sumatera Utara</b>	<b>Medan</b>	<b>417</b>	<b>5744</b>	<b>71.680,68</b>

Sumber: Sumatera Utara dalam Angka 2011

#### b. Letak dan kondisi geografis

Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur, merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatera. Provinsi Sumatera Utara berbatasan sebelah utara dengan Provinsi Aceh, sebelah barat dengan Samudera Hindia, sebelah selatan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat serta sebelah timur dengan Selat Malaka. Secara regional Provinsi Sumatera Utara berada pada jalur strategis pelayaran internasional Selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia dan Thailand.

Provinsi Sumatera Utara memiliki garis pantai sepanjang 1.300 Km. Panjang Garis Pantai Timur 545 Km, Panjang Garis Pantai Barat 375 Km dan Panjang Garis Pantai Pulau Nias 380 Km. Terdapat 419 pulau, dengan 237 pulau yang telah memiliki nama, dengan 6 pulau di wilayah Pantai Timur termasuk Pulau Berhala sebagai pulau terluar yang berbatasan dengan selat Malaka dan sisanya 182 pulau di wilayah Pantai Barat dengan Pulau Wunga dan Pulau Simuk sebagai pulau terluar di wilayah Pantai Barat.

Pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terdapat hutan mangrove seluas 63.467,4 Ha dalam kondisi baik seluas : 27.019,57 Ha dan 36.447,83 Ha dalam kondisi rusak yang tersebar di 6 Kabupaten (belum termasuk Nias). Selain hasil laut dan perikanan lainnya, kawasan ini memiliki potensi pariwisata bahari yang belum teridentifikasi seluruhnya.

Daerah pantai di kawasan Pantai Barat Sumatera Utara sangat bervariasi yaitu daerah yang curam, berbatu dan di beberapa daerah terdapat pantai yang didominasi rawa. Kondisi pantai semacam ini banyak ditemukan di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga dan Mandailing Natal. Sedangkan Pantai Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan didominasi oleh pantai berbatu dan berpasir, khususnya yang berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia.

Banyak terdapat pulau-pulau kecil merupakan ciri yang dimiliki oleh kawasan pesisir barat Sumatera Utara. Pantai barat ini juga memiliki hamparan mangrove sekitar 14.270 Ha yang membujur dari pantai selatan Kabupaten Mandailing Natal sampai ke pantai selatan Kabupaten Tapanuli Tengah serta di daerah pulau-pulau di Kabupaten Nias dengan ketebalan antara 50-150 meter. Terumbu karang di Pantai Barat Sumatera Utara terdapat di tiga Kabupaten, yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan yang tumbuh pada kedalaman 3-10 meter.

### **c. Topografi**

#### 1) Kemiringan lahan

Wilayah Sumatera Utara terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi serta pegunungan Bukit Barisan yang membujur ditengah-tengah dari Utara ke Selatan. Kemiringan tanah antara 0 – 12 % seluas 65,51% seluas 8,64 % dan diatas 40 % seluas 24,28 %, sedangkan luas Wilayah Danau Toba 112.920 Ha atau 1,57 %

#### 2) Ketinggian lahan

Ketinggian lahan di Provinsi Sumatera Utara bervariasi mulai dari 0 – 2200 m dpl. Terbagi atas 3 (tiga) bagian yaitu bagian Timur dengan keadaan relatif datar, bagian tengah bergelombang sampai berbukit dan bagian Barat merupakan dataran bergelombang.

Wilayah Pantai Timur yang merupakan dataran rendah seluas 24.921,99 Km<sup>2</sup> atau 34,77 persen dari luas wilayah Sumatera Utara adalah Daerah yang subur, kelembaban tinggi dengan curah hujan relatif tinggi pula. Banjir juga sering melanda wilayah tersebut akibat berkurangnya pelestarian hutan, erosi dan pendangkalan sungai. Pada musim kemarau terjadi pula kekurangan persediaan air disebabkan kondisi hutan yang kritis.

Wilayah dataran tinggi dan wilayah Pantai Barat seluas 46.758,69 Km<sup>2</sup> atau 65,23 persen dari luas wilayah Sumatera Utara, sebagian besar merupakan pegunungan, memiliki variasi dalam tingkat kesuburan tanah, iklim, topografi dan kontur serta daerah yang struktur tanahnya labil. Beberapa danau, sungai, air terjun dan gunung berapi dijumpai di wilayah ini serta sebagian wilayahnya tercatat sebagai daerah gempa tektonik dan vulkanik.

### **d. Geologi**

#### 1) Struktur dan karakteristik

Secara geologis, wilayah Provinsi Sumatera Utara memiliki struktur dan batuan yang kompleks dan telah beberapa kali mengalami tumbukan dari proses tektonik karena posisinya terletak pada pertemuan lempeng Euroasia di sebelah timur dan lempeng Australia di sebelah barat. Hal ini menyebabkan terbentuknya rangkaian jalur patahan, rekahan dan pelipatan disertai kegiatan vulkanik. Jalur patahan tersebut melewati jalur Sumatera Utara mulai dari segmen Alas-Karo dan sepanjang kurang lebih 390 km merupakan sumber bencana alam geologi berupa pusat-pusat gempa di darat, tsunami dan pemicu terjadinya letusan gunung berapi dan tanah longsor. Jalur patahan (subduction) di Pantai Barat sepanjang kurang lebih 250 km merupakan pusat pusat gempa di dasar laut.

Kondisi struktur geologi yang kompleks yang dicirikan oleh bentuk bentang alam perbukitan, terlipat dengan patahan selain merupakan jalur gempa juga potensial menimbulkan tanah longsor terhadap sekitar 40-50 % dari luas daerah Provinsi Sumatera Utara yang mencakup 18 wilayah kabupaten dan 1 kota (menurut keadaan tahun 2005) merupakan kawasan yang rentan gerakan tanah longsor.

#### 2) Potensi

##### - Sumber energi

Potensi energi berupa panas bumi sebagai energi alternatif yang tersebar pada beberapa tempat di Sumatera Utara, diantaranya di Kabupaten Karo, Simalungun, Samosir, Tapanuli Utara, Padang Lawas dan Mandailing Natal. Sumber panas bumi ini berpotensi sebagai pembangkit energi listrik Sumatera Utara.

Sumatera Utara juga memiliki indikasi kandungan minyak pada 2 (dua) tempat yaitu di Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dengan cadangan sebesar 15 MMSTB dengan analisa kimia sebesar 15 MMSTB dan Gunungsitoli, Kabupaten Nias.

Cadangan batubara terdapat di 15 (lima belas) titik dan gambut yang merupakan salah satu sumber energi yang banyak terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Selain sebagai sumber energi, juga dapat digunakan sebagai media semai. Timah putih merupakan bahan galian yang berfungsi sebagai bahan industri dan konstruksi. Di Provinsi Sumatera Utara sebaran lokasi potensinya berada pada Aekhabil Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah pada 1°45'03,3" LU 99°08'11,2" BT dengan jumlah cadangan sebesar 470 BSCF dan Desa Hatapang Kecamatan Na-IX-X Kabupaten Labuhanbatu. Hingga saat ini dalam tahap Penyelidikan Umum.

Terdapat juga potensi energi nuklir (radioaktif) yang terdapat di Desa Aekhabil Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Utara, yakni berupa Radium (Ra).

- Bahan tambang mineral logam dan bukan logam

Bahan tambang mineral di Sumatera Utara terdiri dari 21 (dua puluh satu) jenis berupa Antimoni, Arsen, Barit, Bauksit, Belerang, Besi, Bismut, Kromium, Emas, Perak, Tembaga, Florit, Mangan, Merkuri, Molibdenum, Niobium, Platina, Tellurium, Seng, Timbal dan Wolfram. Selain itu terdapat juga bahan tambang mineral bukan logam dan batuan yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) jenis yang tersebar pada kabupaten-kabupaten di Provinsi Sumatera Utara antara lain : Bentonit, Zeolit, Dolomit, Travertin, Diatomea, Trass, Andesit, Granit, Feldspar, Marmer, Kaolin, Baturaja, Batu Gamping, Batu Apung, Perlit, Kalsit, Kukarsit, Fosfat, Lempung, Pasir Kuarsa, Mika, Grafit, Oker, Talk, Sirtu, dan Serpentin.

#### **e. Hidrologi**

##### 1) Daerah aliran sungai

Kondisi hidrologi di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari air permukaan yaitu sungai, danau, rawa dan air bawah tanah dimana secara keseluruhan wilayah terbagi atas 72 DAS dan 3 (tiga) DAS lintas provinsi. Jumlah induk sungai di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 99 buah, Anak Sungai sebanyak 783 buah, Ranting Sungai 659 buah, anak Ranting Sungai 342 buah.

##### 2) Sungai, danau dan rawa

Sesuai dengan Peraturan Menteri PU nomor 11.A/PRT/M/2006 tentang Sungai dan Satuan Wilayah Sungai, maka sungai-sungai di Provinsi Sumatera Utara dapat dikelompokkan ke dalam 11 (sebelas) Satuan Wilayah Sungai berdasarkan lintas wilayahnya yaitu WS Strategis Nasional adalah WS Belawan - Ular - Padang, WS Toba - Asahan dan WS Batang Angkola - Batang Gadis. WS Lintas Provinsi yaitu WS Alas Singkil lintas provinsi dengan Provinsi Aceh, WS Batang Natal - Batang Batahan lintas provinsi dengan Sumatera Barat dan SWS Rokan lintas Provinsi dengan Riau. Sementara WS Wampu - Besitang Lintas Kab/Kota, WS Bah Bolon Lintas Kab/Kota, WS Barumon - Kualuh adalah lintas Kab/Kota, WS Pulau Nias Lintas Kab/Kota, WS Sibundong - Batang Toru Lintas Kab/Kota.

Kawasan rawa merupakan sumber daya alam yang potensinya belum dimanfaatkan dengan optimal bagi lahan pertanian dan pertambakan. Di Provinsi Sumatera Utara luas baku daerah rawa adalah sebesar 1.012.005 Ha yang letaknya tersebar di kawasan Pantai Timur dan Pantai Barat.

##### 3) Debit Air

Beberapa sungai utama di Provinsi Sumatera Utara memiliki debit air rata-rata yang cukup besar seperti Sungai Wampu, Sungai Ular, Sungai Barumon, Sungai Silau, Sungai Asahan yang dapat dimanfaatkan untuk sumber air irigasi dan bahan baku air bersih dan air minum untuk keperluan rumah tangga dan industri. Namun disisi lain dapat menimbulkan ancaman bahaya banjir dimusim penghujan, akibat mulai terdegradasinya lahan pada daerah hulu.

Selain itu terdapat badan air yaitu danau dengan debit air cukup besar yang potensial bagi sistem pengairan dan memiliki air terjun yang potensial sebagai sumber energi. Badan air berupa danau kecil yaitu Danau Siais dan Danau Pandan di Tapanuli Tengah, Danau Balimbing di Tapanuli Selatan, Danau Lau Kawar di Kabupaten Karo dan yang terbesar yaitu Danau Toba yang terletak di dataran tinggi di wilayah tengah meliputi 7 (tujuh) kabupaten dengan luas 110.260 ha. Di Pulau Samosir terdapat dua danau kecil yaitu Danau Sidihoni dan Danau Aek Tonang.

Juga terdapat potensi air tanah dimana empat diantaranya dari cekungan air bawah permukaan berada pada lintas provinsi

**f. *Klimatologi***

1) Tipe

Iklim di Sumatera Utara termasuk iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin Passat dan angin Muson. Sebagaimana Provinsi lainnya di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara mempunyai musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Juni sampai dengan September dan musim penghujan biasanya terjadi pada bulan November sampai dengan bulan Maret, diantara kedua musim itu diselingi oleh musim pancaroba.

2) Curah hujan

Curah hujan relatif cukup tinggi yaitu berkisar 1.431 - 2.265 mm per tahun atau rata-rata 2.100 mm per-tahun, dengan jumlah hari hujan rata-rata sebesar 173 - 230 hari per tahun. Pada wilayah kering, curah hujan tahunan rata-rata kurang dari 1.500 mm yang tercatat di beberapa bagian wilayah Simalungun, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara, sedang curah hujan tinggi berkisar antara 2.000 sampai 4.500 mm berlangsung sepanjang tahun di daerah Asahan, Dairi, Deli Serdang, Karo, Labuhan Batu, Langkat, Nias, Tapanuli Tengah, dan sebagian besar Tapanuli Selatan. Musim kemarau pada umumnya terjadi pada Juni sampai September dan musim penghujan terjadi pada bulan November sampai Maret.

3) Suhu

Ketinggian permukaan daratan Provinsi Sumatera Utara sangat bervariasi, sebagian daerahnya datar, hanya beberapa meter di atas permukaan laut, beriklim cukup panas bisa mencapai 35,80°C, sebagian daerah berbukit dengan kemiringan yang landai, beriklim sedang dan sebagian lagi berada pada daerah ketinggian yang suhu minimalnya bisa mencapai 13,40° C.

4) Kelembaban

Kelembaban udara rata-rata 78%-91%.

**g. *Penggunaan lahan, antara lain terdiri dari:***

1) Kawasan lindung

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara, luas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara adalah seluas 3.742.120,00 ha atau 52,21 % dari luas Provinsi Sumatera Utara (7.168.068,00 ha).

Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan dimaksud terdiri dari :

- Fungsi hutan dalam kawasan lindung (1.774.400,00 ha)

a.	Cagar Alam (CA)	:	12.287,46	Ha
b.	Suaka Margasatwa (SM)	:	85.552,00	Ha
c.	Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL)	:	187.985,00	Ha
d.	Taman Nasional Batang Gadis (TNBG)	:	108.000,00	Ha
e.	Taman Hutan Raya (Tahura)	:	51.600,00	Ha
f.	Taman Wisata Alam (TWA)	:	3.448,90	Ha
g.	Taman Buru (TB)	:	8.350,00	Ha
h.	Hutan Lindung (HL)	:	1.297.330,00	Ha

- Fungsi hutan dalam kawasan budidaya (1.967.720,00 ha)

a.	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	:	879.270,00	Ha
b.	Hutan Produksi Tetap (HP)	:	1.035.690,00	Ha
c.	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)	:	52.760,00	Ha

Di Provinsi Sumatera utara yang termasuk dalam kawasan ini adalah kawasan berada pada ketinggian 2.000 meter d.p.l. dengan kelerengannya lebih besar dari sekitar 45 %, mempunyai skor lebih dari 175 menurut SK Menteri Pertanian No. 837/Kpts/Um/11/1980, mempunyai jenis tanah sangat peka terhadap erosi, yaitu jenis tanah dengan nilai 5 (regosol, litosol, organosol dan rezina) dan kelas lereng lebih besar dari 15 %, memiliki curah hujan tinggi dan mampu meresapkan air ke dalam tanah, termasuk di dalamnya kawasan tanah gambut dengan ketebalan 3 m yang terdapat dibagian hulu sungai/rawa dan yang ditetapkan sebagai hutan lindung. Kawasan ini mencakup juga lahan gambut di Kabupaten Asahan, Labuhan Batu, Tapanuli Tengah.

2) Kawasan budidaya

Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian terbesar berada di wilayah Pantai Timur, yaitu meliputi areal seluas lebih kurang 57% dari luas areal pertanian Sumatera Utara. Sebagian besar lahan hutan berada di wilayah Pantai Barat, yaitu seluas ± 69% dari luas hutan di Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan pertanian mendominasi wilayah Pantai Timur, sedangkan wilayah Pantai Barat didominasi oleh kegiatan pertanian dan hutan secara relatif seimbang.

Wilayah Pantai Timur yang merupakan dataran rendah seluas 26.360 km<sup>2</sup> atau 36,8% dari luas wilayah Sumatera Utara merupakan wilayah yang subur, suhu udara tinggi, kelembaban udara tinggi, dan curah hujan juga relatif tinggi, meliputi Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Batu Bara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Kota Binjai, Medan, dan Tebing Tinggi. Wilayah Pantai Barat meliputi Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Nias, Nias Selatan dan Kota Sibolga. Kegiatan di wilayah Pantai Timur umumnya heterogen, dengan kawasan perkotaan yang relatif besar dan prasarana wilayah yang memadai. Wilayah ini sesuai untuk pengembangan berbagai jenis kegiatan budidaya, terutama perkebunan dan tanaman pangan.

Potensi sumber daya alam Provinsi Sumatera Utara cukup berlimpah, diantaranya tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan dan pariwisata. Potensi Pertanian Provinsi Sumatera Utara diantaranya adalah sayuran, jeruk dan buah-buahan yang sebagian besar telah dipasarkan dengan baik dan sudah di ekspor keluar negeri maupun provinsi lain. Luas areal perkebunan adalah 1.999.403 ha atau 27,89% dari luas Provinsi Sumatera Utara dengan total produksi sebesar ± 4.411.536,55 ton diantaranya sawit, karet, kopi, kakao, tembakau, kelapa dan komoditi lainnya.

Potensi perikanan laut Selat Malaka (Pantai Timur) sebesar 239.000,2 ton pertahun sementara pemanfaatannya sudah sekitar 257.364,8 ton atau 107,7%,

atau telah terjadi overfishing (padat tangkap), sedangkan potensi Samudera Hindia atau Pantai Barat sebesar 917.000,5 ton per tahun dan baru dimanfaatkan 100.707.59 atau 10,9%. Potensi Pantai Barat ini perlu dikembangkan mengingat tingkat pemanfaatannya masih rendah.

Komoditi bidang pertanian pada dataran tinggi Bukit Barisan Sumatera Utara, seperti jagung, kentang, kopi, ikan mas, sapi, bawang merah sangat berpotensi untuk dikembangkan. Pengembangan perikanan laut wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau terluar, dengan luas laut Sumatera Utara 110.000 km<sup>2</sup>, panjang pantai 1.300 km (Pantai Timur 545 km dan Pantai Barat 375 km serta Pulau Nias 380 km), dengan jumlah pulau sebanyak 214 buah sangat berpotensi untuk dikembangkan. Hal ini seiring dengan bertambahnya penduduk Indonesia dan dunia sehingga akan meningkatkan permintaan terhadap kelautan dan perikanan, ditambah dengan menurunnya kemampuan produksi perikanan tangkap dunia.

### 2.1.1.2. Potensi pengembangan wilayah

Di Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan kawasan andalan yang merupakan bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.

Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Andalan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.2  
Penetapan Kawasan Andalan Nasional

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN
1.	Kawasan Perkotaan Metropolitan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro) (I/D/1) (II/B/2) (I/E/1) (I/A/1) (II/F/2)	industri, perkebunan, pariwisata, pertanian, perikanan
2.	Kawasan Pematang Siantar dan Sekitarnya (II/B/2) (I/A/1) (III/D/2) (II/E/2)	Perkebunan, pertanian, industri, pariwisata
3.	Kawasan Rantau Prapat – Kisaran (I/B/2) (I/H/1) (II/A/2) (II/F/2) (II/D/2)	Perkebunan,kehutanan Pertanian, perikanan industri
4.	Kawasan Tapanuli dan Sekitarnya (II/B/2) (II/C/2) (III/G/2) (II/A/2) (II/D/2) (II/E/2)	Perkebunan, pertambangan perikanan laut, pertanian industri, pariwisata
5.	Kawasan Nias dan Sekitarnya -(I/E/2) (IV/B/2) -(II/F/2)	pariwisata perkebunan perikanan
6.	Kawasan Andalan Laut Lhokseumawe - Medan dsk -(I/F/2) -(I/C/2)	perikanan pertambangan
7.	Kawasan Andalan Laut Selat Malaka dan Sekitarnya -(I/F/2) -(I/C/2)	perikanan pertambangan
8.	Kawasan Andalan Laut Nias dan Sekitarnya -(III/F/2) -(III/C/2)	perikanan dan pertambangan

Sumber: PP NO. 26 Tahun 2008

Keterangan:

I - IV:Tahapan Pengembangan

A : Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Andalan untuk Sektor Pertanian

A/1 : Pengendalian Kawasan Andalan untuk Pertanian Pangan Abadi

A/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertanian

B : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perkebunan

B/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Perkebunan

B/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perkebunan



- C : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk sektor Pertambangan
  - C/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Pertambangan
  - C/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertambangan
- D : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk industri pengolahan
  - D/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Industri Pengolahan
  - D/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Industri Pengolahan
- E : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk sektor Pariwisata
  - E/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Pariwisata
  - E/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pariwisata
- F : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk sektor Perikanan
  - F/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Perikanan
  - F/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perikanan
- G : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk sektor Kelautan
  - G/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Kelautan
  - G/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Kelautan
- H : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Kehutanan
  - H/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Kehutanan
  - H/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Kehutanan

Di samping kawasan andalan ada juga kawasan strategis provinsi. Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan strategis provinsi berfungsi: (a) untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang; (b) sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah provinsi yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah provinsi; dan (c) sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi. Kawasan strategis provinsi di Provinsi Sumatera ditetapkan berdasarkan kepentingan: (a) pertumbuhan ekonomi; (b) sosial dan budaya; dan (c) fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Sebaran kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:

- a. Kawasan Perkotaan Mebidangro;
- b. Kawasan Danau Toba dan sekitarnya;
- c. Kawasan Kepulauan Nias;
- d. Kawasan Labuhan Angin – Sibolga
- e. Kawasan Pantai Barat Mandailing Natal ;
- f. Kawasan Tanjungbalai – Asahan;
- g. Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi meliputi :
  1. Merek, Kabupaten Karo;
  2. Siborong borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
  3. Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
  4. Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir;
  5. Harian, Kabupaten Samosir;
  6. Silimakuta, Kabupaten Simalungun;
  7. Sitingjo, Kabupaten Dairi;
  8. Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat; dan
  9. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar.
- h. Kawasan Agromarinepolitan Pantai Timur dan Pantai Barat
- i. Kawasan Tebingtinggi – Pematangsiantar;
- j. Kawasan Labuhanbatu dan sekitarnya; dan
- k. Kawasan Perkotaan Tarutung.  
Kawasan Perkotaan Padangsidimpuan

Sebaran kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi:

- a. Kawasan Perkotaan Mebidangro;
- b. Kawasan Danau Toba dan sekitarnya;
- c. Kawasan Kepulauan Nias; dan
- d. Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi meliputi :
  1. Merek, Kabupaten Karo;
  2. Siborong borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
  3. Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;



4. Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir;
  5. Harian, Kabupaten Samosir;
  6. Silimakuta, Kabupaten Simalungun;
  7. Sitinjo, Kabupaten Dairi;
  8. Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat; dan
  9. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar.
- e. Kawasan Tebingtinggi – Pematangsiantar.

Sebaran kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

- a. Kawasan Danau Toba dan sekitarnya;
- b. Kawasan Ekosistem Leuser dan Bohorok; dan
- c. Kawasan Lindung Tapanuli (Hutan Batang Toru) dan Mandailing Natal (Taman Nasional Batang Gadis).

Di tingkat nasional, beberapa wilayah/kawasan di Sumatera Utara juga ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional, yaitu:

1. Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya (Provinsi Sumatera Utara) (I/B/1); dan
2. Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 2 pulau kecil terluar (Pulau Rondo dan Berhala) dengan negara India/Thailand/Malaysia (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara) (I/E/2)

NO	KAWASAN ANDALAN
1.	Kawasan Perkotaan Medan – Binjai – Deli Serdang – Karo (Mebidangro) (I/A/1)
2.	Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya (Provinsi Sumatera Utara) (I/B/1)
3.	Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 2 pulau kecil terluar (Pulau Rondo dan Berhala) dengan negara India/Thailand/Malaysia (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara) (I/E/2)

Sumber: PP No. 26 Tahun 2008

Keterangan:

I – IV: Tahapan Pengembangan

A : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Dengan Sudut Kepentingan Ekonomi

A/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

A/2 : Pengembangan/Peningkatan kualitas kawasan

B : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Dengan Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup

B/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

B/2 : Pengembangan/Peningkatan kualitas kawasan

C : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Dengan Sudut Kepentingan Sosial Budaya

C/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

C/2 : Pengembangan/Peningkatan kualitas kawasan

D : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Dengan Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya alam dan Teknologi Tinggi

D/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

D/2 : Pengembangan/Peningkatan kualitas kawasan

E : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan strategis nasional dengan Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan

E/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

E/2 : Pengembangan/Peningkatan kualitas kawasan

Pada tahun 2011, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, Dan Karo untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perkotaan Mebidangro.

### 2.1.1.3. Wilayah rawan bencana

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain.

Kawasan rawan bencana di Provinsi Sumatera Utara meliputi:

- kawasan rawan massa gerakan tanah/tanah longsor,
- kawasan rawan zona patahan aktif,
- kawasan rawan gelombang pasang air laut/ abrasi/ tsunami,
- kawasan rawan banjir/banjir bandang,
- kawasan rawan angin puting beliung,
- kawasan rawan kebakaran hutan, dan
- kawasan rawan letusan gunung berapi.

Secara umum, peristiwa bencana alam terjadi dikarenakan peristiwa alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, gerakan tanah/ longsor, gelombang pasang dan non geologis seperti banjir, kekeringan dan kebakaran hutan maupun puting beliung. Wilayah Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang rawan terhadap terjadinya longsor (gerakan tanah), gelombang pasang (tsunami), banjir dan peristiwa gempa.

#### a. Gempa Tektonik

Pulau Sumatera terletak diantara Lempeng Asia dan Lempeng Australia. Proses pergerakan tabrakan antar lempeng yang sangat lambat tersebut, pada suatu ketika akan menimbulkan pelepasan energi disertai goncangan, patahan, dan getaran yang cukup luas penyebarannya di permukaan bumi, yang kita kenal sebagai gempa tektonik. Secara geografi proses tabrakan ini membentuk rangkaian palung dan gunung api. Kawasan rawan zona patahan aktif di Wilayah Pantai Barat Sumatera Utara dan wilayah daratan Sumatera Utara.

#### b. Gunung Api

Terdapat 6 (enam) gunung berapi yang aktif di wilayah Sumatera Utara yakni Gunung Sorik Merapi, Gunung Sinabung, Gunung Dolok Martimbang, Gunung Sibayak, Gunung Pusuk Buhit dan Gunung Sibual-buali. Keenam gunung api tersebut dapat di bagi kedalam 3 klasifikasi gunung api sebagai berikut:

- 1) Tipe A, yaitu gunung yang pernah tercatat meledak paling tidak sekali sejak tahun 1600. Gunung api tipe ini paling rentan meletus.
- 2) Tipe B, yaitu gunung api aktif yang tercatat tidak pernah meletus sejak tahun 1600.
- 3) Tipe C, yaitu gunung yang tidak pernah tercatat meletus. Namun melihat tanda-tanda di sekitar gunung itu, diyakini gunung itu adalah gunung api.

Kawasan rawan letusan gunung berapi meliputi:

1. Gunung Sorik Merapi di Mandailing Natal dan Gunung Sinabung di Kabupaten Karo tipe A;
2. Gunung Sibayak di Kabupaten Karo, Gunung Pusuk Buhit di Kabupaten Samosir, dan Gunung Sibual-buali di Kabupaten Tapanuli Selatan tipe B;
3. Gunung Dolok Martimbang/Namorlangit/Hela Toba di Kabupaten Tapanuli Utara tipe C.

#### c. Gerakan Tanah Longsor

Bencana longsor disertai dengan banjir bandang sudah sering terjadi di Sumatera Utara antara lain longsor dan banjir bandang Sibolangit (Deli Serdang, 22 November 1994), Dolok - Saipar Dolok Hole di DAS Bilah (Tapanuli Selatan - Labuhan Batu, Mei 1995), Perbaungan - Lubuk Pakam (Deli Serdang, Januari 2002), Nias (31 Juli 2001 dan 2 Januari 2003), Bahorok (Langkat, 2 Nopember 2003). Berbagai longsor dan banjir bandang dalam ukuran kecil juga telah sering terjadi di berbagai lokasi di Sumatera

Utara sebagai contoh Berastagi yang berada di pegunungan di Karo beberapa waktu yang lalu dilanda banjir bandang.

Terjadinya gerakan tanah Sumatera Utara dikontrol oleh:

- 1) Kemiringan Lereng.  
Kemiringan Lereng yang terjal pada bagian barat Pegunungan Bukit Barisan. Perbedaan elevasi satu tempat dengan tempat lain menjadi sumber energi gaya berat untuk mempermudah terjadinya gerakan.
- 2) Kondisi Geologi.  
Batuan Pegunungan Bukit Barisan di Sumatera Utara adalah batuan yang dicacah-cacah oleh patahan-patahan. Di Sumut terdapat 3 ruas patahan utama yaitu Renun, Toru dan Angkola. Keadaan geologi lainnya adalah kedudukan atau kemiringan lapisan tanah dan batuan di daerah (desa, kota) tersebut. Semakin miring lapisan tanah/batuan maka semakin labil atau semakin mudah longsor, demikian pula jika kemiringan topografi suatu daerah semakin curam atau semakin terjal, maka akan semakin mudah longsor.
- 3) Curah Hujan  
Curah hujan yang tinggi terdapat pada daerah perbukitan bagian barat Bukit Barisan serta disekitar Pegunungan Leuseur. Selanjutnya kondisi dan pola pengeringan air hujan yang jatuh di suatu daerah akan menentukan tingkat kerawanan terjadinya longsor disuatu daerah. Daerah dengan kondisi pengeringan alamiah (drainage) yang buruk akan menyebabkan genangan yang melumas bidang gelincir massa batuan dan memicu terjadinya longsor.
- 4) Gempa  
Adanya gempa bumi dapat memicu terjadinya longsor, seperti yang terjadi di Muara Sipongi pada Desember 2006.
- 5) Perubahan Vegetasi dan Aktifitas Manusia  
Penebangan hutan, alih fungsi lahan pembukaan lahan hutan untuk jalan, permukiman dan infrastruktur lainnya turut memicu terjadinya gerakan tanah.

Kawasan yang terletak pada daerah rawan tanah longsor antara lain Kawasan rawan massa gerakan tanah/ tanah longsor pada sebagian besar wilayah Sumatera Utara di sekitar Bukit Barisan membujur arah Utara – Selatan meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Dairi, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat dan Pulau Nias bagian Selatan dan bagian Tengah meliputi Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias pada Kecamatan Hiliduho; Kabupaten Nias Barat, Kota Gunungsitoli. Kawasan tersebut pada dasarnya potensial terhadap gerakan tanah, rayapan, longSORan, gelombang pasang dan banjir bandang.

Termasuk dalam kawasan ini Kabupaten Tapanuli Utara pada Kecamatan Muara, Sipoholon, Dolok Sanggul, Lintong Nihuta, Siborong-borong, Pagaran, Onan Ganjang, Tarutung, Adian Koting, Pahae Julu dan Pahae Jae; Kabupaten Toba Samosir pada Kecamatan Simanindo, Pangururan, Sianjur Mula-Mula, Harian Boho, Palipi, Onan Runggu, Laguboti, Porsea dan Habinsaran; Kabupaten Tapanuli Tengah pada Kecamatan Barus, Kolang, Tapian Nauli, Lumut dan Sibabangun; Kabupaten Mandailing Natal pada Kecamatan Siabu, Panyabungan, Batang Natal dan Kotanopan; Kabupaten Dairi pada Kecamatan Tigalingga, Siempat Nempu, Silima Pungga-Pungga, Pegagan, Sumbul, Sidikalang, Parbuluan dan Kerajaan; Kabupaten Simalungun pada Kecamatan Dolok Silau, Silimakuta, Dolok Pardamean, Sidamanik, Dolok Panribuan dan Girsang Sipangan Bolon; Kabupaten Deli Serdang pada Kecamatan Namorambe, STM Hilir, Biriu-biru, Sibolangit, STM Hulu dan Bangun Purba; Kabupaten Karo pada Kecamatan Mardinding, Kutabuluh, Lau Baleng, Tiga Binanga, Simpang Empat, Kabanjahe,

Barusjahe dan Merek; Kabupaten Langkat pada Kecamatan Padangtualang, Bahorok, Salapian, Kwala dan Sei Bingai;  
Termasuk Pulau Nias bagian Selatan dan bagian Tengah yaitu Kabupaten Nias pada Kecamatan Hiliduho; Kabupaten Nias Barat pada Kecamatan Mandrehe serta Kota Gunung Sitoli pada Kecamatan Gunung Sitoli.

d. Rawan Gelombang Pasang/Tsunami

Tsunami adalah gelombang pasang yang disebabkan oleh gempa bumi atau longsor di lereng dasar laut. Gelombang pasang semacam ini bisa melanda daerah pantai sampai puluhan meter tingginya dan ratusan meter jauhnya dari pantai, sehingga menyapu dan merusak segala apa yang ada di pantai dan di daratan, seperti yang terjadi di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara pada tanggal 26 Desember 2004. Tsunami yang menerjang pantai barat Aceh dan Sumatera Utara terjadi 20 menit sampai 5 jam setelah gempa tektonik. Kecepatan gelombang tsunaminya rata-rata 50-100 kilometer per jam. Di pusat gempa, kecepatan tsunami Aceh secara teoretis dapat dihitung, yaitu antara 400 - 800 kilometer per jam. Daerah rawan tsunami tersebar di Pantai Barat pada elevasi kurang dari 5 meter.

Di Provinsi Sumatera Utara yang merupakan kawasan rawan gelombang pasang: wilayah pantai timur, pantai barat, dan wilayah pantai Kepulauan Nias.

e. Banjir

Peristiwa banjir merupakan bencana alam yang juga sering terjadi di wilayah Sumatera Utara yang beriklim tropis, terutama pada wilayah dengan kemiringan lereng landai atau dataran. Beberapa peristiwa banjir yang terjadi di Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Peristiwa banjir (dan juga tanah longsor) yang terbesar selama 3 tahun terakhir di Indonesia terjadi di kawasan Taman Nasional Gunung Leuseur (TNGL) yang terletak di perbatasan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh.

Di daerah Bohorok Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara pada November 2003 terjadi banjir bandang yang berasal dari bagian hulu DAS Bohorok yang menyebabkan 92 orang tewas dan 154 orang hilang.

Kawasan ini terletak di sepanjang pantai Timur yang dilalui oleh jalur lintas timur Sumatera dan wilayah pantai Kepulauan Nias. Termasuk dalam kawasan ini yaitu Kabupaten Simalungun pada Kecamatan Silau Kahean, Raya Kahean, Bandar, Pematang Bandar, Dolok Batunanggar, Tapian Dolok, Siantar, Bosar Maligas, Ujung Padang, Hutabayu Raja dan Tanah Jawa; Kabupaten Tapanuli Tengah pada Kecamatan Manduamas, Barus, Sorkam, Kolang, Tapian Nauli, Sibolga, Lumut dan Sibabangun; Kabupaten Mandailing Natal pada Kecamatan Natal, Muara Batang Gadis dan Batahan; Kabupaten Langkat pada Kecamatan Pangkalan Susu, Brandan Barat, Babalan, Besitang, Tanjungpura, Gebang, Secanggih, Hinai, Stabat, Padangtualang dan Bahorok; Kabupaten Labuhan Batu pada Kecamatan Panai Hilir, Panai Tengah, Pangkatan dan Bilah Hilir; Kabupaten Labuhan Batu Utara pada Kecamatan Kualuh Hilir; Kabupaten Deli Serdang pada Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Tua, Pancur Batu, Namorambe, Kutalimbaru, Biru-biru, Pantai Labu, Batang Kuis, Beringin dan Lubuk Pakam; Kabupaten Serdang Bedagai pada Kecamatan Pantai Cermin, Perbaungan, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin dan Sei Rampah.

Termasuk juga pada Kabupaten Nias pada Kecamatan Idano Gawo, Gido; Kabupaten Nias Utara pada Kecamatan Tuhemberua, Lahewa, Alasa; Kabupaten Nias Barat pada Kecamatan Mandrehe, Sirombu, Kabupaten Nias Selatan pada Kecamatan Lolowau, Amandraya, Teluk Dalam, Lahusa; Kota Gunungsitoli pada Kecamatan Gunungsitoli.

- f. Kebakaran Hutan  
Selain peristiwa bencana alam, di Provinsi Sumatera Utara juga memiliki kawasan rawan bencana kebakaran hutan antara lain kawasan yang berada disepanjang kawasan Danau Toba.
- g. Angin Puting Beliung  
Pada kawasan Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Mandailing Natal, terdapat kawasan rawan bencana angin puting beliung.

### 3. **Demografi**

#### a. Jumlah Penduduk

Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi keenam berpenduduk terbanyak di Indonesia dan provinsi berpenduduk terbesar di luar Pulau Jawa. Berdasarkan hasil proyeksi terhadap hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,11% jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 diperkirakan mencapai 13.103.596 orang, yang terdiri atas 6.544.092 laki-laki dan 6.559.504 perempuan.

Tabel. 2.3  
*Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (dalam ribuan)*

NO	KAB/KOTA	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Laki-Laki + Perempuan)	Sex Ratio
1	Nias	64.657	67.948	132.605	95,16
2	Mandailing Natal	200.925	207.806	408.731	96,69
3	Tapanuli Selatan	132.399	133.883	266.282	98,89
4	Tapanuli Tengah	157.881	156.261	314.142	101,04
5	Tapanuli Utara	139.490	142.378	281.868	97,97
6	Toba Samosir	86.874	87.874	174.748	98,86
7	Labuhan Batu	211.847	207.145	418.992	102,27
8	Asahan	339.089	335.432	674.521	101,09
9	Simalungun	411.642	413.724	825.366	99,50
10	Dairi	136.234	136.344	272.578	99,92
11	Karo	176.077	178.165	354.242	98,83
12	Deli Serdang	910.375	896.798	1.807.173	101,51
13	Langkat	492.271	484.311	976.582	101,64
14	Nias Selatan	145.359	147.058	292.417	98,84
15	Humbahas	86.098	87.157	173.255	98,78
16	Pakpak Bharat	20.676	20.208	40.884	102,32
17	Samosir	60.104	60.668	120.772	99,07
18	Sergei	301.386	298.555	599.941	100,95
19	Batu Bara	191.067	188.333	379.400	101,45
20	Padang Lawas Utara	113.443	112.178	225.621	101,13
21	Padang Lawas	114.080	113.285	227.365	100,70
22	Labuhanbatu Selatan	143.096	137.173	280.269	104,32
23	Labuhanbatu Utara	168.717	165.076	333.793	102,21
24	Nias Utara	63.629	64.805	128.434	98,19
25	Nias Barat	39.535	43.037	82.572	91,86
26	Sibolga	42.761	42.510	85.271	100,59
27	Tanjung Balai	78.651	77.238	155.889	101,83
28	Pematangsiantar	115.679	121.214	236.893	95,43
29	Tebing Tinggi	72.530	74.076	146.606	97,91
30	Medan	1.046.576	1.070.648	2.117.224	97,75
31	Binjai	124.173	124.283	248.456	99,91
32	Padangsidempuan	94.347	98.975	193.322	95,32
33	Gunung Sitoli	62.424	64.958	127.382	96,10
	<b>SUMATERA UTARA</b>	<b>6.544.092</b>	<b>6.559.504</b>	<b>13.103.596</b>	<b>99,77</b>

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2012

Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Langkat adalah tiga kabupaten/kota dengan urutan teratas yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yang masing-masing berjumlah 2.117.224 orang (16,16%), 1.807.173 orang (13,79%), dan 976.582 orang (7,45%). Sedangkan Kabupaten Pakpak Bharat merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk paling sedikit yang berjumlah 40.884 orang (0,31 persen). Dengan luas wilayah Provinsi Sumatera Utara sekitar 71.680,68 kilometer persegi yang didiami oleh 13.103.596 orang maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 183 orang per kilo meter persegi. Kabupaten/kota yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kota Medan yakni sebanyak 7.987 orang per kilo meter persegi sedangkan yang paling rendah adalah Kabupaten Pakpak Bharat yakni sebanyak 34 orang per kilo meter persegi.

Rasio jenis kelamin (sex ratio) penduduk Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 99,77, yang artinya jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Sex ratio terbesar terdapat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yakni sebesar 104,32 dan yang terkecil terdapat di Kabupaten Nias Barat yakni sebesar 91,86.

#### **b. Laju Pertumbuhan Penduduk**

Dari data hasil Sensus Penduduk 2010, laju pertumbuhan penduduk Sumatera Utara tahun 2000-2010 telah mengalami penurunan menjadi sebesar 1,11%, merupakan laju pertumbuhan penduduk terendah di Sumatera, atau posisi ke-5 laju pertumbuhan penduduk terendah secara nasional (dibawah laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah (0,37%), Jawa Timur (0,76%), Kalimantan Barat (0,91%), dan D.I Jogjakarta (1,02%)

#### **c. Sebaran Penduduk**

Secara geografis, penyebaran penduduk terbesar masih terkonsentrasi pada wilayah Pantai Timur, yaitu dimana pada wilayah tersebut terdapat sejumlah kabupaten yang berpenghuni terbesar (di atas 5 % dari seluruh penduduk provinsi) dan berkepadatan tertinggi (di atas 200 jiwa/km<sup>2</sup>), seperti : Labuhan Batu, Asahan, Deli Serdang, Langkat dan Serdang Bedagai. Pada wilayah timur ini juga terdapat sejumlah besar kota besar dengan distribusi dan kepadatan penduduk terbesar yaitu Kota Medan, Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai dan Padang Sidempuan.

Dari hasil Sensus Penduduk 2010 terlihat bahwa penyebaran penduduk Sumatera Utara menurut kabupaten/kota rata-rata dibawah 5 persen, dan hanya lima kabupaten/kota yang persebarannya diatas 5 persen.

Secara umum kepadatan bruto di Provinsi Sumatera Utara masih rendah karena sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan yang tidak terbangun, yaitu kawasan hutan dan perkebunan. Kecuali pada kota-kota yang ada di Sumatera Utara, kepadatannya relatif sedang sebagai kawasan perkotaan. Distribusi penduduk terbesar tahun 2010 tercatat pada Kota Medan (16,16%) dan Deli Serdang (13,79%) atau 29,95% dari total penduduk Sumatera Utara.

Menurut sensus penduduk terakhir tahun 2011, Kota Medan merupakan kota terpadat dengan kepadatan sebesar 7.987 jiwa/Km<sup>2</sup>, dan Kota Sibolga sebagai kota kedua terpadat dengan kepadatan sebesar 7.917 jiwa/Km. Tingginya kepadatan pada Kota Sibolga dibandingkan kota lainnya di Sumatera Utara disebabkan kemampuan daya dukung lahan Kota Sibolga yang terbatas sementara penduduk terus bertambah. Oleh sebab itu, Kota Sibolga semakin mendesak untuk mengendalikan pertumbuhan penduduknya. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini :

Tabel. 2.4  
Jumlah Penduduk, Kepadatan, dan Distribusi Penduduk Sumatera Utara  
menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011

NO	KAB/KOTA	Jumlah	Kepadatan Jiwa per km <sup>2</sup>	Distribusi Penduduk (%)
1	Nias	132.605	135	1,01
2	Mandailing Natal	408.731	62	3,12
3	Tapanuli Selatan	266.282	61	2,03
4	Tapanuli Tengah	314.142	146	2,40
5	Tapanuli Utara	281.868	75	2,15
6	Toba Samosir	174.748	74	1,33
7	Labuhan Batu	418.992	164	3,20
8	Asahan	674.521	184	5,15
9	Simalungun	825.366	189	6,30
10	Dairi	272.578	141	2,08
11	Karo	354.242	167	2,70
12	Deli Serdang	1.807.173	727	13,79
13	Langkat	976.582	156	7,45
14	Nias Selatan	292.417	180	2,23
15	Humbahas	173.255	75	1,32
16	Pakpak Bharat	40.884	34	0,31
17	Samosir	120.772	50	0,92
18	Sergei	599.941	314	4,58
19	Batu Bara	379.400	419	2,90
20	Padang Lawas Utara	225.621	58	1,72
21	Padang Lawas	227.365	58	1,74
22	Labuhanbatu Selatan	280.269	89	2,14
23	Labuhanbatu Utara	333.793	94	2,55
24	Nias Utara	128.434	86	0,98
25	Nias Barat	82.572	152	0,63
26	Sibolga	85.271	7917	0,65
27	Tanjung Balai	155.889	2534	1,19
28	Pematangsiantar	236.893	2962	1,81
29	Tebing Tinggi	146.606	3814	1,12
30	Medan	2.117.224	7987	16,16
31	Binjai	248.456	2753	1,90
32	Padangsidempuan	193.322	1686	1,48
33	Gunung Sitoli	127.382	271	0,97
<b>SUMATERA UTARA</b>		<b>13.103.596</b>	<b>183</b>	-

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2012

Kedekatan terhadap Kota Medan dan berkedudukan di wilayah timur menjadikan suatu kabupaten memiliki penduduk perkotaan yang semakin besar, seperti kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai berpenduduk perkotaan yang dominan, diikuti Kabupaten Asahan, Batu Bara, Simalungun, Karo dan Langkat. Sebaliknya kabupaten-kabupaten yang jauh dari Medan memiliki penduduk yang sangat didominasi penduduk perdesaan, seperti Kabupaten Nias Selatan, Nias, Humbang Hasundutan dan Tapanuli Selatan.



## 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Aspek kesejahteraan masyarakat berdasarkan fokus kesejahteraan antara lain dapat dilihat dari angka pertumbuhan PDRB, Inflasi, PDRB perkapita, disparitas pendapatan masyarakat dan persentase penduduk yang berada diatas garis kemiskinan. Secara umum dapat diungkapkan sebagai berikut :

#### a. Pertumbuhan PDRB

Tabel. 2.5  
*Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007-2010  
 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000  
 Provinsi Sumatera Utara (dalam Milyar Rupiah)*

NO	Sektor	2006		2007		2008		2009		2010*)	
		(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%
1	Pertanian	22.724,49	24,34	23.856,15	23,91	25.300,64	23,83	26.526,93	23,78	7.070,59	23,54
2	Pertambangan & Penggalian	1.119,58	1,20	1.229,05	1,23	1.304,35	1,23	1.322,98	1,19	348,71	1,16
3	Industri Pengolahan	22.470,57	24,07	23.615,20	23,66	24.305,23	22,89	24.977,11	22,39	6.687,97	22,26
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	738,31	0,79	739,92	0,74	772,94	0,73	816,00	0,73	218,52	0,73
5	Bangunan	6.085,61	6,52	6.559,30	6,57	7.090,65	6,68	7.554,36	6,77	2.010,17	6,69
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	17.095,26	18,31	18.386,28	18,42	19.515,52	18,38	20.575,43	18,44	5.543,55	18,45
7	Pengangkutan & Komunikasi	8.259,20	8,85	9.076,56	9,10	9.883,24	9,31	10.630,44	9,53	2.946,65	9,81
8	Kewangan, Sewa & Js perusahaan	5.977,57	6,40	6.720,62	6,73	7.479,84	7,04	7.939,21	7,12	2.181,69	7,26
9	Jasa-Jasa	8.876,81	9,51	9.609,20	9,63	10.519,96	9,91	11.216,75	10,05	3.034,62	10,10
	PDRB	93.347,40	100,00	99.792,27	100,00	106.172,36	100,00	111.559,22	100,00	30.042,47	100,00

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2011 (data diolah)

Dari tabel 2.5. diatas diperoleh gambaran bahwa secara umum struktur ekonomi pembentuk PDRB Provinsi Sumatera Utara atas dasar harga konstan didominasi oleh Industri pengolahan disusul oleh sektor pertanian, dan berturut-turut oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran; jasa-jasa, pengangkutan dan komunikasi.

Jika melihat dari struktur perekonomian terakhir tahun 2010 sebenarnya telah terjadi transformasi struktur ekonomi di Sumatera Utara dari provinsi berbasis primer (pertanian) menjadi provinsi berbasis jasa, sebab sumbangan sektor jasa-jasa telah mencapai 35,52%, disusul Industri sebesar 29,88% sementara sektor pertanian hanya tumbuh sebesar 24,7%.

Tabel. 2.6  
*Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007-2010  
 Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Sumatera Utara*

NO	Sektor	2006		2007		2008		2009		2010	
		(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%
1	Pertanian	35.807,65	22,33	41.010,15	22,56	48.871,77	22,84	54.431,19	23,03	16.110,13	22,83
2	Pertambangan & Penggalian	2.039,25	1,27	2.404,92	1,32	2.980,90	1,39	3.229,57	1,37	929,78	1,32
3	Industri Pengolahan	41.192,51	25,68	45.531,18	25,04	51.640,68	24,14	55.050,58	23,29	15.879,62	22,51
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	1.879,86	1,17	1.897,56	1,04	2.073,31	0,97	2.324,65	0,98	655,40	0,93
5	Bangunan	9.400,43	5,86	10.548,46	5,80	12.762,99	5,97	14.901,55	6,30	4.472,58	6,34
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	30.340,31	18,92	34.846,21	19,17	41.281,12	19,30	44.941,66	19,01	13.719,06	19,45
7	Pengangkutan & Komunikasi	14.339,08	8,94	16.363,69	9,00	18.568,82	8,68	21.040,75	8,90	6.374,00	9,03
8	Kewangan, Sewa & Js perusahaan	9.725,73	6,06	11.587,85	6,37	14.409,71	6,74	15.728,68	6,65	4.607,17	6,53
9	Jasa-Jasa	15.651,98	9,76	17.629,72	9,70	21.342,41	9,98	24.704,99	10,45	7.804,31	11,06
	PDRB	160.376,80	100,00	181.819,74	100,00	213.931,69	100,00	236.353,62	100,00	70.552,05	100,00

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2011 (data diolah)

Keterangan : Triwulan III

Sejalan dengan struktur PDRB atas dasar harga konstan, demikian juga hal yang sama tampak dari PDRB atas dasar harga berlaku dimana struktur ekonominya didominasi oleh

sektor industri pengolahan disusul oleh pertanian dan berturut-turut oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran; jasa-jasa, pengangkutan dan komunikasi.

Tabel. 2.7

*Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007-2010  
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)  
Provinsi Sumatera Utara*

NO	Sektor	2006		2007		2008		2009		2010	
		HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian	22,33	24,34	22,56	23,91	22,84	23,83	23,03	23,78	22,83	23,54
2	Pertambangan & Penggalian	1,27	1,20	1,32	1,23	1,39	1,23	1,37	1,19	1,32	1,16
3	Industri Pengolahan	25,68	24,07	25,04	23,66	24,14	22,89	23,29	22,39	22,51	22,26
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	1,17	0,79	1,04	0,74	0,97	0,73	0,98	0,73	0,93	0,73
5	Bangunan	5,86	6,52	5,80	6,57	5,97	6,68	6,30	6,77	6,34	6,69
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	18,92	18,31	19,17	18,42	19,30	18,38	19,01	18,44	19,45	18,45
7	Pengangkutan & Komunikasi	8,94	8,85	9,00	9,10	8,68	9,31	8,90	9,53	9,03	9,81
8	Keuangan, Sewa & Js perusahaan	6,06	6,40	6,37	6,73	6,74	7,04	6,65	7,12	6,53	7,26
9	Jasa-Jasa	9,76	9,51	9,70	9,63	9,98	9,91	10,45	10,05	11,06	10,10
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2011 (data diolah)

Dapat digambarkan bahwa perkembangan perhitungan sektoral khususnya dari sumbangan terhadap PDRB terlihat bahwa Sumatera Utara telah mengarah menjadi Provinsi berbasis Industri dan Jasa, karena peran sektor pertanian (primer) semakin kecil dalam memberikan sumbangan bagi PDRB baik dari harga berlaku maupun konstan.

Tabel. 2.8

*Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb)  
dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2010  
Provinsi Sumatera Utara*

NO	Sektor	Pertumbuhan	
		HB	HK
		%	%
1	Pertanian	0,13	(0,20)
2	Pertambangan & Penggalian	0,01	(0,01)
3	Industri Pengolahan	(0,79)	(0,45)
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	(0,06)	(0,02)
5	Bangunan	0,12	0,04
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,13	0,03
7	Pengangkutan & Komunikasi	0,02	0,24
8	Keuangan, Sewa & Js perusahaan	0,12	0,21
9	Jasa-Jasa	0,33	0,15
PDRB			

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2011 (data diolah)

Dari sisi pertumbuhan kontribusi sektoral pembentuk PDRB secara rata-rata dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 untuk harga berlaku (HB) terlihat bahwa sektor industri pengolahan serta listrik, gas dan air bersih mengalami kontraksi masing-masing -0,79% dan -0,06%, hal ini sebagai akibat dari terjadinya krisis ekonomi global pada tahun 2008 dan 2009, serta kurangnya pasokan energi listrik sebagai dampak dari tidak adanya pembangunan pembangkit listrik untuk mensuplai kebutuhan energi di Sumatera Utara yang pertumbuhannya mencapai 8-9%/tahun, hal ini mengakibatkan pada tahun 2006-2009 Sumatera Utara sering menjadi langganan padamnya listrik yang sampai dikatakan kronis.

Sementara pertumbuhan kontribusi sektoral pembentuk PDRB atas dasar harga konstan (HK) secara rata-rata dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 terdapat 4 sektor yang mengalami kontraksi yakni pertanian -0,20%, pertambangan dan penggalian -0,01%, Industri pengolahan sebesar -0,45% dan listrik gas dan air bersih sebesar -0,02%, khusus untuk 2 sektor terakhir telah dijelaskan penyebab penurunannya, sementara untuk penurunan sektor pertanian hal ini sebagai dampak dari peningkatan industri pengolahan dimana sumbangan sektor pertanian kalah bersaing dalam menghasilkan nilai tambah ditambah lagi bahwa pada periode tersebut terjadi lonjakan harga pangan dunia yang berdampak pada sektor pertanian diantaranya pertanian tanaman pangan dan perkebunan serta peternakan. Adapun penurunan pertumbuhan dari sektor pertambangan dan penggalian adalah akibat dari beberapa kontrak karya eksplorasi sumber daya alam belum direalisasikan disamping banyaknya regulasi yang melarang secara tegas operasionalisasi pertambangan liar, serta terdapat sebahagian wilayah pertambangan masuk dalam kawasan hutan lindung.

Tabel. 2.9

*Perkembangan PDRB provinsi/kabupaten/kota Tahun 2007-2010  
Atas Dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku  
Provinsi Sumatera Utara*

(dalam jutaan rupiah)

NO	KABUPATEN/KOTA	PDRB									
		2006		2007		2008		2009		2010	
		HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
1	Nias	2,710.47	1,629.31	3,187.87	1,738.56	3,666.95	1,855.08	982.25	468.23		
2	Mandailing Natal	2,260.84	1,583.39	2,603.79	1,685.69	3,085.12	1,795.31	3,502.98	1,909.23		
3	Tapanuli Selatan	4,064.28	2,705.25	4,598.18	2,854.60	2,558.43	1,631.79	2,761.51	1,697.91		
4	Tapanuli Tengah	1,445.64	936.00	1,616.00	1,000.47	1,808.76	1,058.12	1,987.16	1,122.91		
5	Tapanuli Utara	2,418.46	1,299.38	2,729.50	1,377.74	3,126.12	1,456.88	3,392.63	1,529.40		
6	Toba Samosir	2,082.10	1,422.30	2,414.62	1,501.68	2,746.14	1,585.79	3,056.05	1,669.36		
7	Labuhan Batu	12,564.46	7,361.83	14,371.16	7,879.42	16,626.18	8,339.47	6,658.79	3,101.70		
8	Asahan	16,648.38	10,202.23	8,221.17	4,670.90	9,551.08	4,896.03	10,433.94	5,134.42		
9	Simalungun	6,843.96	4,556.30	7,647.49	4,823.35	8,415.22	5,047.12	9,221.62	5,285.27		
10	Dairi	2,552.75	1,704.13	2,860.20	1,789.80	3,114.09	1,872.02	3,392.99	1,952.59		
11	Karo	3,978.80	2,729.61	4,483.32	2,869.74	5,058.68	3,019.39	5,646.54	3,175.60		
12	Deli Serdang	21,800.42	11,577.51	26,041.99	12,264.03	30,116.83	12,977.94	34,172.48	13,698.06		
13	Langkat	9,579.48	5,886.69	11,455.32	6,178.02	13,243.64	6,491.75	14,786.58	6,817.32		
14	Nias Selatan	1,548.83	1,033.42	1,692.40	1,090.67	1,893.64	1,150.63	2,031.68	1,182.90		
15	Humbang Hasundutan	1,535.58	807.46	1,727.28	856.38	1,992.76	906.36	2,189.65	954.55		
16	Pakpak Bharat	207.59	130.09	231.07	137.83	258.87	145.91	290.30	154.42		
17	Samosir	1,196.46	868.59	1,287.46	908.46	1,392.38	953.85	1,519.32	1,002.46		
18	Serdang Bedagai	5,648.32	3,590.14	6,249.01	3,814.43	7,472.75	4,047.77	8,490.36	4,287.25		
19	Batubara	-	-	11,463.16	6,486.78	13,201.88	6,781.88	14,517.23	7,063.22		
20	Padang Lawas Utara	-	-	-	-	1,271.66	692.42	1,424.47	732.28		
21	Padang Lawas	-	-	-	-	1,214.67	675.97	1,349.48	710.76		
22	Labuhan Batu Selatan	-	-	-	-	-	-	5,472.19	2,685.09		
23	Labuhan Batu Utara	-	-	-	-	-	-	6,284.98	2,993.33		
24	Nias Utara	-	-	-	-	-	-	998.84	459.60		
25	Nias Barat	-	-	-	-	-	-	506.34	239.26		
26	Sibolga	931.52	589.40	1,075.26	623.78	1,235.09	660.27	1,361.12	697.92		
27	Tanjung Balai	1,972.65	1,181.69	2,229.50	1,229.07	2,479.88	1,278.15	2,754.81	1,331.00		
28	Pematang Siantar	2,865.62	1,748.63	3,094.56	1,729.27	3,458.79	1,828.21	3,746.22	1,926.30		
29	Tebing Tinggi	1,417.74	923.32	1,610.17	978.41	1,823.67	1,037.46	2,032.88	1,099.24		
30	Medan	49,056.86	27,210.12	55,455.59	29,352.92	65,221.77	31,334.34	72,666.89	33,430.69		
31	Binjai	2,889.99	1,613.44	3,311.30	1,705.07	3,809.37	1,796.24	4,312.46	1,902.99		
32	Padangsidempuan	1,318.27	742.01	1,511.82	787.90	1,744.26	835.92	1,899.01	884.26		
33	Gunung Sitoli	-	-	-	-	-	-	1,775.10	813.26		
	<b>SUMATERA UTARA</b>	<b>160,376.79</b>	<b>93,347.40</b>	<b>181,819.74</b>	<b>99,792.27</b>	<b>213,931.70</b>	<b>106,152.36</b>	<b>236,353.62</b>	<b>111,559.22</b>		

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2011. (data diolah)

Untuk perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan tingkat Kabupaten/Kota dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 terlihat bahwa Kota Medan masih merupakan daerah yang memiliki angka PDRB tertinggi di Sumatera Utara dimana tahun 2009 Kota Medan memberikan sumbangan terhadap PDRB Sumatera Utara ADHB sebesar 30,74% dan ADHK sebesar 29,97%, disusul oleh Kabupaten Deli Serdang berdasarkan ADHB sebesar 14,46% dan ADHK 12,28%, Langkat berdasarkan ADHB sebesar 6,26% dan ADHK 6,11% serta Kabupaten Batu Bara berdasarkan ADHB sebesar 6,14% dan ADHK 6,33%.

Secara umum memang terlihat sumbangan Pantai Timur Sumatera Utara lebih dari 50% dibandingkan dengan kawasan Dataran Tinggi dan Pantai Barat, hal ini akibat fasilitas infrastruktur yang memang lebih baik serta sumbangan dari sektor perkebunan dan industri pengolahan yang konsentrasinya masih di kawasan Pantai Timur.

## b. Laju Inflasi

Tabel. 2.10  
Nilai inflasi rata-rata Tahun 2007-2011  
Provinsi Sumatera Utara

Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	Rata-Rata Pertumbuhan
Inflasi	6.60	10.72	2.61	8,00	3,67	6,32

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2012 (data diolah)

Secara umum laju inflasi Sumatera Utara masih dalam kondisi yang rendah (masih dibawah 2 digit) kecuali pada tahun 2008 yang mencapai 10,72%, hal ini sebagai akibat, kontraksi ekonomi di seluruh dunia, dan bahkan capaiannya selalu dibawah capaian nasional, kecuali tahun 2010 Sumatera Utara capaian tingkat inflasinya diatas nasional, dimana capaian nasional sebesar 6,96%, akan tetapi hal ini akan terus diupayakan untuk menstabilkannya dalam rangka tetap mempertahankan tingkat daya beli masyarakat.

## c. PDRB per kapita

Tabel. 2.11  
PDRB Perkapita Tahun 2007-2011  
Provinsi Sumatera Utara

Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
Nilai PDRB (Rp)	181,819,737.32	213,931,696.78	236,353,615.83	275,700,201	314,15
Jumlah Penduduk (Jiwa)	12,834,371.00	13,042,317.00	13,248,386.00	12,985,075	13.103.596
PDRB perkapita (Rp.juta/jiwa)	14.17	16.40	17.84	21.23	23,97

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2012

Adapun untuk kondisi PDRB/kapita atas dasar harga berlaku dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 selalu mengalami peningkatan, yang merupakan suatu tanda perbaikan struktur pendapatan global masyarakat Sumatera Utara, pada tahun 2006 PDRB/kapita baru mencapai Rp. 12,68 juta dan pada tahun 2011 telah mencapai Rp. 23,97 juta atau jika dikonversikan ke mata uang dollar Amerika Serikat dengan kurs Rp. 9.500/dollar, maka PDRB/kapita masyarakat Sumatera Utara telah mencapai angka diatas **US\$ 3.000**.

## d. Disparitas Pendapatan Masyarakat

### 1) Indeks Gini

Tingkat ketimpangan pendapatan perkapita masyarakat Sumatera Utara berdasarkan Indeks Gini/Lorenz Curve, rasionya Moderat yakni sebesar 0,362, yang mengindikasikan bahwa disparitas pendapatan di Sumatera Utara masih lebih besar bila dibandingkan dengan Gini Ratio Nasional yang berada diangka 0,33.

### 2) Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia

Indikator jumlah dan persentase penduduk miskin merupakan indikator makro yang menggambarkan perkembangan pembangunan dan kesejahteraan ekonomi penduduk secara umum. Jumlah desa tertinggal dapat memberikan indikasi mengenai daerah-daerah

dimana penduduk miskin banyak ditemui. Kedua indikator tersebut saling melengkapi. Perlu diketahui, bahwa tidak semua penduduk di desa tertinggal adalah miskin, sebaliknya tidak semua penduduk di Kota adalah tidak miskin.

Pembangunan yang telah berjalan di Sumatera Utara berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dari 1,97 juta atau 15,66 persen pada tahun 2006 turun menjadi 1.42 juta atau 10,83 persen pada tahun 2011.

Bank Dunia memberikan 3 (tiga) kriteria penyebaran pendapatan penduduk yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Menurut Kriteria Bank Dunia, jika 40 persen penduduk terendah memperoleh : kurang dari 12 persen dari total pendapatan maka distribusi pendapatan dikatakan buruk (tingkat ketimpangan tinggi); antara 12 persen sampai dengan 17 persen dikatakan berketimpangan sedang; lebih dari 17 persen berketimpangan rendah.

Menurut versi bank Dunia yang menstandarkan pendapatan perkapita yang ideal sekitar 2 US\$/hari/kapita, maka jumlah penduduk yang memenuhi standar tersebut dengan kurs rupiah Rp. 9.500/ 1 US\$ pada tahun 2010 adalah 40 persen penduduk lapisan sedang/menengah dan 20 persen penduduk lapisan atas/tinggi masih menerima pembagian pendapatan relatif lebih tinggi dibandingkan 40 persen penduduk terendah, yaitu berkisar antara 35,29 persen sampai dengan 40,35 persen dari total pendapatan, sementara 40% penduduk berpenghasilan terendah hanya menerima 24,36%, berarti secara umum ketimpangan pendapatan versi Bank Dunia adalah rendah.

### 3) Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

**Tabel 2.12**  
Ketimpangan Pendapatan Penduduk Kabupaten/Kota  
Provinsi Sumatera Utara 2006-2009 menurut Indeks Ketimpangan Williamson

NO	KAB/KOTA	TAHUN				Rata-Rata
		2006	2007	2008	2009	
1	Nias	0.094	0.092	0.090	0.086	0.090
2	Madina	0.087	0.087	0.171	0.085	0.107
3	Tapsel	0.092	0.094	0.034	0.034	0.064
4	Tapteng	0.088	0.089	0.091	0.092	0.090
5	Taput	0.045	0.047	0.047	0.047	0.047
6	Tobasa	0.016	0.016	0.015	0.016	0.016
7	Labuhan Batu	0.004	0.002	0.001	0.021	0.007
8	Asahan	0.095	0.026	0.029	0.030	0.045
9	Simalungun	0.068	0.069	0.070	0.069	0.069
10	Dairi	0.020	0.021	0.023	0.022	0.022
11	Karo	0.013	0.008	0.005	0.003	0.007
12	Deli Serdang	0.014	0.023	0.030	0.033	0.025
13	Langkat	0.060	0.064	0.066	0.066	0.064
14	Nisel	0.070	0.071	0.071	0.070	0.070
15	Humbahas	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031
16	Pakpak Bharat	0.026	0.030	0.032	0.032	0.030
17	Samosir	0.010	0.011	0.011	0.010	0.010
18	Sergei	0.043	0.045	0.047	0.046	0.045
19	Batu Bara	-	-	0.201	0.198	0.200
20	Paluta	-	-	0.067	0.069	0.068
21	Palas	-	-	-	0.063	0.063
22	L. Batu Selatan	-	-	-	0.020	0.020
23	Lb. Utara	-	-	-	0.002	0.002
24	Nias Utara	-	-	-	-	-
25	Nias Barat	-	-	-	-	-
26	Sibolga	0.011	0.012	0.012	0.012	0.012

27	Tj. Balai	0.003	0.001	0.005	0.006	0.004
28	P. Siantar	0.007	0.008	0.008	0.007	0.008
29	T. Tinggi	0.010	0.010	0.010	0.009	0.010
30	Medan	0.317	0.327	0.335	0.349	0.332
31	Binjai	0.015	0.016	0.017	0.017	0.016
32	P.Sidempuan	0.054	0.054	0.055	0.054	0.054
33	Gunung Sitoli	-	-	-	-	-
SUMATERA UTARA		0.052	0.050	0.058	0.053	0.054

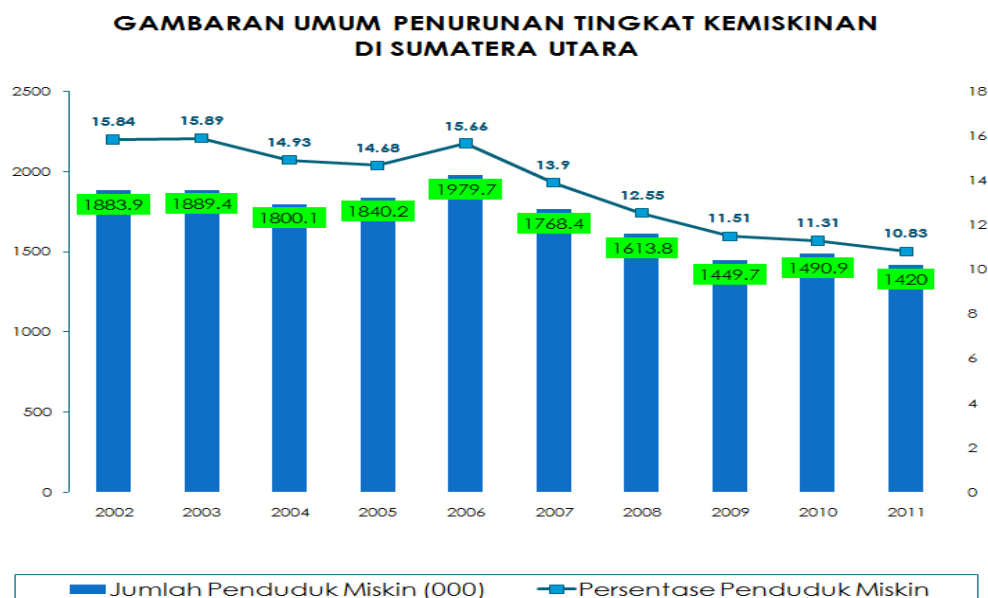
Sumber : BPS Provsu, 2010 Data diolah

Rata rata tingkat disparitas pendapatan regional Kab/kota di Sumatera Utara dari tahun 2006 sampai dengan 2009 terlihat masih cukup rendah yakni 0,05, hal ini mengindikasikan bahwa pemertaan hasil pembangunan telah cukup merata, bila dilihat dari disparitas pendapatan dengan metode indeks williamson terlihat bahwa Kota Medan merupakan Kab/kota yang memiliki disparitas pendapatan paling tinggi yakni 0,332 disusul oleh Kabupaten Batu Bara sebesar 0,20. Adapun Kab/Kota yang memiliki disparitas pendapatan rendah yakni Kabupaten Labuhan Batu Utara sebesar 0,002 dan disusul oleh Kota Tanjung Balai sebesar 0,004

#### e. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan

Adapun untuk angka penduduk Sumatera Utara yang berada diatas garis kemiskinan setiap tahun terus mengalami perbaikan, dimana tahun 2006 sebesar 84,34%, tahun 2007 sebesar 86,10%, tahun 2008 sebesar 87,45%, tahun 2009 sebesar 88,47%, tahun 2010 sebesar 86,69% dan tahun 2011 menjadi 89,17%.

Secara umum penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Sumber : BPS 2011, Bappemas dan Pemdes, data diolah.

#### 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

##### 1) Bidang pendidikan

##### a. Angka melek huruf

Dari total penduduk Sumatera Utara tahun 2011 (diperhitungkan dari Sensus Nasional 2010) dibandingkan jumlah penduduk yang masih buta aksara diperoleh angka melek huruf sudah mencapai 95%. Namun capaian angka melek huruf rata-rata penduduk Provinsi Sumatera Utara



yang berusia 15 tahun keatas per-Kabupaten/Kota sampai tahun 2011 masih sebesar 7.526.782 jiwa, Dengan kata lain masih terdapat Angka Buta Aksara penduduk usia produktif sebesar 7.752.829 jiwa. Hal ini menunjukkan masih adanya penduduk usia sekolah yang belum mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga perlu perhatian yang lebih serius dari semua pihak terkait dalam mengurangi angka buta aksara di Provinsi Sumatera Utara

**Tabel 2.13**  
Perkembangan Angka Melek Huruf penduduk usia diatas 15 tahun  
dari Tahun 2007 - 2011

NO	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011*)
1.	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	8.378.148	8.919.973	9.108.738	9.520.274	7.752.829
2.	Angka melek huruf	97.89%	98.11%	98.31%	98.26%	95%

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2012 Data diolah  
\*) Persentase diperkirakan dari jumlah penduduk hasil Sensus Nasional 2010

**Tabel 2.14**  
Angka Melek Huruf Tahun 2011 Menurut Kabupaten/Kota

No	KABUPATEN/KOTA	Jumlah Penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	Jumlah Penduduk usia 15 tahun diatas	Angka melek huruf
1	2	3	4	5
1	Kota Medan	1.384.724	1.399.185	98,97
2	Kota Binjai	162.840	164.267	99,13
3	Kota Tebing Tinggi	90.473	91.086	99,33
4	Kota Pematang Siantar	152.605	153.642	99,33
5	Kota Tanjung Balai	94.293	95.374	98,87
6	Kota Sibolga	58.271	58.650	99,35
7	Kota Padangsidempuan	113.072	115.232	98,13
8	Kota Gunung Sitoli	77.155	86.357	89,34
9	Kab. Deli Serdang	994.190	1.015.341	97,92
10	Kab. Serdang Bedagai	386.987	396.212	97,67
11	Kab. Langkat	625.810	646.054	96,87
12	Kab. Karo	311.660	316.170	98,57
13	Kab. Dairi	149.514	152.868	97,81
14	Kab. Pakpak Bharat	19.989	20.160	99,15
15	Kab. Batu Bara	271.769	284.256	95,61
16	Kab. Asahan	356.275	376.803	94,55
17	Kab. Labuhanbatu Utara	85.342	88.434	96,50
18	Kab. Labuhan Batu	187.294	194.780	96,16
19	Kab. Labuhanbatu Selatan	9.473	12.021	78,80
20	Kab. Simalungun	530.365	549.292	96,55
21	Kab. Samosir	74.283	77.798	95,48
22	Kab. Toba Samosir	96.910	98.754	98,13
23	Kab. Humbang Hasundutan	93.608	95.693	97,82
24	Kab. Tapanuli Utara	153.867	157.207	97,88
25	Kab. Tapanuli Tengah	158.457	162.705	97,39
26	Kab. Tapanuli Selatan	152.912	154.143	99,20
27	Kab. Padang Lawas Utara	96.900	97.521	99,36
28	Kab. Padang Lawas	123.509	124.289	99,37
29	Kab. Mandailing Natal	227.382	228.655	99,44



No	KABUPATEN/KOTA	Jumlah Penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	Jumlah Penduduk usia 15 tahun diatas	Angka melek huruf
1	2	3	4	5
30	Kab. Nias	45.155	65.703	68,73
31	Kab. Nias Utara	49.825	59.825	83,28
32	Kab. Nias Barat	53.262	56.741	93,87
33	Kab. Nias Selatan	138.611	157.611	87,95
	<b>SUMATERA UTARA</b>	<b>7.526.782</b>	<b>7.752.829</b>	<b>95</b>

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2012

Kabupaten yang tertinggi angka melek huruf adalah Kabupaten Mandailing Natal (99.44%), Kabupaten Padang Lawas (99.37%), Padang Lawas Utara (99.36%), dan Kota Sibolga (99.35%), sedangkan Kabupaten yang perlu mendapat prioritas penanganan buta aksara adalah Kota Gunung Sitoli (89.34%), Kabupaten Nias Selatan (87.95%), Kabupaten Nias Utara (83.28%), Kabupaten Labuhanbatu Selatan (78.80%) dan Kabupaten Nias (68.73%). Untuk selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2.

#### **b. Angka rata-rata lama sekolah**

Capaian Angka Lama Sekolah rata-rata Provinsi Sumatera Utara, mengalami peningkatan dari sebelumnya tahun 2008, sebesar 8,60 meningkat menjadi 8.65 tahun pada tahun 2009, dan menjadi 8.85 pada tahun 2010.

#### **c. Angka Partisipasi Kasar**

Dari data Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2010 terlihat bahwa APK untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan jumlah penduduk usia 0-6 tahun, di Provinsi Sumatera Utara masih tergolong rendah (29,58%), dan mengalami peningkatan menjadi 31,27 pada tahun 2011, sehingga masih perlu perhatian yang lebih baik lagi pada tahun mendatang. Angka Partisipasi Kasar untuk Pendidikan Dasar SD/MI sudah memenuhi target sebesar 110,54, untuk SMP/MTs sebesar 99,25, sedangkan untuk pendidikan menengah (SMA/SMK/MA sebesar 83,76. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 3.

#### **e. Angka Partisipasi Murni**

Dari data Angka Partisipasi Murni Provinsi Sumatera Utara tahun 2011, terlihat bahwa ada kecenderungan terjadinya penurunan jumlah partisipasi siswa dari APM siswa SD (92,43%), SLTP (SMP/MTs) (77,46%) dan SLTA (SMA/MA/MK) 66,04%. Hal ini menunjukkan masih banyak anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di atasnya (putus sekolah). Hal ini disebabkan masih rendahnya minat dan dorongan orang tua untuk menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi. Disamping masih terbatasnya kemampuan ekonomi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Sementara dari data APM siswa SLTA per Kabupaten/Kota terlihat bahwa kabupaten dengan capaian APM tertinggi adalah Karo (95,55%), Pakpak Bharat (95,28%), Tapanuli Utara (94,85%), Nias Selatan (94,02%), Dairi (92,82%) dan Tapanuli Tengah (90,10%). Sedangkan Kabupaten/Kota yang paling rendah capaian APM untuk tingkat SLTA adalah Gunung Sitoli (45,45%), Labuhan Batu Utara (22,34%), Nias Barat (17,62%), Labuhan Batu Selatan (15,08%) dan Nias Utara (13,54%). (Lihat tabel lampiran 6)

Dalam rangka pencapaian sasaran pendidikan di Sumatera Utara yakni Wajib Belajar 12 tahun dan untuk mewujudkan industrialisasi di Provinsi Sumatera Utara diperlukan Sumber Daya Manusia yang memiliki pendidikan dan keahlian yang memadai atau minimal tamat Sekolah Lanjutan Menengah Atas (SLTA) khususnya dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

## 2) Bidang Kesehatan

Capain Indikator utama bidang kesehatan adalah sebagai berikut :

### a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi dilihat dari data kematian/1000 kelahiran menunjukkan masih cukup tingginya rata-rata tingkat kematian bayi yakni sebesar 25,6/1000 kelahiran hidup atau 2,56%. Kabupaten dengan tingkat kematian bayi tertinggi terdapat di Kabupaten Mandailing Natal (3,49%). Kota Medan dengan fasilitas layanan kesehatan yang sudah cukup memadai menunjukkan tingkat kematian bayi paling rendah (1,14%). Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 8.

### b. Angka Usia Harapan Hidup

Usia harapan penduduk Sumatera Utara mengalami peningkatan dari 66,7 tahun pada tahun 2000 menjadi 69,35 tahun pada tahun 2009. Kabupaten dengan capaian Usia Harapan Hidup tertinggi berada pada Kabupaten Karo (71,99 tahun). Faktor lingkungan dan kebiasaan hidup sehat masyarakat di Kabupaten Karo memungkinkannya mengungguli Kota Medan yang hanya sebesar 71,50 tahun, dan Binjai sebesar 71,54 tahun. Sementara Kabupaten Mandailing Natal menjadi Kabupaten paling rendah Angka Usia Harapan Hidupnya, yakni hanya sebesar 63,46. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten setempat dalam meningkatkan derajat layanan kesehatannya. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel lampiran 9.

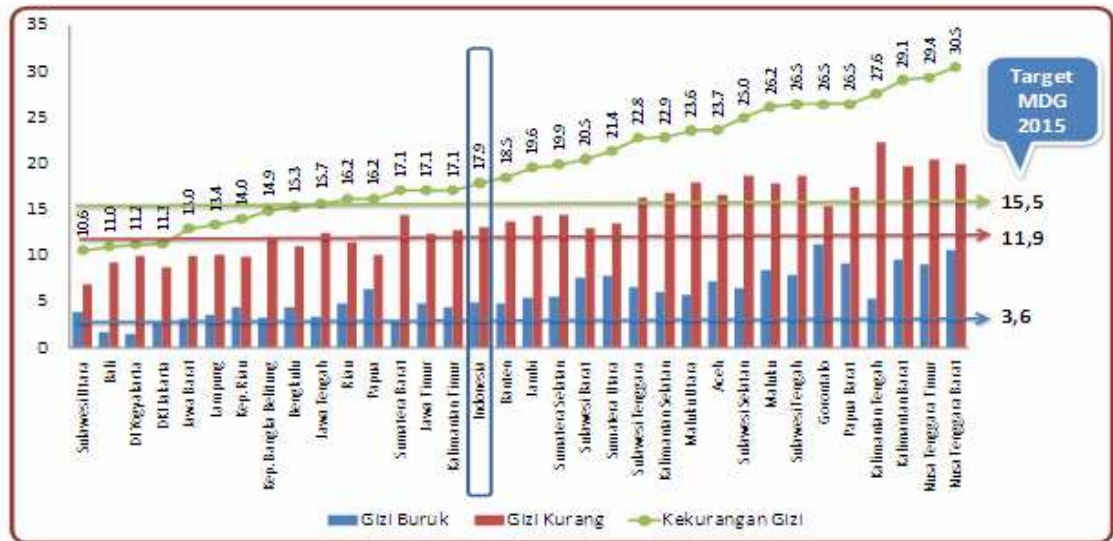
### c. Persentase Balita Gizi Buruk

Status Gizi Balita merupakan prasyarat dasar untuk meningkatkan daya saing bangsa karena status gizi anak akan mempengaruhi tingkat kesehatan fisik dan kecerdasan anak yang akhirnya akan mempengaruhi tingkat produktivitas secara ekonomis.

Menurut hasil penelitian yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan RI (Riskesdas, 2009), Provinsi Sumatera Utara masih tergolong Provinsi dengan angka kekurangan gizi balitanya diatas angka rata-rata nasional yakni 21,4 sementara angka rata-rata nasional 17,9. Menurut penelitian WHO anak yang memiliki status gizi kurang atau buruk mempunyai resiko kehilangan tingkat kecerdasan atau IQ sebesar 10-15 poin.

Dari data prevalensi rata-rata Balita Gizi Kurang di Sumatera Utara masih termasuk kategori tinggi. Terdapat 2 Kabupaten yang termasuk kepada kriteria Sangat Tinggi (diatas 30%) yakni Nias dan Nias Selatan, 14 termasuk kriteria tinggi (20-29%) dan selebihnya kategori sedang (10-19%). Yang perlu dicermati adalah masih tingginya capaian prevalensi gizi buruk untuk wilayah kota seperti Sibolga, Tanjungbalai, Tebing Tinggi dan Medan.

Grafik dibawah ini memperlihatkan kondisi persentase balita gizi buruk Provinsi Sumatera Utara dibandingkan provinsi lainya di Indonesia.



Gambar 2.1. Grafik Angka Prevalensi Kekurangan Gizi pada Balita per Provinsi di Indonesia

### 3) Bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja

#### a. Persentase penduduk miskin

Persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara, diukur dari pendapatan perkapita/bulan tercatat sebesar 11,31% atau berjumlah 1.490.000 orang, dengan konsentrasi di perkotaan sebesar 11,56% dan di pedesaan sebesar 11,29%. Tabel dibawah ini mengetengahkan tentang pendapatan penduduk miskin (memiliki pendapatan kurang dari Rp. 201.810/Kapita/bulan di pedesaan dan Rp. 247.547/Kapita/bulan untuk di perkotaan, persentase rata-rata di kota dan desa dan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel 2.16.

**Tabel 2.15.**  
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin  
Provinsi Sumatera Utara

TAHUN	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln)		Persentase Penduduk Miskin			Jumlah Penduduk Miskin (Juta)		
	Kota	Desa	Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2006	184.694	142.095	NA	NA	15,66	NA	NA	1,979
2007	205.379	154.827	NA	NA	13,90	NA	NA	1,768
2008	218.333	171.922	12,85	12,29	12,55	761,7	852,1	1,613
2009	234.712	189.306	11,45	11,34	11,51	688,0	689,0	1,499
2010	247.547	201.810	11,56	11,29	11,31	811,7	801,9	1,490

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2011  
Keterangan : NA = Not Available (Data tidak tersedia)

Sementara jika dilihat perkembangan berdasarkan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.16.**  
*Jumlah Penduduk Miskin pada Kabupaten/Kota  
Provinsi Sumatera Utara*

NO	Kabupaten/Kota	TAHUN		Perubahan	KET
		2.010	2.011		
1	Asahan	74.711	76.300	1.589	Bertambah
2	Batubara	32.496	46.000	13.504	Bertambah
3	Dairi	20.256	26.900	6.644	Bertambah
4	Deli Serdang	45.504	96.000	50.496	Bertambah
5	Humbang Has	13.632	18.200	4.568	Bertambah
6	Langkat	89.184	104.800	15.616	Bertambah
7	Labuhan Batu	23.647	44.300	20.653	Bertambah
8	Karo	24.240	38.700	14.460	Bertambah
9	Mandailing Natal	41.620	50.900	9.280	Bertambah
10	Nias	115.615	26.400	<b>(89.215)</b>	<b>Berkurang</b>
11	Nias Selatan	36.053	60.100	24.047	Bertambah
12	Pakpak bharat	28.278	5.600	<b>(22.678)</b>	<b>Berkurang</b>
13	Padang Lawas	86.387	25.000	<b>(61.387)</b>	<b>Berkurang</b>
14	Padang Lawas Utara	51.340	25.000	<b>(26.340)</b>	<b>Berkurang</b>
15	Simalungun	59.712	87.700	27.988	Bertambah
16	Samosir	17.328	19.700	2.372	Bertambah
17	Serdang Bedagai	34.848	62.800	27.952	Bertambah
18	Tapanuli Utara	25.152	34.900	9.748	Bertambah
19	Tapanuli Tengah	39.888	52.200	12.312	Bertambah
20	Tapanuli Selatan	131.221	31.500	<b>(99.721)</b>	<b>Berkurang</b>
21	Toba Samosir	12.288	17.600	5.312	Bertambah
22	Labuhan Batu Utara	18.743	40.900	22.157	Bertambah
23	Labuhan Batu Selatan	29.195	43.400	14.205	Bertambah
24	Nias Utara	95.746	40.700	<b>(55.046)</b>	<b>Berkurang</b>
25	Nias Barat	56.293	25.100	<b>(31.193)</b>	<b>Berkurang</b>
26	Kota Binjai	29.552	18.000	<b>(11.552)</b>	<b>Berkurang</b>
27	Kota Medan	138.700	212.300	73.600	Bertambah
28	Kota Pematang Siantar	10.560	27.500	16.940	Bertambah
29	Kota Sibolga	4.320	11.700	7.380	Bertambah
30	Kota Tanjung Balai	8.736	25.200	16.464	Bertambah
31	Kota Tebing Tinggi	10.622	18.900	8.278	Bertambah
32	Kota P. Sidempuan	44.578	20.300	<b>(24.278)</b>	<b>Berkurang</b>
33	Kota Gunung Sitoli	49.255	42.500	<b>(6.755)</b>	<b>Berkurang</b>
	TOTAL	1.499.700	1.477.100	22.600 <b>(Berkurang)</b>	<b>(1,5%)</b>

Sumber : Bappemas dan Pemdes, 2012 data diolah.

Dari tabel diatas terlihat bahwa penurunan jumlah penduduk miskin terjadi di beberapa Kabupaten/Kota, yakni Nias, Pakpak Bharat, Padang Lawas, Padanglawas Utara, Tapanuli Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Binjai, Padangsidimpuan dan Gunung Sitoli, selebihnya kabupaten/kota lainnya mengalami pertambahan jumlah penduduk miskin.

b. Kesempatan kerja (Rasio penduduk yang bekerja)

Kesempatan kerja dilihat berdasarkan rasio penduduk yang bekerja dapat dilihat pada tabel 2.17.

**Tabel 2.17.**  
*Rasio Penduduk yang Bekerja dengan Angkatan Kerja Tahun 2010*

Golongan umur	Angkatan Kerja		Jumlah	Rasio
	Bekerja	Mencari Pekerjaan		
15-19	445.322	115.504	560.826	0.79
20-24	739.738	165.016	904.754	0.82
25-29	809.971	88.920	898.891	0.90
30-34	773.221	44.290	817.511	0.95
35-39	702.343	20.311	722.654	0.97
40-44	659.153	29.731	688.884	0.96
45-49	556.827	30.047	586.874	0.95
50-54	483.455	11.953	495.408	0.98
55-59	316.637	4.473	321.110	0.99
65+	403.399	2.580	405.979	0.99
<b>Jumlah</b>	<b>5.890.066</b>	<b>512.825</b>	<b>6.402.891</b>	<b>0.92</b>

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara, 2011 (data diolah)

c. Kriminalitas (Angka kriminalitas yang tertangani)

Kondisi keamanan di Provinsi Sumatera Utara dilihat dari angka kriminalitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.18.**  
*Angka Kriminalitas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010*

Kasus	Kejadian	Tertangani
Pembunuhan	127	88
Penganiayaan Berat	3.970	2.051
Penculikan	12	11
Pencurian dengan Kekerasan	1.003	436
Pencurian dengan Pemberatan	7.154	2.890
Pencurian Ranmor	4.917	333
Pencurian Kawat Telepon	-	-
Pemeriksaan	247	148
Pembakaran	112	23
Senpi/Handak	32	17
Pemerasan	540	280
Penyelundupan	18	8
<b>Jumlah</b>	<b>18.132</b>	<b>6.285</b>

Sumber : Polda Sumut, 2011

### 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pencapaian kinerja pada aspek layanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terdiri dari :

#### 2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Hasil capaian kinerja layanan urusan wajib pemerintah daerah terdiri dari :

##### 2.1.3.1.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan pemenuhan atas hak ini menjadi kewajiban pemerintah. Selain jumlah penduduk yang besar, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pendidikan adalah relatif besarnya disparitas ketersediaan sarana pendidikan. Di satu pihak, di wilayah perkotaan umumnya memiliki sekolah yang berkualitas dengan biaya pendidikan yang relatif mahal dan dikelola secara mandiri. Dipihak lain, beberapa daerah masih terfokus pada peningkatan cakupan, atau masih berkuat pada peningkatan kualitas.

##### a. Angka partisipasi sekolah (APS)

Secara umum dari data Angka Partisipasi Sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar 9 tahun (SD dan SLTP) yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tahun 2010 terungkap bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) siswa SD/MI sebesar 94,24% dan APS siswa SLTP (SMP/MTs) sebesar 74,74%, yang berarti terjadi penurunan APS dari jenjang sekolah dasar ke sekolah lanjutan pertama. Terjadinya penurunan APS ini perlu untuk dicermati dalam rangka mendukung pencaian misi Wajib Belajar 12 tahun (siswa dapat menamatkan jenjang pendidikan dari mulai SD sampai SLTA)

##### b. Ratio Ketersediaan Sekolah dan Ruang Kelas pada berbagai jenjang pendidikan dasar

**Tabel 2.19.**  
Ratio ketersediaan Sekolah dan Ruang Kelas  
Pada berbagai jenjang pendidikan tahun 2006-2009

NO	Jenjang Sekolah	Tahun			
		2006	2007	2008	2009
<b>A.</b>	<b>Jumlah Gedung Sekolah</b>				
1	SD	9,297	9,336	9,136	8,968
2	SMP	1,412	1,469	1,530	1,627
3	SMA	822	871	911	935
4	SMK	590	598	619	692
<b>B.</b>	<b>Jumlah Ruang Kelas</b>				
1	SD	72,205	63,662	65,729	64,233
2	SMP	12,955	13,153	14,407	14,781
3	SMA	7,886	8,194	9,045	8,714
4	SMK	5,069	4,959	5,362	6,067
<b>C.</b>	<b>Ratio Kelas/Sekolah</b>				
1	SD	7.77	6.82	7.19	7.16
2	SMP	9.17	8.95	9.42	9.08
3	SMA	9.59	9.41	9.93	9.32
4	SMK	8.59	8.29	8.66	8.77

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2010 (data diolah)

Dari tabel diatas terlihat bahwa terjadi penambahan jumlah gedung sekolah, ditingkat SMP, SMA dan SMK selama tahun 2006-2009. Kecuali pada jenjang sekolah dasar pada tahun 2008 terjadi penggabungan beberapa sekolah dasar karena berkurangnya jumlah murid pada beberapa sekolah.

c. Jumlah Guru dan murid dan Rasio Guru/Murid pada berbagai Jenjang Pendidikan Dasar

**Tabel 2.20.**

*Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar  
Tahun 2007-2011 Provinsi Sumatera Utara*

NO	Jenjang Pendidikan	2007	2008	2009	2010	2011
<b>1</b>	<b>SD</b>					
1.1.	Jumlah Guru	91.374	92.897	95.397	94.441	102.510
1.2.	Jumlah Murid	1.901.643	1.920.660	1.939.865	1.959.265	1.287.472
1.3.	Rasio	22%	20%	22%	22%	24%
<b>2</b>	<b>SMP</b>					
2.1.	Jumlah Guru	51.753	54.161	55.966	34.334	59.002
2.2.	Jumlah Murid	828.346	896.593	936.039	962.689	428.575
2.3.	Rasio	13	12	12	12	12
<b>3</b>	<b>SMA</b>					
3.1.	Jumlah Guru	16.809	17.200	18.358	18.335	22.610
3.2.	Jumlah Murid	307.000	334.833	321.066	398.100	222.200
3.3.	Rasio	14	13	13	13	12
<b>4</b>	<b>SMK</b>					
4.1.	Jumlah Guru	15.010	16.066	17.100	11.726	16.019
4.2.	Jumlah Murid	300.017	310.000	300.500	300.092	220.074
4.3.	Rasio	11	11	12	20	30

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2012

Dari data diatas terlihat bahwa terjadi perkembangan yang fluktuatif pada Ratio Siswa/Guru. Angka ratio sudah cukup ideal antara 11-22 orang siswa untuk setiap orang guru. Untuk Ratio Guru/Murid pada jenjang SLTP dan SMA cenderung semakin membaik. Hanya pada jenjang SMK yang mengalami penurunan. Diharapkan dengan ratio jumlah guru/murid yang semakin ideal akan lebih meningkatkan mutu pendidikan di Sumatera Utara, khususnya pada jenjang pendidikan dasar.

c. Rasio Pendidikan

Dilihat dari perbandingan jumlah siswa terhadap sekolah, perbandingan siswa terhadap jumlah kelas, perbandingan siswa terhadap jumlah guru, perbandingan jumlah kelas terhadap jumlah sekolah, perbandingan jumlah kelas terhadap guru dan perbandingan jumlah guru terhadap sekolah pada berbagai jenjang pendidikan di Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.21.**

*Ratio Jenjang Pendidikan/Rasio Pendidikan  
Tahun 2007-2011*

No	Jenjang Pendidikan/ Rasio Pendidikan	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
<b>1</b>	<b>SD</b>					
	Siswa / Sekolah	1.92	200	2.06	2.15	1.99
	Siswa / Kelas	28	28	29	30	32
	Siswa / Guru	20	19	20	18	17
	Kelas / Sekolah	6.82	7.19	7.16	7.15	6.19
	Kelas / Guru	0.70	0.67	0.69	0.61	0.53
	Guru / Sekolah	10	11	10	12	12
<b>2</b>	<b>SMP</b>					
	Siswa / Sekolah	3.46	3.57	3.49	3.09	2.48
	Siswa / Kelas	39	38	38	36	29
	Siswa / Guru	13	12	12	15	13
	Kelas / Sekolah	8.95	9.42	9.08	8.59	8.66



No	Jenjang Pendidikan/ Rasio Pendidikan	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
	Kelas / Guru	0.32	0.32	0.31	0.41	0.44
	Guru / Sekolah	28	30	29	21	19
<b>3</b>	<b>SMA</b>					
	Siswa / Sekolah	3.63	3.63	3.44	0.43	3.08
	Siswa / Kelas	39	37	37	35	34
	Siswa / Guru	14	13	12	12	11
	Kelas / Sekolah	9.59	9.93	9.32	9.69	9.12
	Kelas / Guru	0.37	0.36	0.33	0.34	0.33
	Guru / Sekolah	26	28	28	28	27
<b>4</b>	<b>SMK</b>					
	Siswa / Sekolah	3.20	3.49	3.56	0.57	3.41
	Siswa / Kelas	39	40	41	39	35
	Siswa / Guru	11	11	12	12	13
	Kelas / Sekolah	8.29	8.66	8.77	9.18	9.78
	Kelas / Guru	0.28	0.27	0.29	0.3	0.37
	Guru / Sekolah	30	32	30	30	26

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2012

Dari data diatas terlihat bahwa Ratio Siswa/Guru sudah cukup ideal antara 11-20 orang siswa untuk setiap orang guru, namun belum terjadi pemerataan pada semua Kabupaten/Kota. Dengan tercapainya ratio ideal ini diharapkan dapat lebih meningkatkan mutu pendidikan di Sumatera Utara.

#### d. Fasilitas pendidikan

Dari data jumlah sekolah yang ada di Sumatera Utara pada tahun 2011, tercatat jumlah ruang kelas dalam kondisi baik berjumlah 54.986 buah (63.50%), kondisi rusak ringan berjumlah 16.484 (19.04%) dan kondisi rusak berat berjumlah 15.121 (17.46%). Hal ini menuntut adanya penanganan segera agar target indikator pendidikan dapat tercapai. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel lampiran 10.

#### e. Angka Putus Sekolah

Perkembangan Angka Putus Sekolah pada berbagai jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

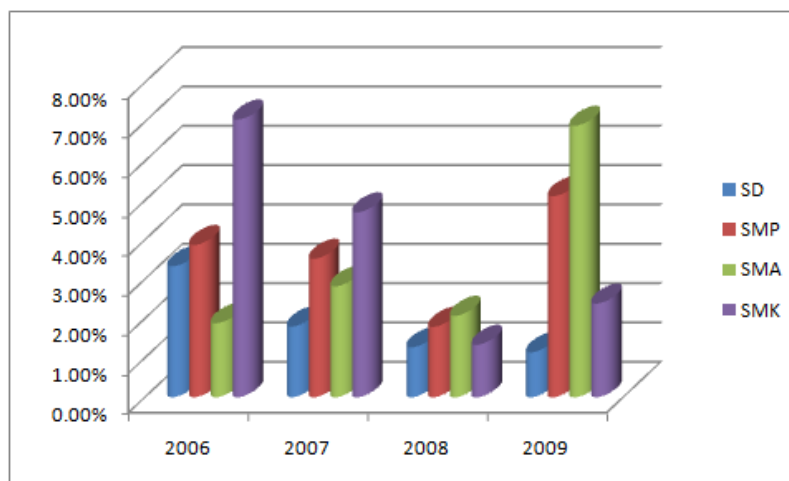
**Tabel 2.22.**  
Perkembangan Angka Putus Sekolah pada berbagai jenjang pendidikan dasar

No	Jenjang Pendidikan	Tahun									
		2007		2008		2009		2010		2011	
		Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%		
1	SD	31,770	1.80%	22,801	1.27%	20,868	1.14%	18.782	1.03	16.904	0.93
2	SMP	17,224	3.52%	9,190	1.79%	27,962	5.11%	25.166	4.60	22.650	4.14
3	SMA	8,640	2.82%	6,547	2.07%	22,812	6.90%	20.531	6.21	1.605	5.59
4	SMK	8,584	4.70%	2,562	1.33%	5,150	2.38%	4.635	2.15	725	1.94

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2012

Dari tabel diatas terlihat bahwa perkembangan angka persentase anak putus sekolah tahun 2007-2010, mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2011 terjadi peningkatan persentase anak putus sekolah. Hal ini perlu mendapat perhatian dari semua pihak yang berkepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat.

Grafik perkembangan angka putus sekolah tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar. 2.2. Grafik Persentase perkembangan putus sekolah pada berbagai jenjang pendidikan tahun 2007-2011

f. Angka Kelulusan

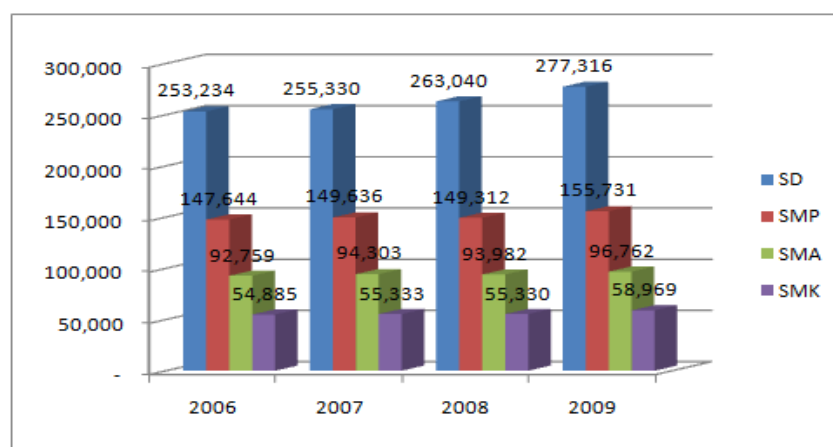
**Tabel 2.23.**  
Perkembangan Angka Kelulusan pada berbagai jenjang pendidikan dasar

No	Jenjang Pendidikan	2007	2008	2009	2010	2011
1	SD	255,330	263,040	277,316	205.289	506.881
2	SMP	149,636	149,312	155,731	171.304	172.973
3	SMA	94,303	93,982	96,762	91.717	98.199
4	SMK	55,333	55,330	58,969	60.513	57.987

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2012

Dari tabel diatas terlihat peningkatan jumlah kelulusan siswa pada berbagai tingkatan, selama tahun 2006-2009, hal ini menunjukkan adanya peningkatan prestasi peserta didik dalam menjalani pendidikannya disekolah. Hal ini perlu terus ditingkatkan untuk masa-masa yang akan datang

Dibawah ini grafik perkembangan jumlah lulusan pada berbagai jenjang pendidikan selama tahun 2007-2011.



Gambar 2.3. Grafik perkembangan jumlah lulusan pada berbagai jenjang pendidikan dari tahun 2007-2011

g. Kualifikasi Guru

**Tabel 2.24.**  
Jumlah Guru Menurut Ijazah Tertinggi

No	Jenjang Pendidikan Guru Sekolah	Tahun									
		2007		2008		2009		2010		2011	
		S-1	S-2	S-1	S-2	S-1	S-2	S-1	S-2	S-1	S-2
1	SD	10,746	46	16,259	22	19,136	24	204.006	65	22.446	71
2	SMP	28,977	214	32,795	248	34,793	580	21.825	148	24.007	162
3	SMA	16,904	150	19,205	188	20,648	517	15.290	364	16.819	400
4	SMK	12,073	64	13,590	60	14,145	63	10.013	90	11.014	99
	Jumlah	68,700	474	81,849	518	88,722	1,184	251.134	667	74.286	732

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2012

Pemerintah provinsi Sumatera Utara secara terus menerus berusaha untuk meningkatkan kualitas guru melalui program sertifikasi dan pemberian beasiswa untuk peningkatan jenjang pendidikan guru dari S0 ke S1 dan dari S1 ke jenjang S2. Dari data diatas terlihat peningkatan jumlah yang cukup signifikan sehingga dalam dua tahun terakhir (2008-2009) terjadi peningkatan kualifikasi guru berpendidikan S2 hampir 2,5 kali lipat (229%).

#### 2.1.3.1.2. Kesehatan

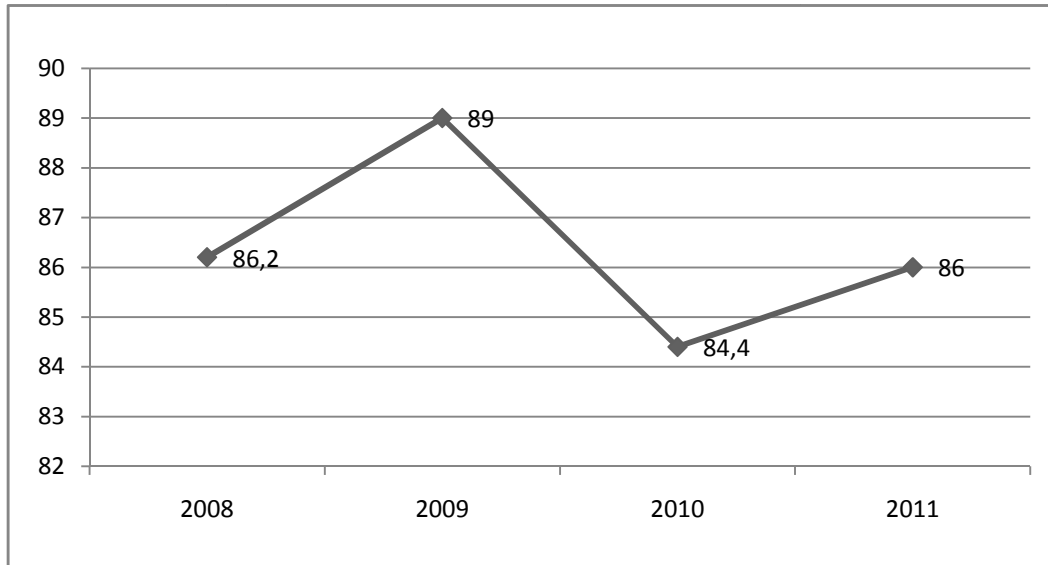
Sampai dengan saat ini belum ada peraturan yang mengatur tentang SPM bidang kesehatan tingkat provinsi. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, tidak semua indikator SPM bidang kesehatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut menjadi indikator dalam Renstra SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

Adapun indikator SPM yang menjadi indikator Kesehatan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

#### 1. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Cakupan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan selama kurun waktu 2008-2011 menunjukkan trend penurunan. Pada tahun 2009, cakupan indikator ini mampu mencapai 89% namun pada tahun 2010 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sekitar 5%. Pada tahun 2011, cakupan persalinan oleh nakes ini mampu ditingkatkan hanya sekitar 1,5%.

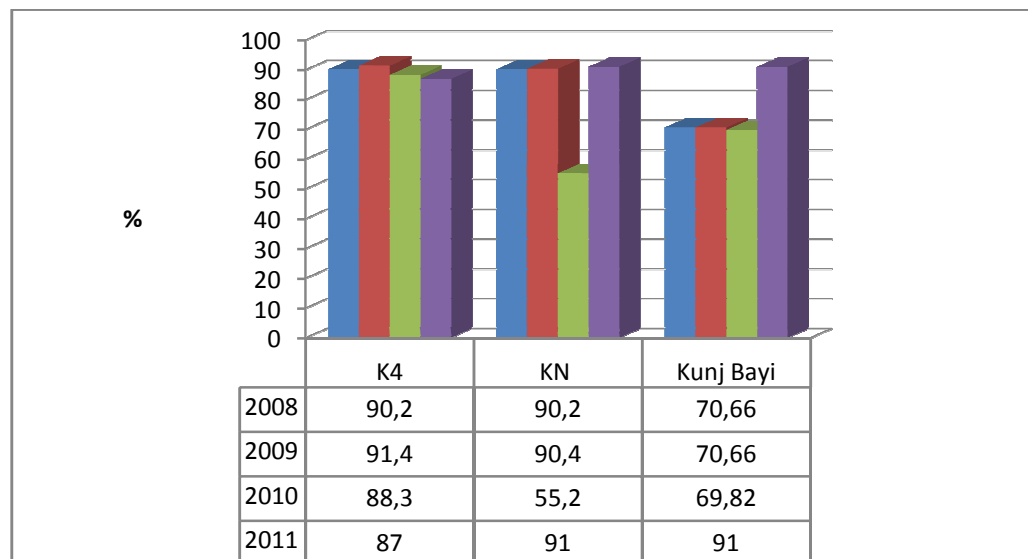


Grafik 2.4. Persentase Persalinan yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan Tahun 2008-2011  
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2012

Melihat fluktuatifnya pencapaian indikator ini selama kurun waktu 4 tahun terakhir, upaya pemantapan dan penguatan manajemen KIA sangat dibutuhkan ke depan, sehingga target renstra bidang kesehatan di Provinsi Sumatera Utara untuk indikator ini yaitu 89% pada tahun 2013 dan target Renstra Nasional sesuai Kepmenkes yaitu 90% pada tahun 2014 dapat dicapai.

## 2. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 dan kunjungan bayi

Dibandingkan dengan tahun 2010, pencapaian cakupan KN lengkap dan kunjungan bayi mengalami peningkatan pada tahun 2011, sebaliknya cakupan pelayanan antenatal care (K4) mengalami penurunan sebesar 1,3%, seperti yang tergambar pada grafik 4 berikut ini.



Grafik 2.5  
Persentase Antenatal Care (K4), Kunjungan Neonatus (KN Lengkap) dan Kunjungan Bayi Tahun 2008 - 2011

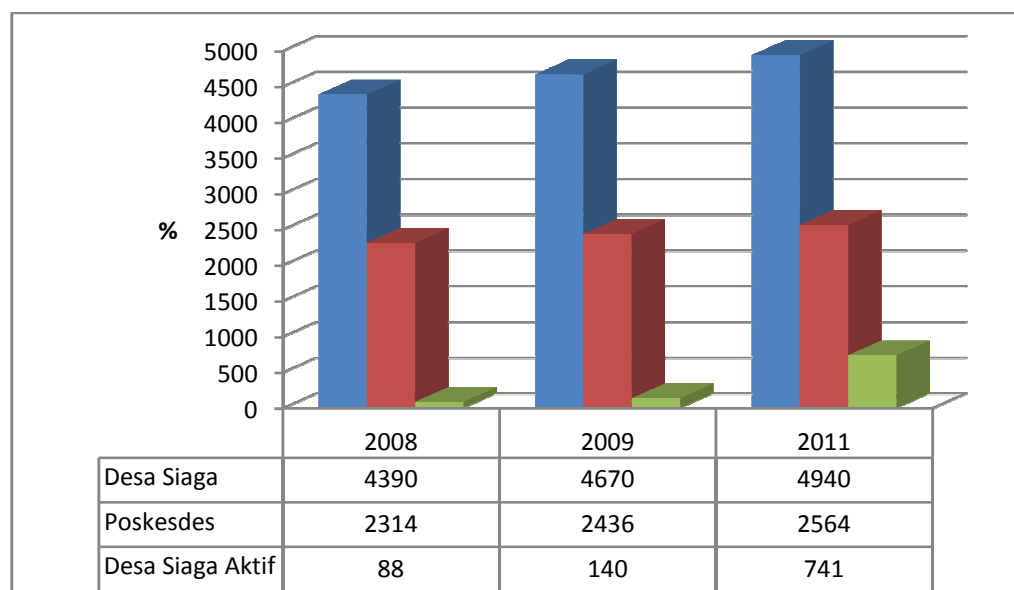
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2008-2011

Selama kurun waktu 2008-2011, cakupan K4 ibu hamil menunjukkan trend penurunan yaitu turun sekitar 3% dari 90,2% pada tahun 2008 menjadi 87% pada tahun 2011. Dilain pihak, cakupan KN lengkap dan kunjungan bayi menunjukkan kecenderungan stagnasi selama kurun waktu tersebut. Pada tahun 2008, cakupan KN lengkap yaitu 90,2% dan pada tahun 2011 menjadi 91% pada tahun 2011, bahkan pada tahun 2010 mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu lebih dari 35% dari pencapaian tahun 2009 yaitu 90,4%. Kunjungan bayi cenderung stagnan dengan pencapaian sekitar 70% dari tahun 2008 ke 2010 dan meningkat drastis lebih dari 30% ke tahun 2011 mencapai angka 91% dari sebelumnya 69,82% pada tahun 2010.

### 3. Cakupan desa siaga aktif

Jumlah Desa Siaga, poskesdes dan Desa Siaga Aktif mengalami peningkatan kurun waktu 2009-2011. Namun penambahan Desa Siaga tidak diikuti dengan pembangunan poskesdes, sehingga jumlah Desa Siaga yang ada lebih banyak dari jumlah poskesdes, seharusnya setiap Desa Siaga memiliki Poskesdes.

Pada tahun 2009-2010, Desa Siaga bertambah sebanyak 280 unit namun poskesdes hanya bertambah 122 unit. Pada tahun 2011, Desa Siaga bertambah 270 unit namun penambahan poskesdes hanya 128 unit. Kesenjangan dalam pembentukan Desa Siaga dan pembangunan poskesdes menyebabkan persentase Desa Siaga dengan poskesdes menurun dari 55% pada tahun 2010 menurun menjadi 52% pada tahun 2011.



Grafik 2.6.  
Jumlah Desa Siaga, Poskesdes dan Desa Siaga Aktif  
Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2011

Sumber: Laporan Bagian Kesekretariatan Tahun 2011

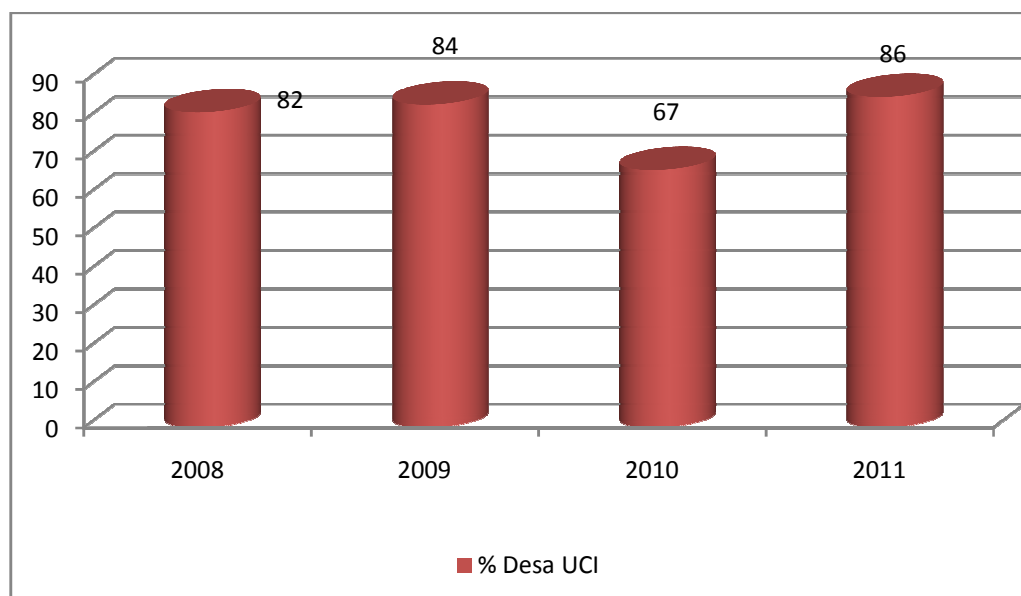
Di lain pihak, persentase Desa Siaga aktif meningkat secara tajam, yaitu dari 3% pada tahun 2010 menjadi 15% pada tahun 2011.

#### 4. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

Berdasarkan Survey Pemantauan Status Gizi (PSG) yang dilaksanakan pada tahun 2009 diketahui bahwa Prevalensi Balita dengan Gizi kurang adalah 16,2% dan Balita dengan Gizi Buruk yaitu 4,21%. Angka ini mengalami penurunan dengan data Survey PSG yang dilaksanakan tahun 2007, yaitu prevalensi balita dengan gizi kurang adalah 18,8% dan balita dengan gizi buruk yaitu 4,4%. Pada tahun 2011, jumlah balita gizi buruk yang ditemukan sebanyak 375 balita dan keseluruhan balita yang mengalami gizi buruk tersebut mendapatkan penanganan (100%).

#### 5. Desa/kelurahan Universal Child Immunization

Persentase desa yang mencapai UCI di Sumatera Utara mengalami fluktuatif 5 (lima) tahun terakhir mulai tahun 2005 sampai tahun 2010. Pada tahun 2005-2007, persentase desa UCI berada dibawah angka 80%.



**Grafik 2.7.**  
**Persentase Desa UCI di Provinsi Sumatera Utara**  
**Tahun 2008-2011**

*Sumber : Laporan Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan, 2011*

Pada tahun 2008-2009, persentase desa UCI diatas angka 80% sehingga mampu mencapai target nasional yaitu 80%. Namun, pada tahun 2010, mengalami penurunan yang sangat tajam lebih dari 15% sehingga menjadi 67%. Tahun 2011, persentase desa UCI dapat ditingkatkan mencapai hampir 20% menjadi 86%.

Fluktuatifnya pencapaian desa UCI ini menunjukkan masih belum mantapnya dalam manajemen program imunisasi di kabupaten/kota dan puskesmas, sehingga desa-desa UCI pada tahun sebelumnya tidak mampu dipertahankan untuk tahun depan. Perlu adanya penguatan manajemen program imunisasi sampai ke tempat pelayanan terkecil, sehingga mampu mencegah KLB PD3I di Sumatera Utara,

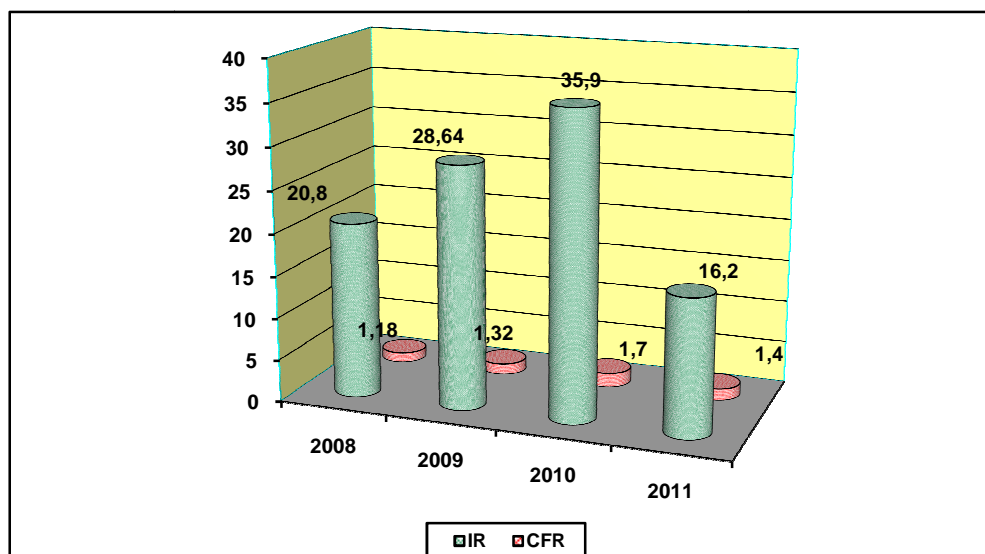
## 6. Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Pada tahun 2011, terjadi 36 kasus KLB dan 31 kasus diantaranya (85%) dilakukan Penyelidikan epidemiologi <24 jam. Pencapaian ini telah mampu mencapai target yang ditetapkan yaitu 85%, namun bila dibandingkan dengan tahun 2010, mengalami penurunan sebesar 5% dari 90%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelidikan epidemiologi <24 jam di wilayah KLB umumnya telah berjalan dengan baik, namun ada beberapa kab/kota yang masih terlambat dalam melaporkan kejadian KLB sehingga penyelidikan epidemiologi tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 24 jam setelah KLB terjadi.

Disamping indikator SPM bidang kesehatan, berikut ini dijelaskan kinerja pelayanan Kesehatan dalam mencapai indikator kinerja kunci (IKK), selain yang telah disebutkan diatas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah :

### 1. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Angka Kesakitan (IR) DBD di Provinsi Sumatera Utara cenderung mengalami peningkatan kurun waktu 2008-2010. Peningkatan IR DBD begitu tajam sekitar 9% setiap tahunnya. Pada tahun 2010, IR mencapai diatas 35% dengan jumlah penderita yang ditemukan sebanyak 8.889 orang. Pada tahun 2011, IR DBD turun secara drastis menjadi 16,2% dengan jumlah penderita sebanyak 5.545 orang. Namun, bila dibandingkan dengan target renstra Dinkes Provsu tahun 2011 yaitu 35/100.000 penduduk, maka hasil capaian tersebut belum mampu mencapai target yang ditetapkan, dan bila dibandingkan dengan target IR DBD Nasional yaitu <5/100.000 penduduk maka angka kesakitan DBD di Provinsi Sumatera Utara sangat tinggi.



Grafik 2.8.  
Angka Kesakitan (IR) dan Angka Kematian (CFR) DBD  
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 - 2011

Sumber : Laporan Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan, 2011

Di sisi lain angka CFR (Case Fatality Rate) DBD menunjukkan trend peningkatan sejak tahun 2008, dan pencapaian tertinggi pada tahun 2010 yaitu 1,7%. Pada tahun 2011, pencapaian CFR DBD sudah mampu diturunkan menjadi 1,4%, namun angka ini masih belum mampu mencapai target nasional yaitu <1%.

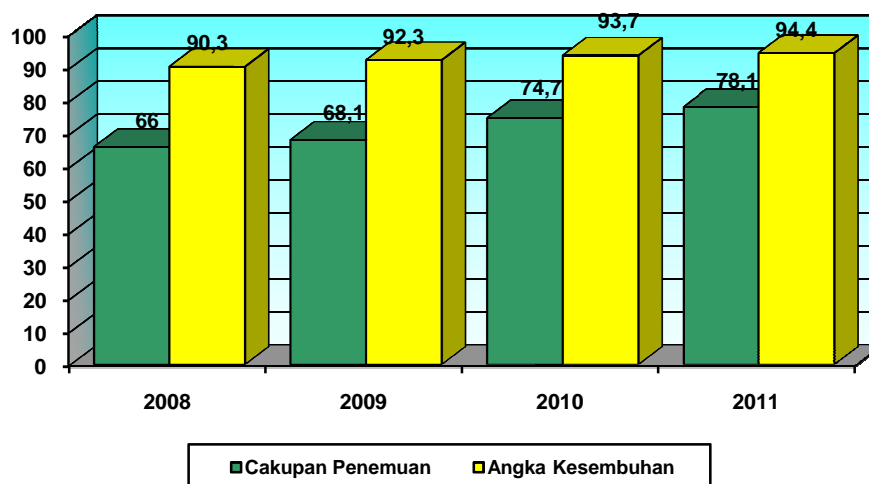


## 2. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

Angka CDR Penyakit TB atau Cakupan penemuan penderita TB Paru dilihat dari penemuan penderita TB Paru BTA+ yang berpotensi untuk terjadinya penularan di masyarakat. Pada tahun 2011, jumlah kasus BTA+ yang ditemukan yaitu 16.684 kasus atau 78,1% dari estimasi kasus BTA+ yaitu 21.374 kasus. Pencapaian ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2010 yaitu 74,7%, dan berada di atas target nasional yaitu 70%.

Cakupan penemuan penderita penyakit TB Paru BTA+ kurun waktu 2008-2011 dapat dilihat pada grafik 6 berikut ini.

Dari grafik terlihat bahwa cakupan penemuan penderita TB Paru BTA+ mengalami peningkatan selama kurun waktu 2008-2011. Dan sejak tahun 2010, pencapaian CDR telah mampu mencapai target nasional yaitu 70%. Hal ini sejalan juga dengan pencapaian angka keberhasilan pengobatan TB sejak tahun 2008 terus meningkat dan mampu mencapai angka di atas 90%, diatas target nasional yakni >85%.



Grafik 2.9  
Angka CDR (Cakupan Penemuan Penderita TB Paru BTA+) dan  
Angka Keberhasilan Pengobatan TB di Provinsi Sumatera Utara  
Tahun 2008-2011

Lebih lanjut mengenai pencapaian kinerja Bidang Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2011, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.25.**  
*Capaian Indikator Bidang Kesehatan sampai dengan tahun 2011*

No.	Indikator	Capaian
1.	Rasio posyandu per satuan balita	1:76,77
2.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	1:24.681
3.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	1:67.616
5.	Rasio dokter per 100.000 penduduk	1:17,64
6.	Rasio tenaga medis per 100.000 penduduk	1:29,69

7.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100%
8.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	86,73%
9.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	65,78%
10.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%
11.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100%
12.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%
13.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%
14.	Cakupan kunjungan bayi	76,82%
15.	Cakupan Puskesmas	1:24.681
16.	Cakupan pembantu puskesmas/jumlah penduduk	1:7.137

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2012

#### 2.1.3.1.3. Pekerjaan Umum

Beberapa capaian indikator bidang pekerjaan umum sampai dengan tahun 2011, adalah sebagai berikut :

- Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap : 48,19%
- Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) : 41,30 %
- Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi layanan optimal : 44.729 Ha atau 61 % dari luas total 73.326 Ha
- Rasio Elektrifikasi Desa 80,85%
- Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga 78%
- Cakupan pelayanan air minum 80%

#### 2.1.3.1.6. Perencanaan Pembangunan

Hasil capaian bidang perencanaan pembangunan, adalah sebagai berikut :

- Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025
- Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 - 2013
- Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah

#### 2.1.3.1.7. Perhubungan

Capaian Indikator bidang perhubungan antara lain adalah :

- Jumlah Pelabuhan Laut : 8 Pelabuhan
- Bandar Udara : 9 Bandara
- Terminal Bis : 40 buah
- Angkutan darat : 2.896.912 unit (tahun 2010)

#### 2.1.3.1.8. Lingkungan Hidup

Indikator lingkungan hidup antara lain dapat dilihat dari jumlah rumah tangga menurut lokasi tempat tinggal dan sumber air bersih/air minum dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

a. Jumlah Rumah Tangga menurut lokasi tempat tinggal

**Tabel 2.26.**  
Jumlah Rumah Tangga menurut Lokasi Tempat Tinggal  
Provinsi : Sumatera Utara, tahun 2010

No.	Lokasi Permukiman	Jumlah Rumah Tangga
1	Mewah	70,877
2	Menengah	1,994,137
3	Sederhana	1,748,940
4	Kumuh	58,905
5	Bantaran Sungai	243,408
6	Pasang Surut	350,328

Sumber : BPS Sumatera Utara, 2011

Dari data diatas dapat dilihat kondisi perumahan yang sangat beragam, mulai dari kondisi yang baik berupa perumahan mewah, menengah dan sederhana, hingga perumahan yang masih dalam kondisi kumuh dan sebagian masih berada di bantaran sungai dan area pasang surut. Kondisi ini menuntut penanganan lingkungan yang lebih baik dimasa depan.

b. Air Bersih

Kondisi penyediaan fasilitas air bersih bagi penduduk Sumatera Utara sampai dengan tahun 2011, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.27.**  
Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum  
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011

Sumber Air	Ledeng	Sumur	Sungai	Hujan	Mata Air	Kemasan	Lainnya
Total Rumah Tangga	653,076	1,079,909	109,599	-	332,581	371,388	365,636

Keterangan : Sumber air minum dari air hujan tidak disurvei pada Sensus Penduduk 2010

Sumber : Sensus Penduduk 2010, BPS Sumatera Utara

Berdasarkan pengamatan pada beberapa titik lokasi di Kota Medan menunjukkan kualitas air sungai Deli sudah mengalami penurunan (termasuk Kelas Air II), kecuali yang masih berada di daerah hulu (Deli Serdang), sedangkan kualitas air sungai Belawan masih tergolong baik (Kelas air I) terutama yang berada di daerah hulu dan tengah.

c. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL

Telah dilakukan Analisa AMDAL, khususnya pada perusahaan besar di Sumatera Utara, sebanyak 17 dokumen dalam bentuk DPL (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup), DPPL (Dokumen Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup), KA-ANDAL dan ANDAL/RKL-RPL dan UKL-UPL.

d. Penegakan hukum lingkungan

Penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan telah dilakukan melalui penanganan pengaduan masalah lingkungan, sebanyak 15 kasus pengaduan. Beberapa pengaduan terkait masalah pencemaran lingkungan telah diproses dengan melakukan verifikasi/klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.

#### 2.1.3.1.9. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian indikator pemberdayaan perempuan memperlihatkan terjadinya penurunan rasio kasus kekerasan dalam rumah tangga selama tahun 2007 hingga 2011. Sementara persentase partisipasi tenaga kerja perempuan sebesar 57%.

#### 2.1.3.1.10. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Indikator terkait dengan keluarga berencana dilihat dari rata-rata jumlah anak dalam keluarga menunjukkan penurunan dari 2,42 tahun 2007 menjadi 1,92 pada tahun 2008, namun pada tahun 2009 meningkat kembali menjadi 2,1 dan 2,07 pada tahun 2010. Hal ini perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan tekanan kepada pertumbuhan penduduk Sumatera Utara.

Disamping itu terjadi peningkatan jumlah keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera-I

#### 2.1.3.1.11. Sosial

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang terdapat pada beberapa Kabupaten/Kota, yang menampung anak-anak terlantar, gelandangan, cacat fisik, pengemis dan lanjut usia.

- PMKS yg memperoleh bantuan sosial

Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara terdiri dari beberapa jenis, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.28.**  
PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial

No	Jenis PMKS
1	Balita terlantar
2	Anak terlantar
3	Anak nakal
4	Anak jalanan
5	Anak jermal
6	Wanita rawan sosial ekonomi
7	Korban tindak kekerasan
8	Lanjut usia terlantar
9	Penyandang cacat
10	Tuna susila
11	Pengemis
12	Gelandangan
13	Bekas narapidana
14	Korban penyalahgunaan napza
15	Keluarga fakir miskin
16	Keluarga rumah tidak layak huni
17	Keluarga bermasalah sosial psikologis
18	Komunitas adat terpencil
19	Korban bencana alam
20	Korban bencana sosial / pengungsi
21	Pekerja migran bermasalah sosial
22	Orang dengan hiv aids (odha)
23	Keluarga rentan

### 2.1.3.1.12. Tenaga Kerja

**Tabel 2.29.**  
Rasio Ketergantungan Tahun 2007 s.d 2008  
Provinsi Sumatera Utara

No	Uraian	2007	2008
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	4,133,400	4,147,000
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	761,000	779,200
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	4,894,400	4,926,200
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	8,378,148	8,794,804
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	0.58	0.56

Dari data tahun 2007 dan 2008, terlihat adanya penurunan Rasio Ketergantungan dari penduduk usia tidak produktif dari 0,58 menjadi 0,56. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam struktur ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara, dimana jumlah penduduk usia produktif semakin bertambah.

### 2.1.3.1.13 . Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Perkembangan Koperasi di Sumatera Utara sampai Desember 2011 berjumlah 11.421 dengan 6.693 diantaranya adalah koperasi aktif dan 4.728 buah koperasi yang tidak aktif. Ratio Koperasi aktif sampai dengan tahun 2011 sebesar 58,60%.

Kabupaten yang tertinggi Ratio Koperasi aktif yakni Kabupaten Nias Utara sebesar 100%. Dan yang terendah adalah Kabupaten Toba Samosir sebesar 21,92%. (Lampiran 11 dan Lampiran 12)

Untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) terdapat sejumlah 191 unit KSP dengan jumlah anggota 101.727 orang dan nasabah ber jumlah 101.666 nasabah, dengan total aset berjumlah ± Rp. 264 milyar dan jumlah pinjaman sebesar ± Rp.224 milyar (Lampiran 13)

Selain Koperasi Simpan Pinjam, juga terdapat koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang berdasarkan Kabupaten/Kota sampai bulan Desember 2011 sebanyak 88 unit KJKS dengan jumlah anggota sebanya 4.365 orang dan jumlah nasabah sebanyak 14.572 orang dengan total aset ± Rp. 45 milyar (Lampiran 14).

Unit Simpan Pinjam (USP) sampai dengan tahun 2011, berjumlah 3.869 unit dengan jumlah anggota 613.201 orang dan nasabah berjumlah 553.885 nasabah. Total aset yang dikelola sejumlah Rp. 594, 69 Milyar dengan jumlah pinjaman ± Rp. 688 Milyar. (Lampiran 15). Sedangkan untuk unit jasa keuangan syariah berdasarkan Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara per Desember 2011 adalah sebanyak 135 unit dengan jumlah anggota 7.676 orang dan jumlah nasabah sebanyak 12.294 orang dan total aset sebesar ± Rp. 40 milyar (lampiran 16).

Jumlah UMKM di Provinsi Sumatera Utara terdapat Usaha Mikro sebesar 1.453.063 unit dan Usaha Kecil 698.665 unit. Sementara perusahaan menengah berjumlah 136.574 unit dan usaha berskala besar berjumlah 229.552 unit dengan jumlah penyerapan tenaga kerja secara keseluruhan sebesar 625.954 orang (Lampiran 17).

Selain itu terdapat 95 unit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang tersebar di berbagai Kabupaten/Kota.

### 2.1.3.1.14. Penanaman Modal Daerah

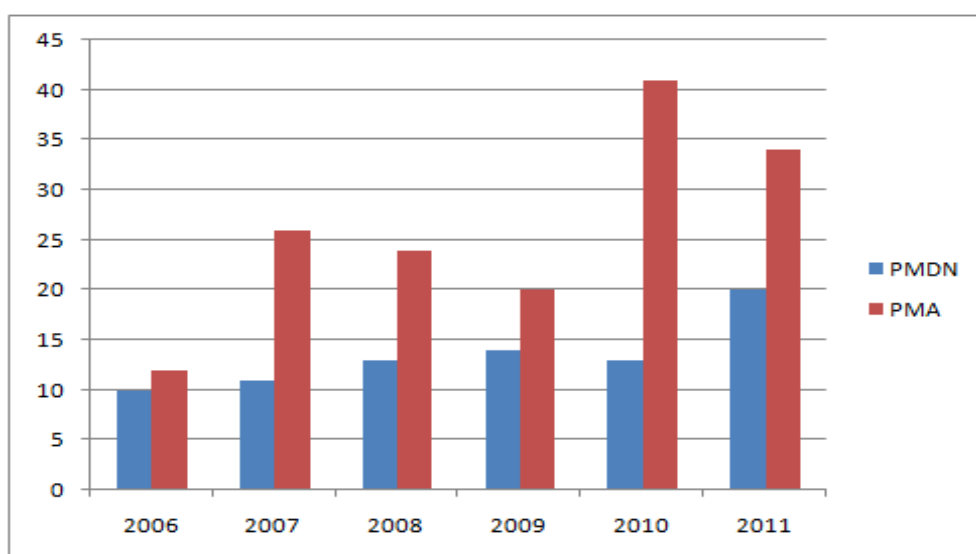
- a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) dan nilai investasinya

Untuk menjelaskan jumlah investor yang telah menanamkan modalnya di Sumatera Utara untuk tahun 2007-2011 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.30.**  
Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2007 – 2011  
Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2007	Jumlah Investor	11	26	37
2008	Jumlah Investor	13	24	37
2009	Jumlah Investor	14	20	34
2010	Jumlah Investor	13	9	22
2011	Jumlah Investor	20	34	54
J U M L A H		81	157	238

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal Provsu



Gambar 2.10. Grafik Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2007 – 2011  
Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel dan grafik diatas terlihat penurunan jumlah investor PMA maupun PMDN. Hal ini disebabkan karena krisis global yang melanda dunia, sehingga jumlah investor mengalami penurunan. Jumlah investor PMDN pada tahun 2011 memang mengalami peningkatan dari tahun 2010 sebesar 53,8%, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami penurunan sebesar 17,07%.

b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Perkembangan jumlah proyek dan nilai investasi baik yang masih dalam tahap persetujuan maupun yang sudah direalisasi di Sumatera Utara untuk tahun 2007-2011 dapat dilihat pada tabel berikut.

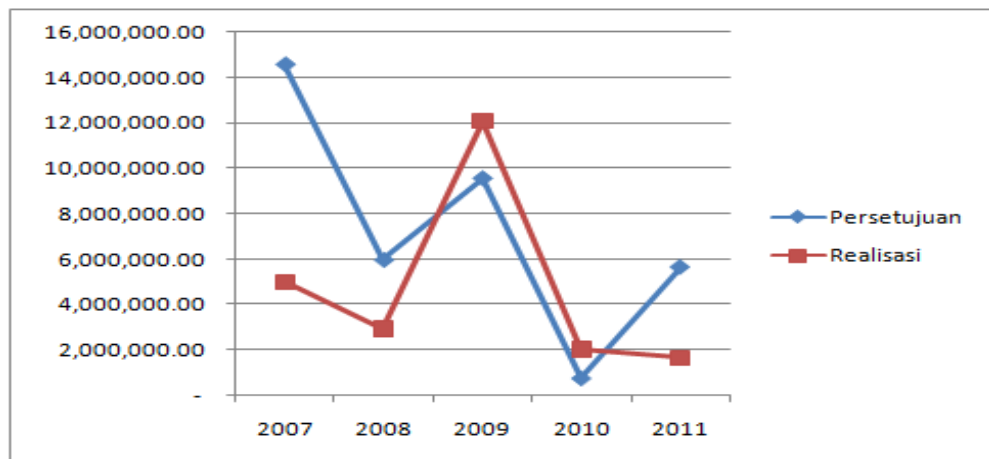
**Tabel 2.31.**  
Jumlah dan Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2007 – 2011

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2007	55	14.552.627,03	37	4.974.968,63
2008	71	5.950.695,75	37	2.943.093,92

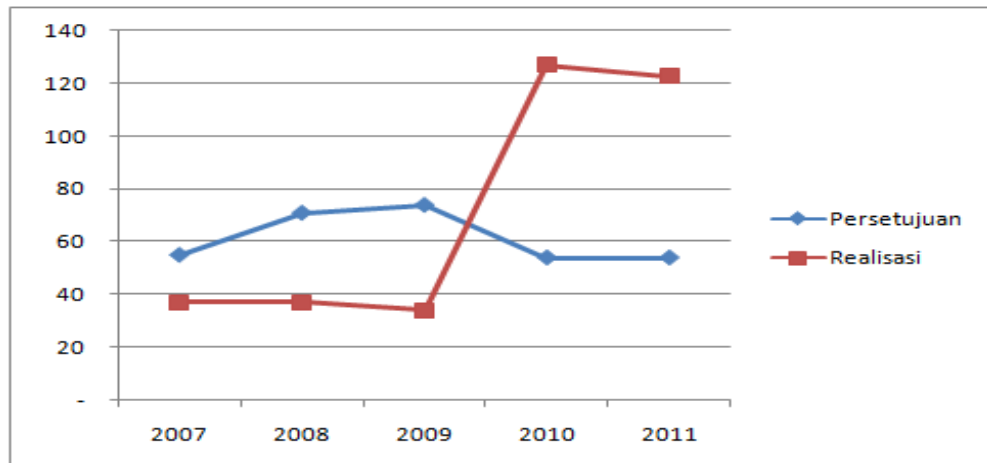
2009	74	9.546.173,77	34	12.047.929,86
2010	54	747.349,91	127	2.024.885,56
2011	54	5.644.561,01	123	1.662.522,50
Total	254	30.796.846,46	235	21.990.877,97

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu.

Perkembangan penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), terus mengalami pasang surut dalam lima tahun belakangan ini, baik dilihat dari jumlah proyek maupun jumlah dana yang terealisasi. Hanya pada tahun 2009 terjadi sedikit peningkatan nilai investasi yang terealisasi dan kemudian menurun kembali pada tahun 2010 dan 2011.



Gambar 2.11. Grafik Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2007 - 2011 Provinsi Sumatera Utara



Gambar 2.12. Grafik Jumlah Investasi Proyek PMDN/PMA Tahun 2007 - 2011 Provinsi Sumatera Utara

b. Rasio daya serap tenaga kerja

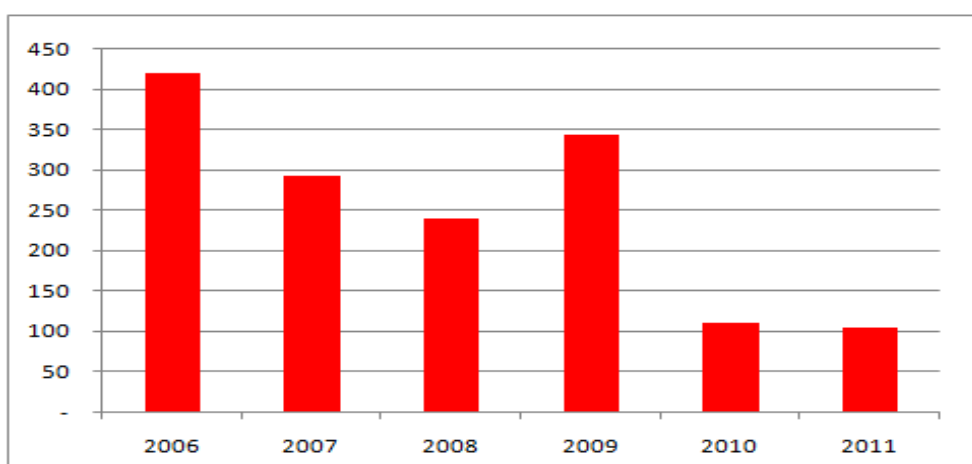
Rasio daya serap tenaga kerja Perusahaan Modal Asing (PMA) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



**Tabel 2.32.**  
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (PMA)  
Tahun 2007 – 2011 Provinsi Sumatera Utara

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah Tenaga Kerja yg Bekerja pada Perusahaan PMA/PMDN	10.801	8.839	11.672	13.995	12.826
2	Jumlah Seluruh PMA/PMDN	37	37	34	127	123
3	Ratio Daya Serap Tenaga Kerja	420	292	239	110	104

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu



Gambar 2.13. Grafik Rasio Daya Serap Tenaga Kerja PMA selama 2006-2010

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio daya serap tenaga kerja dari tahun 2006 mengalami penurunan yang signifikan, dimana pada tahun 2006 sebesar 419,50 menjadi 291,92 atau sebesar 30.41%. Dan pada tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 343,89 dari 238,89 ditahun 2008 atau sebesar 43.70% tetapi kembali turun di tahun 2010 menjadi 110 dan tahun 2011 menjadi 104. Hal ini disebabkan sebagian investasi bukan berada disektor riil ditambah lagi dengan penggunaan teknologi yang mendominasi investasi hal ini mengakibatkan orientasi penyediaan lapangan kerja adalah padat modal bukan padat karya.

#### 2.1.3.1.15. Kebudayaan

##### a. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Sumatera Utara adalah salah satu daerah yang memiliki kekayaan dan keanekaragaman budaya yang sangat menarik, hal ini dapat dilihat dari suku/ etnis yang tinggal di Sumatera Utara. Ada 8 (delapan) suku /etnis asli di Sumatera Utara, yaitu : Melayu, Batak Karo, Batak Toba, Mandailing, Batak Phakpak Dairi, Simalungun, Batak Angkola dan Nias. Selain itu terdapat juga beberapa suku/etnis pendatang antara lain adalah suku Jawa, Minangkabau, Cina dan Aceh. Untuk melestarikan keragaman budaya serta menjaga kerukunan antar suku / etnis, diselenggarakan berbagai macam festival seni budaya, antara lain yaitu :

- Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) yang dilaksanakan rutin 1 tahun sekali.
- Pesta Danau Toba. Diselenggarakan setahun sekali di Kota Parapat.
- Festival Mejuah-juah . Diselenggarakan setahun sekali.
- SUMUT Gempar. Diselenggarakan rutin setahun sekali dan telah memperoleh rekor MURI.

- Pameran Warisan Budaya Islam.
  - Festival Budaya Melayu.
  - Pawai Budaya Hut RI.
- b. Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya.
- Sarana dan Prasarana adalah salah satu hal penting dalam pengembangan maupun pelestarian seni dan budaya. Provinsi Sumatera Utara memiliki beberapa gedung (sarana) untuk penyelenggaraan kegiatan Seni dan Budaya, yaitu : Tapian Daya PRSU sebagai tempat penyelenggaraan Pekan Raya Sumatera, Museum Taman Budaya dan Museum Negeri.
- c. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
- Selain memiliki kawasan wisata alam yg memukau, Sumatera Utara juga memiliki kekayaan budaya yang perlu dilestarikan. Benda, Situs budaya yang perlu dilestarikan antara lain yaitu :
- Candi Portibi di Kabupaten Padang Lawas Utara.
  - Candi Bahal di Kabupaten Padang Lawas Utara
  - Istana Maimun di Kota medan.
  - Masjid Raya Medan.
  - Budaya Loncat batu di Kabupaten Nias.
  - Salib Kasih di Kabupaten Tapanuli Utara.

#### 2.1.3.1.16. Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya aman.

##### 1. Regulasi Ketahanan Pangan

Menyangkut regulasi yang berkaitan dengan ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Utara telah diterbitkan peraturan perundang-undangan yakni :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006 Nomor 14 Seri G)
- b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 25 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan dan Swasembada Pangan.

##### 2. Ketersediaan Pangan Utama

**Tabel 2.33.**

Ketersediaan Pangan Utama (Beras, Jagung, Kedele, Daging, Susu Dan Telur)

No.	URAIAN	Tahun				
		Target 2010	Realisasi 2010	Target 2011	Realisasi 2011	Pencapaian Target (%)
1.	Padi					
	Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/Tahun (Kg)	133,46	136,85	132,79	134	100,91
	Kebutuhan Konsumsi per Tahun (Ton)	1.769.543	1.807.509	1.782.837	1.755.881,86	98,49
	Ketersediaan Beras untuk dikonsumsi*)	2.063.335	2.040.924	2.111.039	2.042.665,05	96,79
2.	Jagung					
	Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/Tahun (Kg)	61,370	61,73	61.492		
	Kebutuhan (Konsumsi+Industri) per Tahun (Ton)	813.728	864.515	825.609		

	Produksi Jagung (Ton)	986.390	1.428.813	195.540	1.294.645	126,91
3.	Kedele					
	Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/ Tahun (Kg)	4.443	4.450	4.447		
	Kebutuhan (Konsumsi+Industri) per Tahun (Ton)	58.910	79.380	59.710		
	Produksi Kedele(Ton)	34.545	10.260	40.337	11.413	26,29
4.	Daging					
	Kebutuhan Konsumsi/Kapita/ Tahun (Kg)	10,30	9,85	10,26	10,00	97,50
	Kebutuhan Konsumsi per-tahun (Ton)	136,572,159.9	127,902,988.7	137,752,586.2	131,292,090.0	95,31
	Produksi Daging yang diharapkan (Ton)	14.192,03	15.707,60	16.351,61	16.065,73	98,25

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara, 2012  
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara, 2012

### 3. Kondisi Rawan Pangan

Kondisi sangat rawan pangan diukur dari konsumsi energi <1.400 Kkal/hari. Provinsi Sumatera Utara hingga saat ini masih menghadapi kondisi rawan pangan. Dari data Susenas tahun 2009, diketahui bahwa angka proporsi penduduk sangat rawan pangan di Provinsi Sumatera Utara sebesar 14,48% atau masih berada diatas angka rata-rata nasional sebesar 14,47%.

#### 2.1.3.1.17. Perpustakaan dan Kearsipan

##### a. Jumlah perpustakaan

Berikut ini adalah Perpustakaan yang telah dibina Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provsu adalah sebagai berikut :

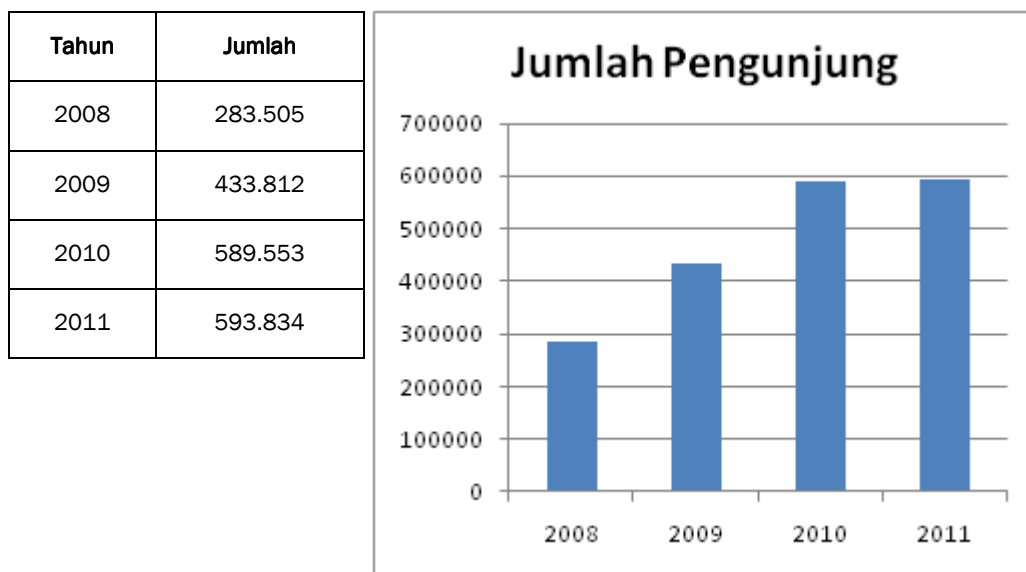
**Tabel 2.34.**  
Jumlah Perpustakaan Provinsi Sumatera Utara

No.	Jenis Perpustakaan	Jumlah
1.	Perpustakaan Umum	
	- Kabupaten/Kota	33 Kabupaten/Kota
	- Kecamatan	40 Kecamatan
	- Desa/Kelurahan	1.201 Desa/Kelurahan
2.	Perpustakaan Khusus	83 Instansi
3.	Perpustakaan Sekolah Madrasah	144 Sekolah
4.	Perpustakaan Perguruan Tinggi	8 Perguruan Tinggi
5.	Perpustakaan Masyarakat =	82 Perpustakaan Masyarakat
6.	Perpustakaan Rumah Ibadah	
	- Perpustakaan Masjid	35 Masjid
	- Perpustakaan Gereja	27 Gereja

Sumber : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Utara, 2012

b. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Berikut ini adalah grafik tingkat kunjungan Pemustaka tiap tahunnya ke Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara :



Gambar 2.14. Jumlah pengunjung perpustakaan per-tahun

c. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

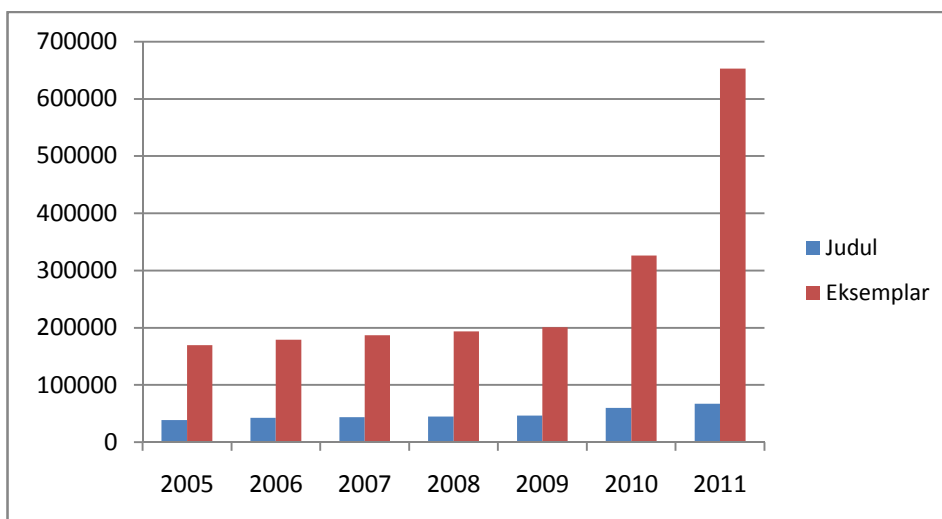
Berikut ini adalah grafik koleksi buku yang ada di Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara :

**Tabel 2.35.**

Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan  
Provinsi Sumatera Utara

TAHUN	JUDUL	EKSEMPLAR
2005	38.885	169.328
2006	42.485	179.059
2007	43.562	187.170
2008	44.936	193.587
2009	46.433	201.067
2010	59.855	326.170
2011	67.084	652.780

Grafik perkembangan jumlah dan Judul Buku dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.15. Grafik perkembangan jumlah dan judul buku

d. Kearsipan

Pengelolaan Arsip adalah proses pengendalian arsip secara efisien, efektif dan sistematis. Pengelolaan Arsip yang telah dilaksanakan di Bidang Arsip Daerah pada tahun 2010 dan 2011 adalah pengelolaan arsip dinamis aktif dan statis.

Proses/ sistem pengelolaan arsip secara baku di Bidang Arsip Daerah :

1. Mengumpulkan/ menerima arsip in aktif dan statis dari SKPD dilingkungan Pemprovsu.
2. Melakukan pemilahan arsip.
3. Melakukan pencatatan atau pendeskripsian arsip.
4. Melakukan manuver kartu deskripsi dan fisik arsip.
5. Melakukan penomoran arsip.
6. Membungkus arsip.
7. Membuat DPAS.
8. Menyimpan arsip ke dalam boks.
9. Memberikan nomor boks arsip.
10. Menyimpan boks arsip ke dalam Roll O'Pack.
11. Memasukkan data arsip statis ke dalam jaringan.

**Tabel 2.36.**

Jumlah Arsip Statis yang dikelola Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Utara

**Arsip Statis**

No.	Masalah	Tahun			
		2010		2011	
		Arsip	Boks	Arsip	Boks
1.	Biro Otonomi Daerah	16	3	-	-
2.	Biro Organisasi dan Tata Laksana	6	2	-	-
3.	Dinas Kesejahteraan dan Sosila	25	2	-	-
4.	Dinas PU Jalan dan Jembatan	169	15	140	35
5.	K P U	25	2	50	15
6.	Biro Umum Sekda Provsu			7	1
7.	Kab. Nias Selatan	19	3	-	-
8.	Kab. Pakpak Bharat	66	4	-	-
9.	Kab. Tapanuli Tengah			1	1
10.	Kab. Batu Bara			134	33
<b>Jumlah</b>		<b>326</b>	<b>31</b>	<b>332</b>	<b>85</b>

### Arsip In Aktif

No.	Masalah	Tahun				Ket.
		2010		2011		
		Arsip	Boks	Arsip	Boks	
1.	Dinas PU Jalan dan Jembatan	1.815	258	2.984	457	
2.	Dinas Koperasi dan UKM	-	-	1.980	400	
<b>Jumlah</b>		<b>1.815</b>	<b>258</b>	<b>4.964</b>	<b>857</b>	

### Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

No.	Kegiatan	Tahun			Jumlah
		2009	2010	2011	
1.	Penyuluhan dan Implementasi Tata Naskah dan Kearsipan sesuai Undang-Undang Kearsipan	30	35	40	105
2.	Diseminasi Fungsi dan Pelestarian Arsip/ Dokumen Perusahaan	40	40	40	120
3.	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM Aparatur Pemerintah di Bidang Kearsipan	20	20	14	54
4.	Bintek Pengelola Arsip Desa/ Kelurahan se-Sumatera Utara	300	300	-	600
5.	Arsiparis Teladan se-Sumatera Utara	-	-	45	45
6.	Koordinasi Pengembangan Kearsipan Kabupaten/ Kota	70	-	33	103
7.	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	-	-	80	80
8.	Pertemuan Asosiasi Arsiparis Indonesia Provinsi Sumatera Utara	-	-	45	45
9.	Diklat Teknis Pengelola Arsip bagi Sekretaris Desa/ Kelurahan	30	40	45	115
10.	Bimbingan Teknis Kearsipan	100	-	60	160
<b>Jumlah</b>		<b>590</b>	<b>435</b>	<b>388</b>	<b>1427</b>

Sumber : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Utara, 2012

#### 2.1.3.1.18. Komunikasi dan Informatika

Capaian kinerja bidang komunikasi dan informatika di Provinsi Sumatera Utara yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara antara lain adalah :

- Telah terbangunnya sistem jaringan informasi melalui LAN (Local Area Network), FO (Fiber Optic), RADIO LINK, WIRELESS, VPN-IP (Intranet).
- Terdapat 5 Surat Kabar Harian (SKH) Nasional ada yang tercatat/terpantau, yaitu : 1. Kompas, 2. Tempo, 3. Sindo, 4. Republika dan 5. Koran Jakarta.
- Surat Kabar Harian (SKH) lokal yang tercatat/terpantau ada 34 SKH yaitu : 1. Analisa 2. Andalas 3. Berita Sore 4. Harian Bersama 5. Warta Garuda 6. Harian Global 7. Harian Mandiri 8. Medan Bisnis 9. Medan Pos 10. Mimbar Umum 11. Perjuangan 12. Portibi 13. Posmetro Medan 14. Realitas 15. Sinar Indonesia Baru (SIB) 16. Suara Rakyat Medan 17. Sumatera 18. Sumut Pos 19. Warta Kita 20. Waspada 21. Gebrak 22. Batak Pos 23. Tribun Medan 24. Jurnal Medan 25. Berita Medan 26. Bintang Sumatera 27. Gaya Medan 28. Koran Medan 29. Medan Ekspos 30. Suara Sumut 31. Harian Koreksi 32. Skala Indonesia 33. Pos Kota Sumatera dan 34. Orbit
- Surat Kabar Mingguan yang tercatat/terpantau ada 16 surat kabar yaitu : 1. Aktual 2. Radar 3. Suara Buruh 4. Aplaus 5. Barisan Baru 6. Independen Sangkakala 7. Indonesia Baru 8. Indonesiaku 9. Koran Politik DOR 10. Koran Sepak Bola GOL 11. Media Fakta 12. News Investigasi Indonesia 13. Senior 14. Suara Rakyat 15. Taruna Mandiri dan 16. Suara Masa

- Jumlah Penyiaran Radio di Sumatera Utara :
- Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Jasa Penyiaran Radio terdiri dari :
  - RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli
  - Radio Pemerintah Deli Serdang
  - Radio Pemerintah Serdang Bedagai
  - Radio Pemerintah Kota Siantar
  - Radio Pemerintah Tapanuli Tengah
  - Radio Pemerintah Pakpak Bharat
  - Radio Siaran Publik Daerah Labuhan Batu

Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Jasa Penyiaran Radio sebanyak 145 stasiun radio  
 Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) Jasa Penyiaran Radio sebanyak 15 stasiun radio  
 Jumlah Penyiaran Televisi di Sumatera Utara :

Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Jasa Penyiaran Televisi ada 2 diantaranya :

- TVRI
- TV Karo

Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Jasa Penyiaran Televisi ada 23 lembaga  
 Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) Jasa Penyiaran Televisi ada 7 lembaga

- Website milik Pemerintah Daerah :
  - Web Pemprov : 1
  - Web SKPD yang aktif ada 15 web
- Pameran/Expo di Pekan Raya Sumatera Utara dilaksanakan secara rutin setiap tahun
- Jumlah Tower (menara telekomunikasi) yang direkomendasi : 1003 unit

## 2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

### 2.1.3.2.1. Pertanian

#### a. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya

##### 1) Padi

Luas tanam, luas panen, produktivitas, produksi serta kebutuhan beras untuk memantapkan swasembada beras di provinsi sumatera utara

**Tabel 2.37.**

Tabel Luas tanam, luas panen, produktivitas, produksi serta kebutuhan beras Provinsi Sumatera Utara

No.	URAIAN	Tahun				Pencapaian Target (%) Tahun 2011
		Target 2010	Realisasi 2010	Target 2011	Realisasi 2011*	
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	13,259,433	12,985,075	13,426,178	13,103,596	97.60
2	Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/Tahun (Kg)	133.46	136.85	132.79	134.00	100.91
3	Kebutuhan Konsumsi per Tahun (Ton)	1,769,543	1,777,008	1,782,837	1,755,881.86	98.49
4	Ketersediaan Beras untuk dikonsumsi**)	2,063,335	2,028,658	2,111,039	2,042,665.05	96.76
5	Surplus/Penyangga per Tahun (Ton) (4-3)	293,792	251,650	328,202	286,783	87.38
6	Produksi GKG (Ton)	3,643,183	3,582,302	3,727,413	3,607,036	96.77
7	Luas Panen (Ha)	829,536	754,674	841,980	757,428	89.96
8	Produktivitas (Kw/Ha)	43.92	47.47	44.27	47.62	107.57
9	Luas Tanam (Ha)	846,466	752,019	859,163	720,097	83.81

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan konsumsi beras/kapita sebesar 2,5%, sehingga tujuan untuk pengurangan konsumsi perkapita belum tercapai. Terlihat bahwa Provinsi Sumatera Utara belum berhasil menerapkan diversifikasi pangan. Sementara target ketersediaan beras untuk dikonsumsi, surplus/penyangga per-



tahun, produksi GKG, luas panen dan luas tanam terus mengalami peningkatan, namun jika dibandingkan dengan target di RPJMD belum mencapai seperti yang diharapkan.

Dari data penanaman padi nasional tahun 2009 diperoleh data dari Luas Panen Nasional mencapai 12.668.989 Ha maka rata-rata kontribusi luas panen padi Sumatera Utara terhadap Nasional adalah 6.25 %, sedangkan Produksi Nasional sampai tahun 2009 mencapai 62.561.146 ton, sehingga rata-rata kontribusi produksi padi Sumatera Utara terhadap Nasional sebesar : 5.74 %.

Namun data rata-rata produktivitas padi di Sumatera Utara selama lima tahun : 4.35 ton/ha, masih dibawah produktifitas nasional apalagi dibandingkan dengan Jawa. Kemudian Dilihat dari Perbandingan antara Luas Panen dan Luas Sawah, Indeks Penanaman (IP) masih di bawah 2 artinya masih ada lahan sawah yang hanya ditanami 1 kali setahun. Hal ini diakibatkan irigasi yang belum berfungsi secara maksimal.

## 2) Jagung

**Tabel 2.38.**

*Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas, Produksi serta Kebutuhan Jagung Untuk Memantapkan Swasembada Jagung Di Provinsi Sumatera Utara*

No.	URAIAN	Tahun				Pencapaian Target (%) Tahun 2011
		Target 2010	Realisasi 2010	Target 2011	Realisasi 2011	
1.	Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/Tahun (Kg)	61,370	61,730	61.492		
2.	Kebutuhan (Konsumsi+Industri) per Tahun (Ton)	813.728	864.515	825.609		
3.	Surplus/Penyangga per Tahun (Ton)	172.662	564.298	194.540		
4.	Produksi Jagung (Ton)	986.390	1.377.718	1.020.149	1.294.645	126,91
5.	Luas Panen (Ha)	267.934	274.822	274.632	255.291	92,96
6.	Produktivitas (Kw/Ha)	36,81	50,13	37,15	50,71	136,50
7.	Luas Tanam (Ha)	273.402	272.776	280.237	262.079	93,52

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara, 2012

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa produksi jagung, surplus/penyangga per-tahun dan produktifitas terus mengalami peningkatan, namun konsumsi jagung per-kapita masih belum memenuhi target jika dibandingkan dengan target pada RPJMD.

## 3) Kedele

**Tabel 2.39.**

*Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas,Produksi Serta Kebutuhan Kedele Untuk Memantapkan Swasembada Kedele Di Provinsi Sumatera Utara*

No.	URAIAN	Tahun				Pencapaian Target (%) Tahun 2011
		Target 2010	Realisasi 2010	Target 2011	Realisasi 2011	
1.	Kebutuhan Konsumsi/Kapita/ Tahun (Kg)	4.443	4.450	4.447		
2.	Kebutuhan (Konsumsi+Industri) per Tahun (Ton)	58.910	79.380	59.710		
3.	Impor/Surplus per Tahun (Ton) *	(24,37)	(69,12)	(19,379)		
4.	Produksi Kedele (Ton)	34.545	9.439	40.337	11.426	28,33
5.	Luas Panen (Ha)	29.400	7.803	34.300	11.413	33,27
6.	Produktivitas (Kw/Ha)	11,75	12,10	11,76	10,01	85,12
7.	Luas Tanam (Ha)	30.000	7.758	35.000		

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara, 2012

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa konsumsi perkapita mengalami peningkatan begitu juga dengan kebutuhan pertahun dimana sebagian besar untuk industri makanan. Terjadi penambahan impor selama tahun 2011 sebesar 44.755 ton (meningkat hampir 3 kali lipat). Sedangkan produksi mengalami penurunan yang diakibatkan tidak tercapainya target penanaman dan luas panen, walaupun terjadi peningkatan produktivitas sebesar 4%. Peningkatan produksi kedele diharapkan dapat dilakukan dengan peningkatan penggunaan teknologi dan penanaman bibit unggul yang sesuai dengan potensi daerah.

#### 4). Tanaman Perkebunan

Luas areal tanaman perkebunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2011, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.40**

Luas Areal Perkebunan di Provinsi Sumatera Utara menurut jenis komoditi dan pengusaha

No.	Jenis Komoditas	Perkebunan Rakyat	PTPN	PBSN	PBSA	Total Luas (Ha)
		Luas (Ha)	Luas (Ha)	Luas (Ha)	Luas (Ha)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kelapa sawit	405.330	311.267	252.730	112.541	1.081.870
2.	Karet	383.978	93.567	65.880	40.123	583.549
3.	Kelapa	109.587	-	1.188	1.831	112.606
4.	Kakao	59.676	11.503	3.919	812	75.910
5.	Lainnya	136.757	7.648	351	1.061	145.467
	Jumlah	1.095.329	423.986	324.779	155.307	1.999.403

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, 2012

Tabel 2.41.

**Produksi komoditas perkebunan Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2011**

No.	Jenis Komoditas	Perkebunan Rakyat	PTPN	PBSN	PBSA	Total Produksi (Ton)
		Produksi (Ton)	Produksi (Ton)	Produksi (Ton)	Produksi (Ton)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kelapa Sawit	5.327.323	5.224.285	3.392.478	1.782.000	15.726.087
2.	Karet	304.617	69.213	84.230	52.210	510.270
3.	Kelapa	85.278	-	1.607	1.277	88.163
4.	Kakao	34.700	23.070	4.556	2.932	65.258
5.	Lainnya	100.050	-	55.841	-	157.145
	Jumlah	5.851.971	5.372.409	3.484.123	1.838.419	16.546.923

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, 2012

##### a. Kelapa Sawit

Secara umum kondisi perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Utara cukup berkembang dengan baik, hal ini terbukti dengan terus bertambahnya areal perkebunan baik milik perkebunan rakyat, swasta asing maupun nasional dan perkebunan negara (PTPN) yang di Sumatera Utara saat ini terdapat 3 BUMN Perkebunan yakni PTPN II, III dan IV.

Berikut ini akan disajikan data luas tanaman dan produksi kelapa sawit dari tahun 2007-2011 yang diperoleh dari data Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara

Tabel 2.42.  
Luas Areal Tanaman dan Produksi Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Pengelolaan dari Tahun 2007-2011

Pengelola	2007		2008		2009		2010		2011	
	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)
Perkebunan rakyat	367.714	4.647.609	379.853	5.070.760	392.721	5.088.579	396.564	5.221.132	405.330	5.327.323
PTPN	287.022	4.303.313	294.943	4.422.338	299.604	4.668.827	305.435	4.823.524	311.267	5.224.285
Perkebunan Besar Swasta Nasional	238.362	3.674.045	237.462	3.064.211	244.283	3.075.401	251.489	3.107.385	252.730	3.392.478
Perkebunan Besar Swasta Asing	107.152	1.474.121	106.948	1.527.575	109.105	1.529.848	112.323	1.545.758	112.541	1.782.000
Total	1.000.258	14.099.089	1.019.207	14.084.886	1.045.713	14.362.654	1.065.813	14.697.800	1.081.870	15.726.087

Sumber : Statistik Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2007-2011

Berdasarkan data yang disajikan diatas, diperoleh gambaran bahwa terjadi fluktuasi dari perkembangan areal dan produksi perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Utara.

Dari data diatas secara umum terjadi peningkatan luas areal perkebunan. Perkembangan luas areal perkebunan sawit yang dikelola oleh rakyat mengalami peningkatan dari 367.714 hektar tahun 2007 menjadi 405.330 hektar tahun 2011 (naik sebesar 10,23%), PTPN juga mengalami peningkatan dari 287.022 hektar pada tahun 2007 menjadi 311.627 hektar pada tahun 2011 (naik sebesar 8,45%), Perkebunan Besar Swasta Nasional dari 238.362 hektar pada tahun 2007 menjadi 252.730 hektar pada tahun 2011 (naik sebesar 6,03%) dan Perkebunan Besar Swasta Asing meningkat dari 107.152 hektar pada tahun 2007 menjadi 112.541 hektar pada tahun 2011 (naik sebesar 5,03%). Dari tabel 2.46 juga dapat dilihat secara umum produksi Kelapa Sawit berupa Tandan Buah Segar (TBS) juga mengalami peningkatan baik Perkebunan Rakyat, PTPN, Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) dan Perkebunan Besar Swasta Asing (PBSA) dari tahun 2007 sampai 2011. Dari data tahun 2010 sampai 2011, peningkatan produksi untuk Perkebunan Rakyat sebesar 2,03%, PTPN sebesar 8,30%, PBSN sebesar 9,17% dan PBSA sebesar 15,28%.

## 2) Karet

Secara umum kondisi perkebunan karet di Provinsi Sumatera Utara cukup relatif berkembang dengan baik walaupun terjadi pengurangan areal, hal ini terjadi umumnya di areal, swasta asing maupun nasional dan perkebunan negara (PTPN) sementara untuk perkebunan karet rakyat terjadi peningkatan luas areal.

Berikut ini akan disajikan data luas tanaman dan produksi komoditi karet dari tahun 2007-2011 yang diperoleh dari data Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara.

*Tabel 2.43.  
Luas Areal Tanaman dan Produksi Komoditi Karet di Provinsi Sumatera Utara  
Berdasarkan Pengelolaan dari Tahun 2007-2011*

Pengelola	2007		2008		2009		2010		2011	
	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)
Perkebunan rakyat	362.687	233.793	363.158	244.404	376.076	254.650	376.335	261.249	383.978	304.617
PTPN	56.334	54.527	53.986	53.881	77.697	59.072	85.632	61.019	93.567	69.213
Perkebunan Besar Swasta Nasional	60.976	69.825	60.598	70.380	59.314	70.444	64.053	75.530	65.880	84.230
Perkebunan Besar Swasta Asing	35.738	44.827	34.875	43.633	37.456	43.794	39.824	46.455	40.123	52.210
<b>Total</b>	<b>515.736</b>	<b>402.972</b>	<b>512.619</b>	<b>412.299</b>	<b>550.543</b>	<b>427.961</b>	<b>565.845</b>	<b>444.254</b>	<b>583.549</b>	<b>510.270</b>

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2007-2011

Dari data diatas, terlihat bahwa secara umum terjadi peningkatan luas arel tanaman dari tahun 2010 sampai 2011 yaitu berkisar antara 0,75% - 9,27% dan produksi komoditi karet dari semua pengelola. Karet masih didominasi oleh perkebunan karet rakyat seluas 383.978 Ha atau sebesar 65.80% dengan produksi sebesar 304,617 ton atau sebesar 59.69% dari total produksi keseluruhan. Jika dilihat dari produktifitasnya perkebunan rakyat 0.79 ton/ha, masih berada dibawah dari produktifitas karet hasil Perkebunan PBSN sebesar 1.27 ton/ha dan PBSA sebesar 1.30 ton/ha. Sedangkan produktifitas karet dari Perkebunan PTPN sebesar 0,73 ton/ha. Hal ini menunjukkan perlunya dukungan yang lebih besar kepada pertanaman karet rakyat untuk meningkatkan produktifitasnya, baik dengan penggunaan teknologi yang lebih baik, atau peremajaan karet tua dengan klon yang lebih unggul.

### 3) Kakao

Provinsi Sumatera Utara juga merupakan salah satu daerah penghasil kakao yang terbesar di Indonesia. Untuk mengetahui perkembangan luas areal dan produksi komoditi kakao di Provinsi Sumatera Utara, maka berikut ini akan disajikan data dari tahun 2007-2010 seperti tersaji dalam tabel berikut ini :

*Tabel 2.44.  
Luas Areal Tanaman dan Produksi Komoditi Kakao di Provinsi Sumatera Utara  
Berdasarkan Pengelolaan dari Tahun 2007-2011*

Pengelola	2007		2008		2009		2010		2011	
	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)
Perkebunan rakyat	56.428	35.313	60.221	36.042	66.091	38.294	67.119	39.582	59.676	34.700
PTPN	19.237	18.747	18.711	17.790	18.501	20.339	19.503	20.357	11.503	23.070
Perkebunan Besar Swasta Nasional	4.542	3.876	4.217	3.934	3.739	3.918	4.005	3.984	3.919	4.556
Perkebunan Besar Swasta Asing	3.006	3.885	2.117	2.486	2.151	2.501	2.303	2.543	812	2.932
<b>Total</b>	<b>83.215</b>	<b>61.793</b>	<b>85.268</b>	<b>60.252</b>	<b>90.482</b>	<b>65.053</b>	<b>92.932</b>	<b>66.467</b>	<b>75.910</b>	<b>65.258</b>

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2007-2011

Dari data diatas sama halnya dengan pertanaman karet, maka perkebunan kakao yang dikelola oleh rakyat masih merupakan yang terluas yakni 59.676 Ha atau 78.61% dari luas seluruh pertanaman kakao seluas 75.910 Ha. Namun jika dilihat dari produktifitas juga masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan perkebunan PTPN, PBSN dan PBSA. Untuk tiap ha lahan hasil produksi kakao rakyat baru sekitar 0.58 ton/ha, sementara produktifitas kakao kebun PTPN sebesar 2 ton/Ha, kebun PBSN 1.16 ton/ha dan PBSA 3.61 ton/ha. Hal ini menunjukkan masih lemahnya pengelolaan pertanaman kakao yang dikelola oleh rakyat, sehingga perlu pembinaan yang lebih intensif dan berkelanjutan, baik dalam budidaya maupun penanganan pasca panen dalam rangka meningkatkan harga penjualan kakao rakyat. Dari tabel juga dapat dilihat bahwa tahun 2010 dan 2011 menunjukkan penurunan luas lahan untuk semua pengelola.

Sementara itu dari data pertanaman rakyat ternyata masih terdapat areal yang tidak produktif (Tanaman Tidak Menghasilkan) yang membutuhkan peremajaan seluas 71.284,22 Ha yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota, sebagaimana tabel 2.47. berikut.

Tabel 2.45.  
Luas Areal Perkebunan Rakyat tahun 2011

Jenis Tanaman	Luas Tanaman (Ha)			
	TBM	TM	T.T.M.	Jumlah
Karet	53.427,25	286.668,12	43.883,18	383.978,55
Kelapa Sawit	57.677,92	343.973,68	3.679,32	405.330,92
Kopi Arabika	13.315,31	42.101,16	2.704,21	58.120,68
Kopi Robusta	1.080,14	11.649,89	7.556,45	20.286,48
Kelapa	9.746,24	90.031,84	9.808,99	109.587,07
Kakao	16.288,51	39.735,71	3.652,07	59.676,29
<b>Jumlah</b>	<b>151.535,37</b>	<b>814.160,40</b>	<b>71.284,22</b>	<b>1.036.979,99</b>

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2011

d. **Peternakan**

1) Ternak Besar

Kondisi ternak yang dikategorikan besar di Sumatera Utara dari tahun ke tahun terus menunjukkan perkembangan yang positif, hal ini dapat kita lihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.46.  
Kondisi Populasi Ternak Besar Menurut Jenis Ternak Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2007-2011

Jenis Ternak Besar	Tahun				
	2007	2008	2009	2010	2011*
Kuda	3.553	3.218	2.817	3.098	3.113
Sapi	384.577	388.240	462.443	462.443	474.929
Kerbau	189.167	155.341	161.046	161.046	161.561
Sapi Perah	2.093	2.290	2.569	2.569	2.669
<b>Total</b>	<b>579.370</b>	<b>549.089</b>	<b>565.282</b>	<b>629.156</b>	<b>642.272</b>

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (2007-2010)

(\*) Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara

2) Ternak kecil

Kondisi ternak yang dikategorikan kecil di Sumatera Utara dari tahun ke tahun terus menunjukkan perkembangan yang relatif fluktuatif, hal ini dapat kita lihat dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 2.47.**  
Kondisi Populasi Ternak Kecil Menurut Jenis Ternak Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2007-2011

Jenis Ternak Kecil	Tahun				
	2007	2008	2009	2010	2011*
Kambing	759.965	618.394	625.815	744.535	774.316
Domba	287.021	268.291	270.420	317.777	330.488
Babi	802.776	733.864	653.150	742.670	751.211
<b>Total</b>	<b>1.849.762</b>	<b>1.620.549</b>	<b>1.549.385</b>	<b>1.804.982</b>	<b>1.856.015</b>

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (2007-2010)

(\*) Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara

3) Ternak Unggas

Kondisi ternak yang dikategorikan unggas di Sumatera Utara dari tahun ke tahun terus menunjukkan perkembangan yang relatif fluktuatif, hal ini dapat kita lihat dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 2.48.**  
Kondisi Populasi Ternak Unggas Menurut Jenis Ternak Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2007-2011

Jenis Ternak Unggas	Tahun				
	2007	2008	2009	2010	2011*
Ayam Ras Petelur	8.224.445	7.698.504	8.168.685	8.839.750	9.035.992
Ayam Ras Pedaging	42.874.471	42.891.621	43.878.127	39.376.258	40.522.107
Ayam Kampung	16.342.700	11.349.742	11.554.037	11.671.883	12.051.219
Itik Manila	3.537.444	1.825.663	1.953.647	2.569.664	2.664.999
<b>Total</b>	<b>70.979.060</b>	<b>63.765.530</b>	<b>65.554.496</b>	<b>62.457.555</b>	<b>64.274.317</b>

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (2007-2010)

(\*) Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara

Secara umum, capaian target sub sektor peternakan selama tahun 2010-2011, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.49.**  
Target dan realisasi sub sektor peternakan tahun 2010-2011

No.	URAIAN	Tahun				Pencapaian Target (%) Tahun 2011
		Target 2010	Realisasi 2010	Target 2011	Realisasi 2011	
1.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	13.259.433	12.985.075	13.426.178	13.129.209	97,79
2.	Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/Tahun (Kg)	0,94	1,34	0,99	-	-.
3.	Kebutuhan Konsumsi per Tahun (Ton)	136,572,159.9	127,902,988.7	137,752,586.2	131,292,090.0	95,31
4.	Produksi Daging (Ton)	14.192,03	15.707,60	16.351,61	16.065,73	98,25
5.	Jumlah Pematangan Sapi (Ekor)	76.276,61	84.422,00	87.883,54	86.347,06	98,25
6.	Produktifitas (Kg/Ekor)	186,06	186,06	186,06	186,06	100,00
7.	Populasi (Ekor)	412.670,17	462.443	474.928,96	480.941,00	101,27

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provsu, 2011

**c. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB**

Dari data diatas dapat disimpulkan tentang produktifitas dan konstribusi sektor pertanian tanaman pangan terhadap PDRB Sumatera Utara berdasarkan harga konstan, sebagai berikut :

Tabel 2.50.  
Produktivitas Bahan Pangan Utama, Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Produktivitas Bahan Pangan (Kw/Ha)					
	- Padi (GKG)	43,53	44,63	45,91	47,47	47,62
	- Jagung	34,08	45,71	47,08	51,08	50,71
	- Kedele	11,16	12,14	12,36	12,22	9,99
2.	Laju Pertumbuhan ekonomi		6,05	4,85	5,08	5,61
2.	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	23,91	22,84	23,03	22,92	
	- Tanaman Bahan Makanan	7,93	7,91	7,85	.....	.....
	- Tanaman Perkebunan	9,58	9,64	9,69	.....	.....
	- Peternakan dan Hasil-hasilnya	2,51	2,46	2,45	.....	.....
	- Kehutanan	1,37	1,33	1,31	.....	.....
	- Perikanan	2,51	2,48	2,48	.....	.....

Sumber : - BPS Provinsi Sumatera Utara ( Data Diolah )  
- Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : NA = Note Available (data tidak tersedia)

#### 2.1.3.2.2. Kehutanan

Data luas kawasan hutan menurut fungsinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.51.  
Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya Tahun 2000 - 2011 (Ha)

Tahun	Fungsi Hutan			
	Produksi	Lindung	Hutan Konsevasi	Hutan Produksi Dikonversi
2000	1,818,994.00	1,294,470.00	362,334.00	200,120.00
2001	1,818,958.00	1,294,470.00	362,334.00	200,120.00
2002	1,316,155.00	1,294,470.00	362,334.00	200,120.00
2003	1,788,016.00	1,481,738.00	362,333.00	47,251.00
2004	1,788,061.19	1,481,738.00	362,333.36	47,251.24
2005 *)	1,035,690.00	1,297,330.00	477,070.00	52,760.00
2006*)	1,035,690.00	1,297,330.00	477,070.00	52,760.00
2007*)	1,035,690.00	1,297,330.00	477,070.00	52,760.00
2008*)	1,035,690.00	1,297,330.00	477,070.00	52,760.00
2009*)	1,035,690.00	1,297,330.00	477,070.00	52,760.00
2010*)	1.874.684,91	1.306.330,00	470.663,74	41.162,47
2011*)	1.874.684,91	1.306.330,00	470.663,74	41.162,47

Keterangan :

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara  
SUDA 2011, BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : 1) Data berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.



- 2) Data luas merupakan hasil digitasi Peta Kawasan Hutan SK Menteri Kehutanan No. 44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang telah disesuaikan dengan Peta Dasar Tematik Kehutanan (PDTK).
- 3) Luas Hutan Produksi terdiri dari Hutan Produksi Terbatas seluas 859.609,93 ha dan Hutan Produksi Tetap seluas 1.015.074,98 ha.

Dari tabel diatas menunjukkan tidak ada penambahan luas hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi yang ada di Provinsi Sumatera Utara, selama kurun waktu 2006-2009, tetapi pada tahun 2010 ada penambahan luas hutan produksi dan hutan lindung dan sebaliknya pada hutan konservasi dan hutan dikonversi terjadi penurunan luas hutan. Dan pada tahun 2011 tidak ada penambahan jumlah luas hutan.

Hasil hutan berupa tahun terakhir ini terus mengalami penurunan. Hal ini seiring dengan pemberlakuan pengetatan ekspor hasil hutan dan isu pelestarian hutan.

Tabel 2.52.  
**Produksi Hasil Hutan Sumatera Utara Menurut Jenis Produksi  
Tahun 2007-2011**

Jenis Produksi	Satuan	2007	2008	2009	2010	2011	
<b>A. Hasil Utama</b>							
1.	Log Rimba	M <sup>3</sup>	124.500,51	79.144,05	86.204,62	-	100.554,57
2.	Log Pinus	M <sup>3</sup>	100.545,27	17.841,98	21.007,27	-	2.822,59
3.	Kayu Gergajian	M <sup>3</sup>	1.317.082,58	177.784,42	205.161,58	159.930,48	83.355,33
4.	Kayu Lapis	M <sup>3</sup>	278.569,61	73.932,24	52.306,15	37.372,97	11.027,17
5.	PULP	M <sup>3</sup>	172.710,27	164.430,24	164.430,24	44.124,72	31.550,63
6.	Block Board	M <sup>3</sup>	-	592	-	-	-
7.	Moulding	M <sup>3</sup>	61.041,35	22.020,31	33.322,86	42.314,43	24.657,42
<b>B. Hasil Iktutan</b>							
1.	Rotan	Ton	295,05	339,79	22.820	280.000	20.415,00*)
			4.670,00*)	-	-	211.585	-
2.	Arang	Ton	850,7	-	-	-	-
3.	Getah Tusam	Ton	886,83	663,35	467,43	674,34	174,18

Sumber : SUDA 2010, BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : \*) Batang

#### a. Kerusakan Kawasan Hutan

Luas kerusakan lahan kritis (tidak kritis, potensial kritis, agak kritis, kritis dan sangat kritis) di Provinsi Sumatera Utara yang termasuk kedalam kawasan hutan, sampai dengan tahun 2010, seluas 6.711.629,29 Ha. Dimana seluas 3.417.104,20 Ha (50,91%) berada di dalam kawasan hutan dan seluas 3.294.525,09 Ha (49,09%) berada di luar kawasan hutan.

Dari segi klasifikasi lahan kritis, maka lahan dengan kategori sangat kritis yang paling luas berada pada kawasan hutan, untuk kategori kritis luasan paling besar berada di dalam kawasan hutan, untuk kategori agak kritis dan potensial kritis luasan terbesarnya berada di dalam kawasan hutan. Dengan demikian lahan kritis terbesar berada di dalam kawasan hutan. Sedangkan untuk lahan tidak kritis luasan terbesar berada pada areal penggunaan lainnya untuk luar kawasan hutan dan pada fungsi hutan produksi/hutan produksi terbatas pada lahan di dalam kawasan hutan.

Kabupaten yang mengalami kerusakan hutan terluas berada pada Kabupaten Mandailing Natal seluas 617.364,97 Ha

**e. Rehabilitasi hutan dan lahan**

Rehabilitasi hutan adalah upaya untuk memulihkan kondisi dengan penanaman pohon dan konservasi tanah. Total luas lahan yang telah direhabilitasi pada tahun 2010 adalah 181.395,60 hektar yang terdiri dari rehabilitasi di dalam kawasan hutan seluas 4.342 hektar dan rehabilitasi di luar kawasan hutan seluas 177.053,60 hektar. Kegiatan rehabilitasi lahan yang dilaksanakan tahun 2010 di Provinsi Sumatera Utara meliputi kegiatan reboisasi seluas 4.142 hektar, penanaman hutan rakyat seluas 924,09 hektar, pembangunan kebun bibit seluas 235 hektar, pembuatan dam pengendali sebanyak 12 unit, pembuatan gully plug sebanyak 27 unit dan pembuatan sumur resapan sebanyak 15 unit.

**c. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB**

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Harga Konstan selama tahun 2007 -2011 terjadi penurunan kontribusi, walaupun nilai rupiahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan masih perlunya perhatian terhadap intensitas pengusahaan hutan, tanpa melupakan aspek pelestariannya. Untuk selengkapnya dapat dilihat ada tabel dibawah ini.

Tabel 2.53.  
*Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB Atas Harga Konstan (Hk)  
Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2011 Provinsi Sumatera Utara*

No	Sektor	Kontribusi									
		2007		2008		2009		2010		2011	
		(Juta Rp.)	Hk %	(Juta Rp.)	Hk %	(Juta Rp.)	Hk %	(Juta Rp.)	Hk %	(Juta Rp.)	Hk %
1	KEHUTANAN	1.370.509,76	1,37	1.414.946,75	1,33	1.460.018,41	1,31				

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

**2.1.3.2.3 Energi dan Sumberdaya Mineral**

**a. Energi Listrik**

Sampai dengan tahun 2011, sumber daya listrik terpasang di Sumatera Utara yang dikelola oleh PLN Wilayah Sumut sebesar 7.500 KW yang berasal dari pembangkit listrik PLTM dan 132.000 KW yang berasal dari PLTA, tersebar di 8 lokasi. Untuk lebih detail dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.54.  
*Inventarisasi pembangkit listrik tenaga air  
Yang dikelola PLN Persero Wilayah Sumut  
Status Tahun 2011*

No.	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA / DUSUN	KLASIFIKASI PEMBANGKIT	DAYA TERPASANG (KW)
2.	Pakpak Bharat	- Kerajaan	Kombih I	PLTM	2 x 750 = 1500
		sda	Kombih II	PLTM	2 x 750 = 1500
3.	Madina	Penyabungan	Batang Gadis	PLTM	2 x 450 = 900
4.	Humbahas	- Dolok Sanggul	Silang	PLTM	1 x 750 = 750
		- Dolok Sanggul	Sibundong	PLTM	1 x 750 = 750
5.	Tap. Utara	- Adian Koting	Raisan I	PLTM	1 x 750 = 750
		sda	Raisan II	PLTM	1 x 750 = 750

6.	Samosir	Pangururan	Boho	PLTM	1 x 200 = 200
7.	Dairi	Sumbul	Silalahi II	PLTA Renun	2 x 41.000 = 82.000
8.	Tap. Tengah	Sibolga	Sibuluan II	PLTA Sipansihaporas	1 x 50.000 = 50.000
			<b>TOTAL</b>	<b>PLTM = 9</b> <b>PLTA = 2</b>	<b>7.500</b> <b>132.000</b>

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Provsu

Berbagai daerah yang dapat menjadi sumber pembangkit listrik yang potensial untuk mengatasi masalah kekurangan energi listrik di Sumatera Utara. Selain pembangkit listrik yang dikelola oleh PLN juga terdapat pembangkit listrik yang dikelola swasta atau yang dibangun atas swadaya masyarakat (lampiran 31)

Kondisi ketenagalistrikan di Sumatera Utara hingga tahun 2010

- Kapasitas daya terpasang pembangkit : 2.298 MW
- Daya mampu pembangkit : ± 1.490 MW
- Beban puncak : 1.400 MW
- Pertumbuhan pemakaian daya : 7 %/tahun
- Usia pembangkit : 15 – 30 tahun

Cadangan sebesar 90 MW, namun hal ini belum dalam kondisi aman, salah satu pembangkit listrik mengalami kerusakan atau pemeliharaan akan terjadi pemadaman

Listrik Desa (PLN) S/D Tahun 2010

Jumlah Desa	: 5.856
Jumlah Desa Berlistrik	: 4.347 (74 %)
Jumlah Desa Belum Berlistrik	: 1.509
Rasio Desa Berlistrik	: 80,85 %
Rasio Elektrifikasi	: 78 %

#### b. Sumber Daya Mineral

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Sumatera Utara relatif kecil hanya sekitar 0,6% yang terutama berasal dari galian mineral/batuan (Lampiran 33). Bahan galian yang ada di Sumatera Utara, pada umumnya berupa batuan / mineral dan galian C.

#### 2.1.3.2.4. Pariwisata

Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara, tahun 2011 berkisar pada angka 2,68 %, menunjukan perannya yang masih sangat kecil dibandingkan sektor lainnya. Jika dicermati lebih jauh sumbangan tertinggi adalah dari pajak restoran/rumah makan. Angka ini belum menunjukkan potensi pariwisata yang sebenarnya karena penerimaan dari restoran lebih menunjukkan kepada konsumsi lokal, bukan karena kedatangan turis lokal atau asing. Hanya sedikit peningkatan arus kunjungan melalui pelabuhan Belawan di tahun 2011 memberi harapan kembalinya Sumatera Utara sebagai salah satu tujuan wisata utama di Indonesia.

Untuk peningkatan sektor pariwisata sudah dibangun fasilitas berupa hotel dan penginapan yang cukup representatif di Medan, Parapat dan Berastagi. Hanya dalam hal promosi masih sangat kurang. Dukungan masyarakat pariwisata di Sumatera sangat diperlukan untuk peningkatan sektor pariwisata di Sumatera Utara.

Tabel 2.55.  
*Wisatawan Mancanegara yang datang Ke Sumatera Utara menurut Pintu Masuk*

Tahun	Bandar Udara Polonia	Pelabuhan Laut Belawan	Pelabuhan Laut Tanjung Balai Asahan	Jumlah Total
2006	109.574	6.936	5.336	121.846
2007	116.614	7.312	10.204	134.130
2008	130.211	7.011	15.271	152.498
2009	148.193	5.075	9.891	163.159
2010 *	145.553	15.919	10.722	172.194

Sumber BPS Prov.Sumatera Utara

\*) s/d November 2010

Tabel 2.56.  
*Jumlah Hotel Menurut Kelas di Sumatera Utara dari Tahun 2007 s/d 2011*

No.	Kelas	Tahun		
		2007	2008	2009
1	Melati	657	736	658
2	Bintang 1	18	18	21
3	Bintang 2	17	20	19
4	Bintang 3	13	10	13
5	Bintang 4	10	10	12
6	Bintang 5	3	4	4
Jumlah		718	798	727

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung di Sumatera Utara melalui 3 (tiga) pintu masuk pada Desember 2011 mencapai 19.278 orang, mengalami peningkatan sebesar 16,49 persen dibanding yang datang pada bulan November 2010 yang mencapai 16.549 orang. Demikian pula, jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2009, jumlah wisman pada bulan Desember 2010 mengalami peningkatan sebesar 9,23 persen, yaitu dari 17.649 orang menjadi 19.278 orang.

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Sumatera Utara pada Desember 2010 mencapai rata-rata 46,67 persen, atau naik 0,06 poin dibanding TPK hotel November 2010 sebesar 46,61 persen.

#### 2.1.3.2.5. Kelautan dan Perikanan

##### 1) Perikanan tangkap

Dengan kondisi perikanan dunia yang cenderung terus meningkatkan produksinya, Provinsi Sumatera Utara juga terus secara maksimal meningkatkan produksi perikanan tangkanya untuk dapat dikonsumsi di dalam negeri serta di ekspor ke luar negeri. Tabel berikut ini menyajikan data mengenai perkembangan produksi perikanan tangkap Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2007-2011.

Tabel 2.57.  
Kondisi Produksi Perikanan Tangkap  
Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2007-2011

Rincian	Tahun		
	2007	2008	2010 *)
Penangkapan di Laut	348.222	354.533	406.135
Penangkapan di Perairan Umum	12.805	13.638	14.524
<b>JUMLAH</b>	<b>361.673</b>	<b>370.179</b>	<b>420.659</b>

\*) Angka Sementara

## 2) Perikanan Budidaya

Secara umum produksi perikanan dari hasil usaha budidaya terus meningkat dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, seperti tergambar dalam tabel dibawah ini.

Sementara itu menurut data produksi ekspor dan konsumsi ikan/kapita penduduk Sumatera Utara juga mengalami peningkatan.

Tabel 2.58.  
Produksi Ekspor, Konsumsi Ikan/Kapita Tahun 2007-2010

NO	KERAGAAN	TAHUN			
		2007	2008	2009	2010 *)
1	EKSPOR				
	a. Volume (ton)	46.743,38	46.824,89	48.935,59	54.550,73
	b. Nilai (US\$)	168.839.832,24	231.117.268,40	195.173.631,82	206.481.658,35
2	Konsumsi Ikan/ Kapita (Kg)	24,5	26,09	27,79	29,59

\*) Angka Sementara

Naiknya konsumsi ikan/kapita pada masyarakat menjadi indikator kenaikan gizi masyarakat terutama untuk sumber protein.

Tabel 2.59.  
Potensi Perikanan Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Ekspor Ikan (ton / thn)	Produksi ikan (ton / thn)
2008	46.824,89	475.971,55
2009	48.935,59	476.895,30
2010	54.550,73	562.448,72

### 2.1.3.2.6. Perdagangan

#### a. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB adalah perbandingan antara jumlah kontribusi sektor perdagangan terhadap jumlah PDRB dalam bentuk persentase. Nilai ini menggambarkan seberapa besar peran sektor perdagangan dalam PDRB pada tahun tertentu. Tabel berikut menjelaskan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB untuk tahun 2007-2011 di Propinsi Sumatera Utara.

Tabel 2.60.  
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2007 s/d 2010 Provinsi Sumatera Utara (Rp. Juta)

Tahun	PDRB (ADHK)	ADHK		PDRB (ADHB)	ADHB	
		(Juta Rp.)	%		(Juta Rp.)	%
2007	99.792,27	18.386,28	18,42	181.819,74	34.846,21	19,17
2008	106.172,36	19.515,52	18,38	213.931,70	41.281,12	19,30
2009	111.559,22	20.575,43	18,44	236.353,62	44.941,66	19,01
2010	118.640,90	21.914,84	18,47	275.700,21	52.384,32	19,00
2011	126.450,62	23.693,43	18,74	314.156,94	60.032,52	19,11

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2011

b. Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor bersih perdagangan adalah Nilai Ekspor suatu daerah selama satu tahun dikurangi dengan jumlah Nilai Impor selama satu tahun. Untuk menggambarkan nilai ekspor bersih perdagangan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2007 s.d 2011 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.61.  
Ekspor Bersih Perdagangan Tahun 2007 s.d 2011 Provinsi Sumatera Utara

Tahun	EKSPOR		IMPOR		Neraca (000 US\$)
	Berat Bersih	Nilai FOB	Berat Bersih	Nilai CIF	
	(Ton)	(000 US\$)	(Ton)	(000 US\$)	
2007	7.841.873	7.082.899	4.745.767	2.109.879	4.973.020
2008	8.520.892	9.261.977	5.880.759	3.696.065	5.565.912
2009	8.058.927	6.460.117	5.236.553	2.724.236	3.735.881
2009	8.058.927	6.460.117	5.236.553	2.724.236	3.735.881
2010	7.992.103	9.147.778	6.171.734	3.576.248	5.571.530
2011	8.161.003	11.883.268	6718.063	4.953.462	6.929.826

**2.1.3.2.7. Perindustrian**

Otonomi daerah memberi kebebasan kepada daerah untuk merencanakan dan mengelola kegiatan ekonomi sendiri tanpa menunggu campur tangan dari pusat. Karenanya setiap daerah harus mampu mengembangkan ekonomi sesuai potensi yang dimilikinya. Potensi ekonomi tersebut tergambar dari kontribusi dari setiap lapangan usaha atau sektor. Subsektor industri pengolahan nonmigas umumnya sangat besar kontribusinya dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Sehingga daerah harus mampu mempercepat pertumbuhan subsektor industri pengolahan non-migas ini agar mendorong pertumbuhan ekonomi. Data dari BPS diatas menunjukkan pertumbuhan Industri dari tahun 2007 sampai dengan 2011 menunjukkan pertumbuhan yang positif terutama pada tahun 2007 dan 2008 yang mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2009 diselenggarakannya Pemilu dan

Pilpres yang mengakibatkan banyak pihak menunda investasi sambil menunggu hasil dari pesta rakyat tersebut, mengakibatkan pertumbuhan Industri tersendat.

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Sumatera Utara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hingga tahun 2009, kontribusi sektor ini sebesar 22,39%, atau kedua setelah sektor pertanian.

Kontribusi dari sektor pengangkutan dan komunikasi, jasa serta keuangan sangat membantu dalam pertumbuhan industri di Sumatera Utara sedangkan sektor lainnya justru mengalami pertumbuhan minus dan ini membuat Pemprov Sumut harus berupaya kuat untuk membantu pengusaha industri nonmigas agar terus meningkatkan kinerjanya di tengah kesulitan pendanaan dan bahan baku.

Tabel 2.62.  
*Laju Pertumbuhan Industri Berdasarkan ADHK  
Provinsi Sumatera Utara*

No	Provinsi	Pertumbuhan				
		2007	2008*	2009**	2010	2011
		Hk	Hk	Hk	Hk	Hk
		%	%	%	%	%
1	Sumatera Utara	11,79	15,01	9,49	.....	.....

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

#### 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah dilihat capaian indikator kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia :

##### 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Fokus Kemampuan Daerah dapat dilihat dari pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita, nilai tukar petani dan pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan).

- a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT perkapita)

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita selama periode tahun 2006-2009 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.63.  
*Angka Konsumsi RT perkapita Tahun 2007 - 2011*

NO	Uraian	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Total Pengeluaran RT	313.189	391.726	432.389	.....	.....
	a. Pangan	190.183	211.733	236.917	.....	.....
	b. Non Pangan	123.006	179.993	195.472	.....	.....
2	Jumlah RT	2.911.674	2.980.434	3.027.500	.....	.....
3	Rasio (Pengeluaran RT/ Jumlah RT)	0,11	0,13	0,14	.....	.....

Sumber : BPS

- b. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan hubungan antara hasil pertanian yang dijual petani dengan barang dan jasa lain yang dibeli oleh petani. Secara konseptual nilai tukar petani adalah mengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga petani dan keperluan dalam



memproduksi barang-barang pertanian. Di sini petani dalam kapasitas sebagai produsen dan konsumen. Berikut ini disajikan tabel yang memperlihatkan kondisi Nilai tukar Petani Sumatera Utara tahun 2006-2010 :

Tabel 2.64.  
*Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2007 s.d 2011*  
*Provinsi Sumatera Utara*

NO	Uraian	2007	2008	2009	2010*
1.	Indeks Yang Diterima Petani (It)	565,1	114,9	121,8	126,4
2.	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	607,6	112,9	120,8	122,6
3.	Rasio	93,0	101,8	100,8	103,07

Sumber : - BPS Provinsi Sumatera Utara  
 - Dinas Pertanian Provsu

Dari data yang disajikan di atas dapat diperoleh hasil analisa bahwa sejak tahun 2006 Nilai Tukar petani di Sumatera Utara terus mengalami peningkatan sejak tahun 2006-2010. Hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat petani di Sumatera Utara.

- c. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan)

Tabel 2.65.  
 Persentase Konsumsi RT Non-Pangan  
 Tahun 2007-2009 Provinsi Sumatera Utara

NO	Uraian	2007	2008	2009
1.	Total Pengeluaran RT Non Pangan	123,006	179,993	195,472
2.	Total Pengeluaran RT	313,190	391,767	432,389
3.	Rasio	39,275	45,944	45,207

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2011

#### 2.1.4.2. Fokus Iklim Berinvestasi

Capaian Indikator Iklim Berinvestasi dilihat dari lama pengurusan ijin dan kondisi keamanan daerah (angka kriminalitas dan aksi demonstrasi) dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Lama Proses Perijinan

Dalam hal proses perizinan di Provinsi Sumatera Utara telah diterbitkan Peraturan Gubernur no. 55 Tahun 2010, tentang pedoman, tata cara permohonan dan jenis perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal.

Dalam pergub tersebut telah diatur tentang penerbitan perizinan dan non perizinan lama proses nya 10 hari, terkecuali perizinan yang terkait dengan penataan ruang, lingkungan hidup, keamanan, keselamatan dan kesehatan masyarakat atau yang diatur khusus dengan perundang-undangan.

- b. Angka kriminalitas

**Tabel 2.66.**  
*Angka Kriminalitas Provinsi Sumatera Utara 2007-2010*

No	Jenis Kriminal	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah kasus Narkoba	2.933	2.641	2.802	2.718
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	119	138	114	127
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	961	911	984	1.065
No	Jenis Kriminal	2007	2008	2009	2010
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	6.515	6.098	6.526	6.869
5.	Jumlah kasus Pencurian	8.890	8.805	9.089	10.245
6.	Jumlah kasus Penipuan	1.778	1.361	1.670	2.260
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	961	21	22	13
8.	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	32.704	31.895	35.336	41.806
9.	Jumlah Penduduk	12.764.245	12.834.371	13.201.715	13.339.353
10.	Angka Kriminalitas (8)/(9)	0,25%	0,24%	0,26%	0,31%

Sumber : POLDA SUMUT, 2011

c. Jumlah Demonstrasi

**Tabel 2.67.**  
*Jumlah Demo Provinsi Sumatera Utara, 2007-2010*

No	Uraian	2007	2008	2009	2010
1	Bidang Politik	134	177	243	193
2	Ekonomi	96	69	82	47
3	Sosial Budaya	391	448	66	279
4	Kasus Pemogokan Kerja	78	65	82	72
5	Jumlah Unjuk Rasa	699	759	473	591

Sumber : POLDA SUMUT, 2011

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa ada tren peningkatan gangguan keamanan dari tahun 2007 - 2011 dilihat dari angka kriminalitas yang terjadi dan gangguan kenyamanan berupa aksi demonstrasi yang berakibat negatif terhadap investasi di daerah ini.

Hal ini perlu diantisipasi dan dukungan dari semua pihak, baik aparat keamanan, maupun masyarakat untuk menjaga agar kondisi keamanan tetap kondusif, sehingga menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya.

**2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia**

Jika dilihat dari rasio ketergantungan terlihat bahwa terjadi penurunan angka rasio ketergantungan usia tidak produktif, yang menunjukkan semakin baiknya struktur angkatan kerja di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel ini memperlihatkan data rasio ketergantungan penduduk di Provinsi Sumatera Utara.

**Tabel 2.68.**  
 Jumlah penduduk dan Rasio Ketergantungan  
 Provinsi Sumatera Utara

No	Uraian	2007	2008
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	4.133.400	4.147.000
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	761.000	779.200
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	4.894.400	4.926.200
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	8.378.148	8.794.804
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	0,58	0,56

Sumber : BPS, 2010

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel rangkuman berikut ini :

**Tabel 2.69.**  
**Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah**  
**terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**  
**Provinsi Sumatera Utara**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Standar (RPJMD Tahun 2011)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2007	2008	2009	2010	2011		
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>								
<b>Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>								
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	PDRB ADHB (Rp. Trilyun)	181,82	213,93	236,35	275,70	314,15	306,95	>
1.2.	PDRB ADHK (Rp. Trilyun)	99,79	106,17	111,56	118,64	126,45	127,01	>
1.3.	Pertumbuhan ekonomi (%)	6,90	6,39	5,07	6,35	6,58	6,50	>
1.4.	Laju inflasi provinsi (%)	6,60	10,72	2,61	8,0	3,67	6,50	>.
1.5.	PDRB per kapita ADHB (Rp.Juta/Jiwa)	14,17	16,81	18,38	21,23	23,97	22,43	<
1.6.	Nilai Tukar Petani (NTP)	93,00	101,80	100,8	102,36	103,13	100,98	>
1.7.	Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia (%)				24,36	-	.....	.....
1.8.	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	0,050	0,058	0,053	-	-	.....	.....
1.9.	Persentase penduduk miskin (%)	13,90	12,55	11,51	11,31	10,83	8,55	<
<b>Fokus Kesejahteraan Masyarakat</b>								
<b>1.</b>	<b>Pendidikan</b>							
1.1.	Angka melek huruf (%)	97.89	98.11	98.31	98.26	98,46	98,21	.....
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	8,60	9,84	9,86	9,91	9,66	9,66	.....
1.3.	Angka partisipasi kasar							
1.3.1.	PAUD (%)		18,82	29,58	31,27	35,50	.....	.....
1.3.2.	SD/MI (%)		112.73	112.89	114.20	116,40	.....	.....
1.3.3.	SMP/MTs (%)		92.48	89.74	89.83	101,19	.....	.....
1.3.4.	SMA/SMK/MA (%)		69.58	73.36	72.69	82,46	.....	.....
1.4.	Angka Partisipasi Murni							
1.4.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	NA	94,81	94,81	95,00	92,66	92,43	.....
1.4.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	NA	86,84	93,50	94,18	93,29	.....	.....
1.4.3.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C (%)	NA	63,06	67,61	85,16	68,5	.....	.....
<b>2.</b>	<b>Kesehatan</b>							
2.1.	Angka kelangsungan hidup bayi, dilihat dari Angka Kematian Bayi /1000 kelahiran hidup	26,90	25,6	24,3	23,0	23,0	23	=
2.2.	Angka Kematian Ibu dilihat dari Kematian Ibu Melahirkan/ 100.000 kelahiran hidup	305	290	260,0	268,0	250,0	285	>

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Standar (RPJMD Tahun 2011)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2007	2008	2009	2010	2011		
2.3.	Angka usia harapan hidup (Tahun)	69,10	69,20	69,4	69,8	72,0	70,63	>
2.4.	Persentase balita gizi buruk (%)		21,4	22,2	21,4	20,0	22	>
<b>3.</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>							
3.1.	Rasio penduduk yang bekerja (%)	89,90	90,90	91,55	91,99	.....	92,4	<
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>								
<b>Fokus Layanan Urusan Wajib</b>								
<b>1.</b>	<b>Pendidikan</b>							
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini	NA	18,82	29,58	31,27	35,50	.....	.....
1.2.	Pendidikan dasar							
1.2.1.	APK SD + MI	109,36	112,73	112,89	114,20	116,40	111,40	=
1.2.2.	APM SD + MI	92,41	94,81	94,81	95,00	92,66	92,66	=
1.2.3.	APK SMP + MTs		92,48	89,74	89,83	101,19	101,19	=
1.2.4.	APM SMP + MTs		86,84	93,50	94,18	93,29	93,29	=
1.2.5.	APK SMA + MA + SMK (%)		69,58	73,36	72,69	82,46	82,46	=
1.2.6.	APM SMA		63,06	67,61	85,16	68,5	68,50	=
1.2.1.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)	97,03	97,08	97,15	98,26	98,46	98,21.	>
1.2.2.	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,60	9,84	9,86	9,91	9,66	9,66	=
1.3.	Fasilitas Pendidikan:							
1.3.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (Unit)	27.569	30.262	29.834				
1.3.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik (Unit)	17.750	20.343	20.076				
1.4.	Angka Putus Sekolah							
1.5.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	1.80	1.27	1.14	1.03	0.93		
1.5.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	3.52	1.79	5.11	4.60	4.14		
1.5.3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA (%)	2.82	2.07	6.90	6.21	5.59		
1.5.4.	Angka Putus Sekolah (APS) SMK (%)	4.70	1.3	2.38	2.15	1.94		
1.5.	Angka Kelulusan:							
1.6.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	255,330	263,040	277,316	205.289	506.881		
1.6.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	149,636	149,312	155,731	171.304	172.973		
1.6.3.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	94,303	93,982	96,762	91.717	98.199		
1.6.4.	Angka Kelulusan (AL) SMK	55,333	55,330	58,969	60.513	57.987		
1.6.5.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1 (orang)	68,700	81,849	88,722	251.134	74.286		
1.6.6.	S2 (orang)	474	518	1,184	667	732		
<b>2.</b>	<b>Kesehatan</b>							
2.1.	Angka Kematian Bayi /1000 KLH	26,90	25,6	24,3	23,0	22,0	24	>
2.2.	Angka Kematian Ibu/100.000/KLH	305	290	260,0	268,0	NA	295	>
2.3.	Angka usia harapan hidup (Tahun)	69,10	69,20	69,4	69,5	69,5	70,4	<
2.4.	Prevalensi Gizi Buruk dan Kurang		21,4	22,2	21,4	20,9	21,2	>
2.5.	Rasio posyandu per satuan balita				1:55,71	1:24.681		
2.6.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk				1:25.332	1:24.681		

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Standar (RPJMD Tahun 2011)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2007	2008	2009	2010	2011		
2.7.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk				1:69.918	1:67.616		
2.8.	Rasio dokter per satuan penduduk				1:14,67	1:17,64		
2.9.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk				1:25,61	1:29,69		
2.10.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani				100%	100%		
2.11.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan				64,20%	86,73%		
2.12.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)				NA	65,78%		
2.13.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan				100%	100%		
2.14.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA				100%	100%		
2.15.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD				100%	100%		
2.16.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin				100%	100%		
2.17.	Cakupan kunjungan bayi				69,82%	76,82%		
2.18.	Cakupan puskesmas				1:25.332	1:24.681		
2.19.	Cakupan pembantu puskesmas				1:6.918	1:7.137		
<b>3.</b>	<b>Pekerjaan Umum</b>							
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)		30	35,00	40,85	48,19		
3.2.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi sedang (%)		42,98	38,71	37,97	43,07		
3.3.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi rusak ringan (%)		27,02	12,54	9,54	17,23		
3.4.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi rusak berat (%)			13,75	11,64	36,61		
3.5.	Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik				45	61		
3.6.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk				1: 381	1: 381		
3.7.	Panjang jalan dilalui Roda 4 (km)				2.753,04	2.753,04		
3.8.	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4) (km)				32.115,92	32.115,92		
3.9.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )				29,08 %	41,30		
3.10.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (Ha)				88.773	.....		
<b>4.</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>							

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Standar (RPJMD Tahun 2011)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2007	2008	2009	2010	2011		
4.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA (Dokumen)	1	-	-	-	-	1 Dok	=
4.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA			1	-	-	1 Dok	=
4.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yg telah ditetapkan dgn PERKADA			1	1	-	1 Dok	=
4.4.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPd			1	1	-	1 Dok	=
<b>5.</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>							
5.1.	Persentase Penduduk berakses air minum (%)			80	85			
5.2.	Penegakan hukum lingkungan (kasus)			15				
<b>6.</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>							
6.1.	Rasio KDRT (kasus)	275	15	19	18	.....		
6.2.	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	53%	55%	57%	57%	.....		
<b>7.</b>	<b>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>					.....		
7.1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga (orang)	2,42	1,92	2,1	2,07	.....		
7.2.	Jumlah Akseptor KB	238,062	278,858	368,377	405,961	.....		
7.3.	Cakupan peserta KB aktif	1.250.008	1.322.653	1.404.182	1.429.414	.....		
7.4.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	1.043.158	1.032.237	1.049.325	1.048.191	.....		
<b>8.</b>	<b>Sosial</b>							
8.1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (UPT Layanan Sosial)			13	.....	.....		
8.2.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial (jenis)			23	.....	.....		
8.3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (program)			5	.....	.....		
<b>9.</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>							
9.1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	67,49	68,33	69,14	69,51	.....	.....	.....
9.2.	Pencari kerja yang ditempatkan (org)	47.507	62.074	48.107	52.974	.....	.....	.....
9.3.	Tingkat pengangguran terbuka (%)		10,10	9,10	7,43	.....	6,90	<
<b>10.</b>	<b>Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</b>							
10.1.	Persentase koperasi aktif (%)	62,40	63,20		58,57	58,60	.....	.....
10.2.	Jumlah UKM non BPR (Unit)		121.051	124.139	.....	.....	.....	.....
10.3.	Jumlah BPR/LKM (unit)				95	95	.....	.....
10.4.	Usaha Mikro dan Kecil (Unit)		1.925.850	1.761.648	.....	2.151.729	.....	.....

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Standar (RPJMD Tahun 2011)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2007	2008	2009	2010	2011		
<b>11.</b>	<b>Penanaman Modal</b>							
11.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	37	37	34	22	54		
11.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp. Juta)	4.974.968,63	2.943.093,92	12.047.929,86	2.024.885,56	1.662.522,50.		
11.3.	Daya serap tenaga kerja (%)	291,92	238,89	343,29	173,05	.....		
11.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	1.078,22	(1.281,13)	2.253,63	(1.690,80)	.....		
<b>12.</b>	<b>Ketahanan Pangan</b>							
12.1.	Regulasi ketahanan pangan (Perda)	-	-	2	-	.....		
12.2.	Ketersediaan pangan utama							
12.2.1.	Padi (ton)	2.064.007	1.900.913	2.007.375	2.040.924	2.042.665	2.111.039	<
12.2.2.	Jagung (ton)	804.850	1.098.969	1.166.548	1.428.813	1.294.645	195.540	>
12.2.3.	Kedele (ton)	4.345	11.647	34.545	10.260	11.413	40.337	<
12.2.4.	Gula (ton)			NA	NA	NA		
12.2.5.	Daging			13.633	15.707,60	16.065	16.351,61	<
<b>13.</b>	<b>Statistik</b>							
23.1.	Buku Provinsi Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
<b>14.</b>	<b>Kearsipan</b>							
24.1.	Pengelolaan arsip secara baku	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
<b>15.</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>							
25.1.	Jumlah jaringan komunikasi				4	4		
25.2.	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk				NA	NA		
25.3.	Jumlah surat kabar nasional/lokal				5/20	5/34		
25.4.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal				6/2	15/2		
25.5.	Web site milik pemerintah daerah				23	15		
25.6.	Pameran/expo				Tiap tahun	Tiap tahun		
<b>16.</b>	<b>Perpustakaan</b>							
26.1.	Jumlah perpustakaan				31 Kab/ Kota	33 Kab/ Kota		
26.2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang)		283.505	433.812	589.553	593.834		
26.3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	187,170	193,587	201,067	326,170	652.780		
<b>Fokus Layanan Urusan Pilihan</b>								
<b>1.</b>	<b>Pertanian</b>							
1.1.	Produktivitas Padi (kw/ha)	43,53	44,63	45,91	47,47	47,62		
1.2.	Produktivitas Jagung (kw/ha)	35,01	45,71	47,08	50,13	50,71		
1.3.	Produktivitas Kedele (kw/ha)	11,60	12,14	12,36	12,10	10,01		
1.4.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	23,91	23,83	23,78	22,92	.....		
1.5.	Kontribusi sektor pertanian (tanaman pangan) terhadap PDRB	7,93	7,91	7,85	.....	.....		
1.6.	Kontribusi sektor perkebunan PDRB	9,58	9,64	9,69	.....	.....		
1.7.	Kontribusi sektor peternakan	2,51	2,46	2,45	.....	.....		
1.8.	Kontribusi sektor perikanan	2,51	2,48	2,48	.....	.....		
1.9.	Kontribusi sektor kehutanan	1,37	1,33	1,31	.....	.....		



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Standar (RPJMD Tahun 2011)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2007	2008	2009	2010	2011		
<b>2.</b>	<b>Kehutanan</b>				.....	.....		
2.1.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1,37%	1,33%	1,31%	.....	.....		
<b>3.</b>	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>				.....	.....		
3.1.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	1,23	1,23	1,19	.....	.....		
<b>4.</b>	<b>Pariwisata</b>				.....	.....		
4.1.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,57	0,59	0,60	.....	.....		
<b>5.</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>				.....	.....		
5.1.	Produksi perikanan			562.448,7 2	.....	.....		
5.2.	Konsumsi ikan			29,59	.....	.....		
<b>6.</b>	<b>Perdagangan</b>							
6.1.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	16,38	16,33	16,37				
6.2.	Volume Ekspor (Juta ton)	7,84	8,52	8,06	7,98	8,16	8,96	
6.3.	Nilai Ekspor (Milyar US\$)	7,08	9,26	6,46	9,14	11,88	8,71	
6.4.	Volume Impor (Juta ton)	4,74	5,88	5,24	6,24	6,71	5,91	
6.5.	Nilai Impor (Milyar US\$)	2,11	3,69	2,72	3,57	4,95	2,90	
6.6.	Nilai Bersih Perdagangan (Milyar US\$)	4,97	5,56	3,73	5,56	6,92		
<b>7.</b>	<b>Perindustrian</b>							
7.1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	23,66	22,89	22,39	.....	.....		
7.2.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	1,77	1,77	1,76	.....	.....		
<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>								
<b>Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah</b>								
1.	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>							
1.1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp.)	313.189	391.726	432.389	.....	.....		
1.2.	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (Rp.)	123.006	179.993	195.472	.....	.....		
1.3.	Produktivitas total daerah							
2.	<b>Pertanian</b>							
2.1.	Nilai tukar petani	93,0	101,8	100,8	102,36	103,13	100,98	>
<b>Fokus Iklim Berinvestasi</b>								
1.	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>							
1.1.	Angka kriminalitas yang tertangani				6.285	.....		
1.2.	Jumlah demo				581	.....		
1.3.	Lama proses perijinan			10 Hari		.....		

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Standar (RPJMD Tahun 2011)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2007	2008	2009	2010	2011		
1.4.	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha			1				
1.5.	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa				48,84			
<b>Fokus Sumber Daya Manusia</b>								
1.	<b>Ketenagakerjaan</b>							
1.1.	Rasio lulusan S1/S2/S3							
1.2.	Rasio ketergantungan	0.58	0.56					

### 2.1.5. Ekonomi dan Keuangan Daerah

Secara umum gambaran hasil Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah secara umum dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.70.**  
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi  
Provinsi Sumatera Utara

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Bertambah / Berkurang	Proyeksi	
			2010	2011		2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PDRB (Harga Berlaku)	Triliun Rp	306,95	314,15	.....	349,27	.....
2	PDRB (Harga Konstan)	Triliun Rp	118,64	126,45	.....	135,57	.....
3	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Harga Berlaku Tahun Tertentu	%	6,42	6,58	.....	25,12	.....
4	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Harga Konstan Tahun Tertentu	%	9,14	.....	.....	9,75	.....
5	Tingkat Inflasi	%	8,00	3,67	.....	6,0	.....
6	Struktur PDRB Pendekatan Produksi Atau Sektoral :						.....
	- Pertanian	%	22,92	.....	.....	22,50	.....
	- Pertambangan & Penggalian	%	1,37	.....	.....	1,34	.....
	- Industri Pengolahan	%	22,96	.....	.....	23,01	.....
	- Listrik, Gas dan Air Bersih	%	0,95	.....	.....	0,89	.....
	- Bangunan	%	6,39	.....	.....	6,89	.....
	- Perdagangan, Hotel & Restoran	%	19,00	.....	.....	19,02	.....
	- Pengangkutan dan komunikasi	%	9,03	.....	.....	9,10	.....
	- Keuangan, persewaan & jasa perusahaan	%	6,60	.....	.....	6,60	.....
	- Jasa - jasa	%	10,81	.....	.....	10,74	.....
7	Produktivitas Sektoral yang merupakan Rasio antara Nilai Tambah Bruto (NTB) setiap Sektor terhadap jumlah Tenaga Kerja di sektor yang bersangkutan			.....	.....		.....
	- Pertanian		0,969	.....	.....	-	.....
	- Pertambangan & Penggalian			.....	.....	-	.....
	- Industri Pengolahan		5,736	.....	.....	-	.....
	- Listrik, Gas dan Air Bersih		5,893	.....	.....	-	.....
	- Bangunan		2,634	.....	.....	-	.....
	- Perdagangan, Hotel & Restoran		1,833	.....	.....	-	.....
	- Pengangkutan dan komunikasi		3,768	.....	.....	-	.....
	- Keuangan, persewaan & jasa perusahaan		14,358	.....	.....	-	.....
	- Jasa - jasa		1,353	.....	.....	-	.....
8	Besaran ICOR (Incremental Capital Output Ratio)			.....	.....		.....
9	Jumlah Penduduk Miskin	Juta Jiwa	1,490	.....	.....	1,296	.....
10	Tingkat Pengangguran (Triwulan III 2010)	%	7,43	.....	.....	6,9	.....
11	Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan :			.....	.....		.....
	- Pendapatan Perkapita	Rp Juta	21,23	.....	.....	25,12	.....
	- Kemampuan Investasi (Triwulan III 2010)	Rp Triliun	57,13	.....	.....		.....
	- Besaran Indeks Gini (Gini Ratio Index)		0,36	.....	.....		.....
	- Besaran IPM (indeks Pembangunan Manusia)	-	79,5	.....	.....	80,5	.....
	- dan sebagainya			.....	.....		.....
12	Berbagai Macam Besaran Rasio dan Perbandingan-perbandingan			.....	.....		.....
	- Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,0083	.....	.....	0,0098	.....
	- Biaya Pendidikan, Kesehatan, Penelitian dan sebagainya terhadap PDRB	%		.....	.....		.....
	- Perbandingan Penerimaan Pemerintah Daerah (PAD dan Dana Perimbangan terhadap PDRB)		0,0126	.....	.....	0,0138	.....

## **2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD**

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun lalu (2009 dan 2010), didasarkan pada pencapaian target yang telah ditetapkan serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2009 – 2013 yang merupakan penjabaran tahun ke-tiga dari masa bhakti Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.

Tujuan evaluasi adalah untuk melihat Kinerja RKPD tahun lalu antara lain untuk menilai/mengidentifikasi program dan kegiatan yang belum terealisasi atau belum terlaksana 100% (seratus persen), untuk diusulkan lagi pada penyusunan RKPD tahun 2013. Selain itu untuk mereview RPJMD dan RKPD, dengan memperhatikan dokumen RKPD tahun 2012. Perkembangan capaian pelaksanaan kinerja pembangunan Provinsi Sumatera Utara selama 2 (dua) tahun sebelumnya (2010-2011) adalah sebagai berikut :

### **2.2.1. Evaluasi Kinerja Tahun 2011**

Keberhasilan kinerja pelaksanaan pembangunan daerah salah satunya dapat dilihat dari capaian Indikator makro pembangunan, baik indikator makro pembangunan sosial, maupun indikator makro pembangunan ekonomi. Salah satu indikator makro pembangunan sosial yang dapat dijadikan ukuran dalam melihat gambaran keberhasilan pelaksanaan pembangunan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu : meningkatnya derajat pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan tercapainya kehidupan yang layak.

Selanjutnya, salah satu indikator makro pembangunan ekonomi yang dapat dijadikan ukuran dalam melihat gambaran keberhasilan pelaksanaan pembangunan, khususnya kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yaitu : PDRB, Laju Pertumbuhan Ekonomi (atas dasar harga Konstan), Pendapatan per Kapita dan Tingkat Inflasi.

**Tabel 2.71**  
**Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2012**  
**Provinsi Sumatera Utara**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)			Target capaian kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2013)	Realisasi			Pencapaian Target (%)			Pencapaian s/d Thn 2011 thd RPJMD Tahun 2013 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2009	2010	2011		2009	2010	2011	2009	2010	2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8/4)	12=(9/5)	13=(10/6)	14=(10/7)	15
<b>I. Wajib</b>														
<b>1.</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>1.1. Indeks Pendidikan</b>												
		1. APK PAUD	35,68	53,9		60	30,20	53,5		84,64	99,26			
		2. APK SD + MI	110,52	111,41	111,4	112,59	98,11	99,57	111,4	88,77	89,37	100	98,94	<
		3. APM SD + MI	92,9	93,16	92,66	92,66	94,81	95,00	92,66	102,06	101,98	100	100,00	>
		4. APK SMP + MTs	96,89	99,49	101,19	105,01	98,01	99,57	101,19	101,16	100,08	100	96,36	<
		5. APM SMP + MTs	89,01	91,56	93,29	97,52	93,50	94,18	93,29	105,04	102,86	100	95,66	<
		6. APK SMA + MA + SMK (%)	78,07	81,21	82,46	89,99	68,99	86,40	82,46	88,37	106,39	100	91,63	<
		7. APM SMA	65,01	67,55	68,5	74,57	67,61	85,16	68,5	104,00	126,07	100	91,86	<
		8. Buta Aksara	2,05	1,92	1,79	1,54	1,78	1,67	1,54	100,13	100,13	86,03	100,00	>
		9. Rata - Rata Lama Sekolah (tahun)	9,27	9,47	9,66	10,07	9,86	9,91	9,66	106,36	104,65	100	95,93	<
<b>2.</b>	<b>Kesehatan</b>	<b>2.1. Indeks Kesehatan</b>												
		1. Angka Kematian Bayi (/1000 KLH)	26	25	24	22	24,3	23,0	22,0	106,5	108,0	91,7	100,0	>
		2. Angka Kematian Ibu (AKI) (100.000 KLH)	315	305	295	275	260,0	268,0	250,0	121,2	113,8	118,0	90,9	<
		3. Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	68,8	69,6	71,2	72	69,4	69,8	72,00	99,2	99,8	98,9	100,0	=
		4. Prevalensi Gizi Buruk dan Kurang (%)	22,5	21,80	21,20	20	22,2	21,4	20,9	101,4	101,9	101,4	104,5	>

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)			Target capaian kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2013)	Realisasi			Pencapaian Target (%)			Pencapaian s/d Thn 2011 thd RPJMD Tahun 2013 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2009	2010	2011		2009	2010	2011	2009	2010	2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8/4)	12=(9/5)	13=(10/6)	14=(10/7)	15
3	Pekerjaan Umum													
	a. Sumber Daya Air													
		<b>3.1. Irigasi (Ha)</b>												
		1. Pemeliharaan (rutin tiap tahun)	73.326	73.326	73.326	73.326	73.326	73.326	73.326	100,0	100,0	100,0	100,0	<
		2. Perbaikan/ Peningkatan	2.656	6.800	7.450	31.206	6.636	5.505	6.040	249,8	81,0	81,07	58,3	<
		<b>3.2 Rawa (Ha)</b>												
		1. Pemeliharaan (rutin tiap tahun)	61.732	61.732	61.732	61.732	61.732	61.732	61.732	100,0	100,0	100,0	100,0	>
		2. Perbaikan/ Peningkatan	1.970	4.200	4.200	18.770	3.656	2.527	2.604	185,6	60,2	62,0	46,8	<
		<b>3.3 Sungai (m)</b>												
		1. Perkuatan tebing	9.683	10.500	10.500	51.683	9.802	9.012	12.261	101,2	85,8	116,8	60,1	<
		2. Normalisasi/ pelurusan	5.607	9.500	9.500	43.607	6.500	15.168	16.345	115,9	159,7	172,1	87,2	<
		3. Pembangunan/ Perbaikan tanggul	14.020	15.250	15.250	75.020	13.600	18.605	17.615	97,0	122,0	115,5	66,4	<
		<b>3.4 Penyediaan Air Baku/Embung (unit)</b>	5	4	4	21	9	11	9	180,0	275,0	225,0	138,10	>
		<b>4.1. Kondisi Jalan dan Jembatan Bertambah Baik, Pelayanan Lalu lintas menjadi Lebih Baik (km)</b>	871,66	450,00	495,00	598,95		478,00	808,03	-	106,2	163,2	134,91	>
		1. Pembangunan Jalan (Km)	139,27	110,00	121,00	146,4		111,00	208,93	-	100,9	172,7	142,70	>
		2. Penggantian Jembatan (m)	732,38	340,00	374,00	452,5		367,00	599,10	-	107,9	160,2	132,39	>
		<b>4.2. Berkurangnya Jalan - jalan berlobang</b>	14.686	16.004	17.605	21.302		13.288,11	12.390,31	-	83,0	70,4	58,17	<
		1. Pemeliharaan Berkala Jalan (Km)	25,12	34,45	37,90	45,85		13,15	7,45	-	38,2	19,7	16,25	<

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)			Target capaian kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2013)	Realisasi			Pencapaian Target (%)			Pencapaian s/d Thn 2011 thd RPJMD Tahun 2013 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2009	2010	2011		2009	2010	2011	2009	2010	2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8/4)	12=(9/5)	13=(10/6)	14=(10/7)	15
		2. Pemeliharaan Rutin Jalan (Km)	2.056	2.320	2.552	3.088		2.264,23	2.280,93	-	97,6	89,4	73,87	<
		3. Pemeliharaan Rutin Jembatan (m)	12.605	13.650	15.015	18.168		11.010,73	10.101,93	-	80,7	67,3	55,60	<
	<b>c. Perhubungan</b>	<b>5.1</b> Meningkatnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ												
		1. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang (Provsu)		1	1	5		1	1		100,0	100,0	40,00	<
		2. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana Perlengkapan Jalan (Rambu, Guardrail, Delineator, APILL, Marka Jalan) (Provsu)		1	1	5		1	1		100,0	100,0	40,00	<
		<b>5.2.</b> Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan												
		1. 1. Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang (unit)		-	2	2		-	1			50,0	50,00	<
		<b>5.3.</b> Meningkatnya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas												

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)			Target capaian kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2013)	Realisasi			Pencapaian Target (%)			Pencapaian s/d Thn 2011 thd RPJMD Tahun 2013 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2009	2010	2011		2009	2010	2011	2009	2010	2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8/4)	12=(9/5)	13=(10/6)	14=(10/7)	15
		1. Pengadaan dan pemasangan Rambu lalu lintas (unit)		400	350	1.850		792	190		198,0	54,3	53,08	<
		2. Pengadaan dan pemasangan Guard Rail (m)		900	1.500	5.000		1.080	745		120,0	49,7	36,50	<
		3. Pengadaan dan Pemasangan Delineator (buah)		500	1.000	5.000		340	545		68,0	54,5	17,70	<
		4. Pengadaan dan Pengecatan Marka Jalan (m2)		4.000	10.000	20.000		6.580	400		164,5	4,0	34,90	<
	<b>d. Energi Listrik</b>	4.1 Rasio Elektrifikasi Desa	-	-	-	90		80	80,85					
		4.1 Rasio elektrifikasi rumah tangga	-	-	-	80		78	78,00					
<b>I.</b>	<b>Pilihan</b>													
<b>1.</b>	<b>Pertanian</b>	<b>1.1. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya</b>												
		<b>a. Padi</b>												
		1. Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/Tahun (Kg)	134,13	133,46	132,79	131,46	136,85	136,85	134,00	102,03	102,54	100,91	101,93	>
		2. Kebutuhan Konsumsi per Tahun (Ton)	1.756.070	1.769.543	1.782.837	1.808.895	1.784.841	1.807.509	1.755.881,86	101,64	102,15	98,49	97,07	<
		3. Ketersediaan Beras untuk dikonsumsi (Ton)	2.016.709	2.063.335	2.111.039	2.209.782	2.007.375	2.040.924	2.042.665,05	99,54	98,91	96,76	92,44	<
		4. Surplus/Penyanga ga per Tahun (Ton) (4-3)	260.639	293.792	328.202	400.887	222.533	233.416	286.783,00	85,38	79,45	87,38	71,54	<
		5. Produksi GKG	3.560.856	3.643.183	3.727.413	3.901.761	3.527.899	3.586.862	3.607.036,00	99,07	98,45	96,77	92,45	<
		6. Luas Panen (Ha)	817.277	829.536	841.980	867.428	768.407	752.019	757.428,00	94,02	90,66	89,96	87,32	<



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)			Target capaian kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2013)	Realisasi			Pencapaian Target (%)			Pencapaian s/d Thn 2011 thd RPJMD Tahun 2013 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2009	2010	2011		2009	2010	2011	2009	2010	2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8/4)	12=(9/5)	13=(10/6)	14=(10/7)	15
		7. Produktivitas (Kw/Ha)	43,57	43,92	44,72	44,98	45,91	47,70	47,62	105,37	108,61	106,48	105,87	>
		8. Luas Tanam (Ha)	833.956	846.466	859.163	885.131	768.407	752.019	757.428,00	92,14	88,84	88,16	85,57	<
		<b>b. Jagung</b>												
		1. Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/Tahun (Kg)	61,247	61,370	61.492	61,739	6,52	6,73		10,65	10,97			
		2. Kebutuhan (Konsumsi + Industri) per Tahun (Ton)	801.891	813.728	825.609	849.504	851.536	864.515		106,19	106,24			
		3. Surplus/Penyanga per Tahun (Ton)	151.857	172.662	194.540	241.669	315.012	564.298		207,44	326,82			
		4. Produksi Jagung (Ton)	953.748	986.390	1.020.149	1.091.173	1.166.548	1.377.718	1.294.645	122,31	139,67	126,91	118,65	>
		5. Luas Panen (Ha)	261.399	267.934	274.632	288.536	247.782	274.822	255.291	94,79	102,57	92,96	88,48	<
		6. Produktivitas (Kw/Ha)	36,49	36,81	37,15	37,82	47,08	50,13	50,71	129,02	136,19	136,50	134,08	>
		7. Luas Tanam (Ha)	266.734	273.402	280.237	294.424	277.424	272.776	262.079	104,01	99,77	93,52	89,01	<
		<b>c. Kedele</b>												
		1. Kebutuhan Konsumsi/Kapita/ Tahun (Kg)	4.438	4.443	4.447	4.456	4.480	4.450		100,95	100,16			
		2. Kebutuhan (Konsumsi+Industri) per Tahun (Ton)	58.111	58.910	59.710	61.316	78.687	79.380		135,41	134,75			
		3. Impor/Surplus per Tahun (Ton) *	(34,51)	(24,37)	(19,379)	(9,37)	(64,48)	(69,12)		(186,83)	(283,69)			
		4. Produksi Kedele (Ton)	23.598	34.545	40.337	51.950	14.206	9.439	11.426	60,20	27,32	28,33	21,99	<
		5. Luas Panen (Ha)	20.139	29.400	34.300	44.100	11.494	7.803	11.413	57,07	26,54	33,27	25,88	<
		6. Produktivitas (Kw/Ha)	11,72	11,75	11,76	11,78	12,36	12,10	10,01	105,46	102,98	85,12	84,97	<

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)			Target capaian kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2013)	Realisasi			Pencapaian Target (%)			Pencapaian s/d Thn 2011 thd RPJMD Tahun 2013 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2009	2010	2011		2009	2010	2011	2009	2010	2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8/4)	12=(9/5)	13=(10/6)	14=(10/7)	15
		7. Luas Tanam (Ha)	20.550	30.000	35.000	45.000	13.836	7.758		67,33	25,86			
		<b>1.2. Produksi tanaman perkebunan (ton *)</b>												
		1. Perkebunan Rakyat	5.343.755,08	5.481.089,58	5.621.953,58	5.914.635,24	5.566.087,96	5.709.136,42	5.851.971	<b>104,16</b>	<b>104,16</b>	<b>104,09</b>	<b>98,94</b>	<b>&lt;</b>
		2. PTPN	4.759.159,87	4.881.470,28	5.006.924,07	5.267.586,99	4.795.006,84	4.918.238,52	5.372.409	<b>100,75</b>	<b>100,75</b>	<b>107,30</b>	<b>101,99</b>	<b>&gt;</b>
		3. PBSN	3.945.514,52	4.046.914,25	4.150.919,94	4.367.018,87	3.152.346,33	3.233.361,63	3.484.123	<b>79,90</b>	<b>79,90</b>	<b>83,94</b>	<b>79,78</b>	<b>&lt;</b>
		4. PBSA	1.603.350,06	1.644.556,15	1.686.821,24	1.774.637,99	1.577.345,54	1.617.883,32	1.838.419	<b>98,38</b>	<b>98,38</b>	<b>108,99</b>	<b>103,59</b>	<b>&gt;</b>
		Jumlah	15.651.779,53	16.054.030,26	16.466.618,84	17.323.879,09	15.090.786,67	15.478.619,89	16.546.923	<b>96,42</b>	<b>96,42</b>	<b>100,49</b>	<b>95,52</b>	<b>&lt;</b>
		<b>1.3. Produksi perikanan</b>												
		1. Produksi Perikanan (ton)	481.139,42	512.413,49	545.720,36	581.192,19	476.895,30	562.448,72	648.748,30	99,12	109,76	118,88	<b>111,62</b>	<b>&gt;</b>
		2. Ekspor hasil perikanan (ton)	53.017,51	58.319,26	64.151,19	77.622,94	48.935,59	54.550,73		92,30	93,54			
		3. Konsumsi ikan (kg/Kapita/tahun)	28,75	30,62	32,61	36,98	27,79	29,59		96,66	96,64			
		<b>1.4. Produktivitas peternakan</b>												
		1. Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/Tahun (Kg)	0,89	0,94	0,99	1,10	1,34	<b>1,34</b>		150,56	142,55			
		2. Kebutuhan Konsumsi per Tahun (Ton)	11.608	12.409	13.262	15.142	17.832	18.036		153,62	145,35			
		3. Produksi Daging yang diharapkan (Ton)	11.507	12.618	13.838	16.640	14.996	15.615	16.066	130,32	123,75	116,10	<b>96,55</b>	<b>&lt;</b>

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)			Target capaian kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2013)	Realisasi			Pencapaian Target (%)			Pencapaian s/d Thn 2011 thd RPJMD Tahun 2013 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2009	2010	2011		2009	2010	2011	2009	2010	2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8/4)	12=(9/5)	13=(10/6)	14=(10/7)	15
		4. Jumlah Pemotongan Sapi (Ekor)	61.848	67.819	74.373	89.434	95.841	96.936	86.347	154,96	142,93	116,10	96,55	<
		5. Produktivitas (Kg/Ekor)	186	186	186	186	186,06	186,06	186	100,03	100,03	100,03	100,03	>
		6. Pemotongan Sapi Impor (Ekor)	8.217	6.847	5.477	2.737	15.242	13.111		185,49	191,49			
		7. Pemotongan Sapi Lokal (Ekor)	53.631	60.972	68.896	86.697	80.599	84.798		150,28	139,08			
		8. Populasi (Ekor)	434.561	461.936	491.038	554.859	404.230	420.480	480.941	93,02	91,03	97,94	86,68	<
<b>2.</b>	<b>Koperasi dan UMKM</b>													
		1. Meningkatnya produktivitas koperasi dan UMKM dengan laju pertumbuhan rata - rata 10 - 15% per tahun	1.000	1.100	1.300	5.000	850	875	950	85	80	73	54	<
		2. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja per unit koperasi dan UMKM dengan laju pertumbuhan rata - rata 10% per tahun	40.000	55.000	60.500	250.000	35.000	45.000	57.000	88	82	94	55	<
		3. Meningkatnya daya saing dan nilai ekspor produk koperasi dan pertumbuhan nilai tambahnya	30	30	40	150	24	28	30	80	93	75	55	<
		4. Peningkatan kualiasi kelembagaan dan usaha koperasi	1.300	1.200	1.300	5.000	1.100	1.000	1.100	85	83	85	64	<
		5. Pemberdayaan usaha Mikro dan	250.000	250.000	240.000	1.000.000	235.000	240.000	220.000	94	96	92	70	<

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)			Target capaian kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2013)	Realisasi			Pencapaian Target (%)			Pencapaian s/d Thn 2011 thd RPJMD Tahun 2013 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2009	2010	2011		2009	2010	2011	2009	2010	2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8/4)	12=(9/5)	13=(10/6)	14=(10/7)	15
		Menengah												
		6. Terbinanya Koperasi dan UKM pada daerah Agropolitan dan Agromarinepolian	10	10	12	50	10	10	12	100	100	100	64	<
		7. Terbinanya Koperasi pada Desa TP. PKK Provinsi	5	5	6	25	5	5	6	100	100	100	64	<
		8. Peningkatan peran gender dalam Pengembangan KUKM	200	200	220	1.000	180	190	220	90	95	100	59	<
		9. Pembentukan Koperasi Primer	200	200	200	1.000	185	185	180	93	93	90	55	<
		10. Terbinanya UMKM dalam Sentra	300	300	300	1.500	275	287	270	92	96	90	55	<

### 2.2.1 Review Capaian Kinerja RPJMD

Review capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2011, target yang ingin dicapai pada tahun 2012 dan proyeksi untuk tahun 2013, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.72.  
Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2010	CAPAIAN TAHUN 2011	TARGET 2012	PROYEKSI TAHUN 2013	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
<b>Komitmen Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara yang Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa</b>							
1.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	1: 381			.....	Keberadaan rumah ibadah yang tidak merata di daerah	Kemudahan syarat pendirian rumah ibadah
2.	Pelayanan publik yang baik melalui Good Governance dan Clean Government	Terbentuknya Badan Layanan Terpadu			.....	Masih adanya persepsi lambannya pelayanan aparat pemerintah dan kurangnya daya saing daerah	Penguatan Lembaga perijinan terpadu
		Terbentuknya LPSE	Implementasi LPSE di Provinsi Sumatera Utara	LPSE terbentuk di 33 Kab/Kota	Terbangunnya sistem e-Planning, e-Budgeting, e-Ofiice	Masih adanya isu KKN dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan instansi pemerintah	Pembentukan LPSE diseluruh Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dalam mendukung pemberlakuan sistem e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah
<b>Komitmen Mewujudkan Rakyat tidak lapar</b>							
1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar						
	- Padi (Kw/Ha)	47,70	47,62	44,62	44,98	Luas tanam belum tercapai	Pencetakan sawah baru
						Produktifitas masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi target produksi	Penanaman bibit unggul adaptif
						Irigasi belum optimal	Pembangunan dan perbaikan Irigasi
	- Jagung (Kw/Ha)	50,13	50,71	37,48	37,82	Konsumsi masih rendah	Diversifikasi pangan non beras dengan meningkatkan konsumsi jagung

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2010	CAPAIAN TAHUN 2011	TARGET 2012	PROYEKSI TAHUN 2013	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
						Luas tanam belum tercapai	Tumpang sari dengan kedele dan lahan kebun TBM
	- Kedele (Kw/Ha)	12,10	10,01	11,77	11,78	Luas tanam belum tercapai	Tumpang sari dengan jagung
						Produktifitas masih rendah	Penanaman bibit unggul dan teknologi pertanian
						Bibit unggul masih terbatas	Revitalisasi BBI untuk pengadaan benih
	- Daging (ton)	186,06	186	186	186	Ketergantungan impor masih tinggi	Pengadaan bibit ternak sapi untuk menambah populasi
						Populasi masih kurang	Pembangunan Cluster industri pengolahan ternak
						Pengembangan ternak masih terbatas	Integrasi ternak dengan kebun dan hutan (agroforestry)
2.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	23,03	22,18	21,88	21,00	Anomali iklim makro	Manajemen sistem usaha tani dan maksimalisasi peran BMG
<b>Komitmen Mewujudkan Rakyat Tidak Bodoh</b>							
1.	APK PAUD	53.5	NA	NA	NA	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Sumatera Utara pada tahun 2010 53,50 persen masih dibawah rata-rata APK PAUD Indonesia yang sebesar 53,70	Pembinaan terhadap Lembaga PAUD di Kabupaten/Kota
2.	APK SD + MI	99.57	111,40	111,64	112,59	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar (SD) di Sumatera Utara sebesar 94,24 masih dibawah rata-rata APK Nasional yang sebesar 95,23	Pemberian bantuan bagi siswa dari keluarga tidak mampu
3.	APM SD + MI	95.00	92,66	92,36	92,66		
4.	APK SMP + MTs	99.57	101,19	104,00	105,01	APK SMP/MTs Nasional = 98,11% Hal ini berarti bahwa APK SMP/MTs Sumut lebih tinggi daripada APK SMP/MTs secara Nasional	Pemberian bantuan bagi siswa dari keluarga tidak mampu
5.	APM SMP + MTs	94.18	93,29	96,20	97,52		
6.	APK SMA + MA + SMK (%)	86.40	82,46	86,29	89,99	APK SMA/MA/SMK Nasional =	Pemberian bantuan bagi siswa

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2010	CAPAIAN TAHUN 2011	TARGET 2012	PROYEKSI TAHUN 2013	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
7.	APM SMA	85,16	68,50	71,59	74,57	69,6%, yang berarti APK SMA/MA/SMK Sumut lebih tinggi daripada APK SMA/MA/SMK secara Nasional	dari keluarga tidak mampu dan revitalisasi SMK
8.	APK Perguruan Tinggi	18,19			NA	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) di Sumatera Utara pada tahun 2010 sebesar 18,19 persen masih dibawah rata-rata APK Perguruan Tinggi (PT) Nasional sebesar 18,36	Pemberian bea siswa bagi siswa berprestasi dari keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang D-I dan D-III
9.	Angka Melek Huruf (%)	98,26	98,21	98,33	98,46	Masih terdapat buta aksara usia produktif diatas 15 tahun	Pembelajaran di luar ruang kelas dan peningkatan kesempatan belajar
10.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	9,91	9,66	9,86	10,07	Target Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun sudah tercapai tetapi perlu ditingkatkan untuk Wajib Pendidikan Dasar 12 Tahun	Perluasan kesempatan belajar formal melalui kemudahan sarana dan prasarana serta tenaga kependidikan
<b>Komitmen Mewujudkan Rakyat tidak Sakit</b>							
1.	Angka kelangsungan hidup bayi (Angka Kematian Bayi)	23.0	24	23	22	Target sudah tercapai namun AKB masih cukup tinggi di beberapa Kabupaten	Meningkatkan kesehatan ibu pra kehamilan
2.	Angka Kematian Ibu Melahirkan	268.0	295	285	185	Beberapa Kabupaten sudah memenuhi target namun masih ada yang AKI tinggi	Meningkatkan layanan kesehatan bagi ibu yang melahirkan
3.	Usia harapan hidup	69.8	70,63	70,96	72	Beberapa Kabupaten sudah memenuhi target namun masih ada disparitas	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada kabupaten yang belum memenuhi target
4.	Prevalensi balita gizi buruk dan kurang	20.4	21,2	20,6	20	Target rata-rata sudah tercapai namun masih ada beberapa Kabupaten yang prevalensi balita gizi buruk Sangat Tinggi (diatas 30%)	Peningkatan kesehatan bagi ibu pra kehamilan dan selama masa pertumbuhan balita
6.	Rasio posyandu per satuan balita	1:55,71	1:76,77	-		Keberadaan Posyandu sudah kurang berperan aktif sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar masyarakat	Revitalisasi posyandu melalui rehabilitasi posyandu dan pemberian insentif bagi tenaga pelayanan kesehatan

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2010	CAPAIAN TAHUN 2011	TARGET 2012	PROYEKSI TAHUN 2013	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
7.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	1:25.332	1:24.681	-		Kurangnya fungsi pelayanan Puskesmas, Poliklinik dan Pustu	Revitalisasi Puskesmas, Poliklinik dan Pustu
8.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	1:6.918	1:67.616	-		Keterbatasan daya tampung pasien di Rumah Sakit	Pemberian kemudahan bagi pihak swasta dalam mendirikan Rumah Sakit dan pemberian stimulan bantuan melalui Hibah dan Bansos
9.	Rasio dokter per satuan penduduk	1:14.67	1:17,64	-		Kurang meratanya keberadaan tenaga pelayanan kesehatan di daerah disebabkan ketertarikan melayani di daerah perkotaan	Pemberian insentif dan beasiswa bagi tenaga pelayanan kesehatan yang bertugas di daerah terpencil dan tertinggal.
10.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1:25,61	1:29,69	-			
11.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100%	100%	-		Kurangnya kompetensi SDM Bidan	Pembinaan bidan melalui seminar, workshop, lokakarya dan pelatihan keterampilan
12.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	64,20%	86,73%	-			
13.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	NA	65,78%	-		Masih terdapatnya kondisi balita gizi kurang dan gizi buruk serta pemberian imunisasi yang tidak lengkap	Pemberian imunisasi, makanan pengganti ASI dan makanan tambahan secara gratis bagi balita melalui Puskesmas, Pustu, Pusling dan Posyandu
14.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%	-			
15.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100%	100%	-		Masyarakat kurang memahami gejala penyakit yang diderita dengan cepat sehingga penanganan selalu terlambat	Sosialisasi gejala penyakit penderita TBC BTA dan BDB dan tindak lanjut penanganan dengan pengobatan dasar
16.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%	-			
17.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100%	-		Masyarakat miskin yang menerima pelayanan kesehatan rujukan belum tertangani seluruhnya melalui Jamkesmas	Pengalokasian dana Jamkesda bagi masyarakat miskin di luar peserta Jamkesmas, Askes, Asabri dan Jamsostek
18.	Cakupan kunjungan bayi	69,82%	76,82%	-		Kunjungan rutin bayi melakukan	Pemberian imunisasi dasar



NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2010	CAPAIAN TAHUN 2011	TARGET 2012	PROYEKSI TAHUN 2013	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
						imunisasi masih kurang	secara gratis melalui pelayanan Posyandu dan Puskesmas
19.	Cakupan puskesmas	1:25.332	1:24.681	-		Menurunnya fungsi Pelayanan Dasar Puskesmas, Pembantu Puskesmas	Revitalisasi Puskesmas dan Pembantu Puskesmas
20.	Cakupan pembantu puskesmas	1:6.918	1:7.137	-			
1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) (%)	69,51	73,53			Rendahnya kemampuan SDM angkatan kerja sehingga kurang memenuhi permintaan kesempatan kerja	Peningkatan kualitas angkatan kerja melalui berbagai pelaksanaan berbagai pelatihan kerja dan pemagangan serta menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan
2.	Pencari kerja yang ditempatkan	52.974				Penempatan angkatan kerja masih belum memenuhi permintaan kesempatan kerja	Pelatihan dan pemagangan para pencari kerja oleh perusahaan pencari pekerja
3.	Persentase koperasi aktif (%)	58,57	58,60			Produktifitas koperasi yang masih rendah serta sumber daya manusia belum mampu untuk aplikasi sistem informasi teknologi khususnya pasar	Pelatihan dan pembinaan Koperasi serta pemberian aksesibilitas permodalan yang murah antara lain dengan skim kredit bunga murah seperti dengan pendirian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan konsep Gramming Bank
4.	Usaha Mikro dan Kecil	95	95				
5.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	22	54			Penerbitan izin usaha yang masih terpusat di Pusat, selain itu juga daya saing infrastruktur yang rendah	Perlu ada desentralisasi penerbitan izin investasi di daerah serta perbaikan fasilitas infrastruktur khususnya jalan dan energi
6.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	2.010.205,62	1.662.522,5			Promosi investasi yang masih rendah, serta permasalahan lokasi investasi yang belum jelas (status lahan yang bermasalah)	Promosi investasi harus terus ditingkatkan baik skala internasional maupun nasional, serta komitmen Pemerintah dan DPR untuk segera menerbitkan UU tentang Pertanahan yang baru

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2010	CAPAIAN TAHUN 2011	TARGET 2012	PROYEKSI TAHUN 2013	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
7.	Daya serap tenaga kerja	110	104			Masih rendahnya serapan tenaga kerja	Menyelaraskan kurikulum pelatihan dan pemagangan sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja
8.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	(1.690,80)				Proses perizinan yang masih birokratif, serta status lokasi usaha yang masih belum pasti (sengketa lahan)	Harus terdapat SOP untuk pengurusan izin investasi dan biaya yang jelas untuk pengurusan izin investasi serta ada payung hukum tentang ruang (RTRW Provsu) harus egera selesai diperdakan
9	Nilai Tukar Petani (NTP)	102,36	102,45	102,51		NTP sudah memenuhi target, namun masih ada disparitas ntar kabupaten	Perlu peningkatan SDM petani dengan penyuluhan pertanian dan bantuan permodalan
10	Angka Kemiskinan	11,31	8,55	7,25		Perlu kerja keras untuk menanggulangi Angka Kemiskinan sesuai Target MDG's 2015 sebesar 7,5%	Perlu terobosan untuk perluasan kesempatan kerja dan berusaha
11	Angka Pengangguran	7,43	7,60	6,90		Masih perlu upaya serius untuk mengatasi Angka Pengangguran Terbuka sesuai Target MDG's 2015 sebesar 7%	Perlu terobosan untuk perluasan kesempatan kerja dengan meningkatkan investasi dan peluang usaha produktif
12	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	NA	79,50	80,50		Target IPM tahun 2009 sudah tercapai, namun disparitas antar Kabupaten masih sangat jauh	Perlu peningkatan pada aspek terkait kesehatan (angka harapan hidup) pendidikan (angka melek huruf dan lama sekolah), dan ekonomi (pengeluaran riil/ perkapita)
<b>Pengembangan Infrastruktur Wilayah</b>							
1.	Tingkat Kemantapan Jalan(%)	40,85	48,19%	65,21%	90	Kondisi topografi yang sangat bervariasi dimana daerah dataran rendah rawan bencana banjir, sedangkan di daerah pegunungan rawan longsor	Peningkatan alokasi anggaran APBD dan APBN  Peningkatan SDM dan Kelembagaan

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2010	CAPAIAN TAHUN 2011	TARGET 2012	PROYEKSI TAHUN 2013	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
						<p>Di kawasan pegunungan dan hutan lindung lebar standar 7 m tidak terpenuhi</p> <p>Berat kendaraan angkutan barang yang melebihi kapasitas jalan</p> <p>Keuangan yang terbatas</p> <p>Pelaksanaan pembebasan lahan untuk pelebaran jalan</p> <p>Peralatan kerja yang tidak memadai</p> <p>SDM yang terbatas</p>	<p>Regulasi pembatasan berat kendaraan</p> <p>Peningkatan Peralatan</p>
2.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) (%)	29,08%	41,30%	54,62%	60	Kemampuan keuangan yang terbatas sehingga kapasitas jalan dan geometri jalan tidak sesuai dengan standar teknis minimal	Peningkatan bantuan APN untuk penanganan jalan di Kab/Kota
3.	Jaringan irigasi						
	Pemeliharaan Rutin	73.326 Ha (100%)	73.326 Ha (100%)	73.326 Ha (100%)	73.326 Ha (100%)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunnya kondisi irigasi teknis dan semi teknis akibat kerusakan alat ukur dan bangunan irigasi.</li> <li>2. Kondisi jaringan irigasi secara keseluruhan masih banyak yang belum dilengkapi bangunan-bangunan irigasi yang berfungsi sebagai pengatur pembagian air , pengendali kelebihan air dan pengamanan terhadap kerusakan.</li> <li>3. Daerah irigasi di dataran</li> </ol>	Meningkatkan fungsi jaringan irigasi pada kewenangan Provinsi melalui perbaikan/ rehabilitasi jaringan irigasi

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2010	CAPAIAN TAHUN 2011	TARGET 2012	PROYEKSI TAHUN 2013	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
						<p>tinggi yang jaringan irigasinya terletak pada lereng-lereng perbukitan rentan terhadap longsor.</p> <p>4. Terbatasnya dana pengembangan dan pengelolaan irigasi dan rawa.</p> <p>5. Penurunan fungsi jaringan irigasi dan belum lengkapnya dan/telah rusaknya bangunan pengatur sehingga pengalokasian air tidak optimal menaikkan intensitas tanam, saat ini intensitas tanam 115 %.</p> <p>6. Terjadinya alih fungsi lahan pada Daerah Irigasi menjadi non pertanian.</p> <p>7. Sulitnya pelaksanaan pembebasan tanah untuk kebutuhan infrastruktur SDA.</p> <p>8. Kelembagaan/orgasnisasi pemakai air irigasi yang masih lemah dan belum berkembang untuk menunjang sistem pengelolaan irigasi yang berkelanjutan.</p> <p>9. Masih lemahnya pemahaman tentang berbagai kebijakan dan regulasi dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi.</p> <p>10. Belum terlaksananya pengelolaan aset irigasi dengan baik yang sangat penting untuk Penyusunan</p>	

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2010	CAPAIAN TAHUN 2011	TARGET 2012	PROYEKSI TAHUN 2013	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
						Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I) 11. Belum aktifnya Komisi Irigasi Provinsi Sumatera Utara serta belum terbentuknya Komisi Irigasi kabupaten pada sebagian besar kabupaten di Provinsi Sumatera Utara	
	Perbaikan/Peningkatan	5.505 Ha (81 %)	6.040 Ha (88 %)	5.559 Ha (75 %)	7.150 Ha		
	Jaringan Rawa						
	Pemeliharaan Rutin	61.732 Ha (100%)	61.732 Ha (100%)	55.232 Ha (89%)	61.732 Ha	1. Terbatasnya dana pengembangan dan pengelolaan Rawa. 2. Terjadinya alih fungsi lahan pada Daerah Rawa menjadi non pertanian setelah dibangun jaringan pengairan 3. Tidak adanya lembaga masyarakat Pengelolaan Jaringan Rawa	Meningkatkan fungsi jaringan Rawa pada kewenangan Provinsi melalui perbaikan/ normalisasi /rehabilitasi jaringan Rawa
	Perbaikan/Peningkatan	2.527 Ha (60 %)	2.604 Ha (62%)	1.135 Ha (27 %)	4.200 Ha		
	Penanganan Tebing Sungai /Pantai	9.012 m (86 %)	12.261 m (117 %)	5.174 m (54 %)	10.500 m	Terbatasnya dana pengembangan dan pengelolaan Sungai.	Penanganan banjir akibat sudah berkurangnya hutan di daerah hulu sungai
	Normalisasi /Pelurusan Sungai	15.168 m (160 %)	16.345 m (172 %)	45.070 m (474 %)	9.500 m		
	Perbaikan dan pembangunan tanggul banjir	18.605 m (122 %)	17.615 m (116 %)	14.250 m (93%)	15.250 m		
	Penyediaan Air baku/Embung	11 (275 %)	9 (225 %)	9 (225%)	4	Terbatasnya dan penyediaan air baku	Penyediaan sarana air baku sebagai kebutuhan dasar masyarakat seiring dengan peningkatan penduduk dan terjadinya krisis air
5.	Rasio elektrifikasi desa	80	80,85	85	90	Tingkat pertumbuhan penduduk	Pembangunan Pembangkit Listrik

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2010	CAPAIAN TAHUN 2011	TARGET 2012	PROYEKSI TAHUN 2013	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
6.	Rasio elektrifikasi rumah tangga	78	78	79	80	yang cukup tinggi belum mampu terlayani  Potensi energi di Sumut yang belum sepenuhnya terekslore	Mini Hydro dan PLTS (energi terbarukan)
7.	Cakupan pelayanan air minum (%)	80					
8.	Status Mutu Sumber Air Minum	Sedang		Layak Minum			

## 2.2.2. Penelaahan terhadap RPJMN dan RKPD Provinsi

Identifikasi permasalahan terkait dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dapat disimpulkan berdasarkan bidang urusan dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.73.**  
Identifikasi Kebijakan Nasional  
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

No.	Kebijakan Nasional		
	RPJMN *)	RKPD Provinsi	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengembangan Sumatera Utara sebagai salah satu sentra produksi pertanian dan perkebunan;	Peningkatan ketersediaan bahan pangan, dengan kebijakan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi bahan pangan dengan sasaran pokok terwujudnya swasembada beras di Sumatera Utara	Revitalisasi UPT dan BBI untuk meningkatkan ketersediaan benih/bibit tanaman pangan, perkebunan dan perikanan dan Gema Pangan
2.	Pengembangan sentra produksi perikanan dan hasil laut;	Pengelolaan terpadu perikanan darat dan perikanan laut	Pembangunan sarana dan prasarana pendukung (kapal, pelabuhan perikanan dan pasar lelang)
3.	Pengembangan gugus ( <i>cluster</i> ) industri unggulan;	Pengembangan cluster industri hilir CPO di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei	
4.	Pengembangan Sumatera Utara sebagai salah satu sentra industri migas dan lumbung energi nasional;	Pembangunan PLTA Asahan III, dan PLTA Asahan IV	
5.	Pengembangan industri pariwisata alam dan budaya;	Pengembangan tujuan wisata Danau Toba, dan Kepulauan Nias,	
6.	Pengembangan sistem jaringan listrik terintegrasi;	-	
7.	Penguatan keterkaitan domestik wilayah Sumatera;	Forum Rakergub se-Sumatera	
8.	Pengembangan Sumatera sebagai <i>pool</i> angkatan kerja berkualitas dan berdaya saing regional ASEAN;		
9.	Peningkatan program penanggulangan kemiskinan;	Pengembangan SMK Berbasis industri unggul	
10.	Reformasi birokrasi dan tata kelola;	Pengembangan perdesaan	
11.	Pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan wilayah nasional	Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu Penerapan e-Government melalui system e-Planning, e-Budgeting, e-Office, e-Procurement dan e-Performance	
12.	Pembangunan wilayah Sumatera yang sesuai dengan daya dukung lingkungan.		
13.	Pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Provinsi Sumatera, diarahkan untuk : - Mengendalikan pengembangan kawasan perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya;	Pengembangan Kawasan Mebidang-ro	

	- Mendukung pengembangan Sumatera Utara sebagai salah satu sentra produksi pertanian dan perkebunan melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman pangan, hortikultura, sawit, dan karet	- Pengembangan Agropolitan - Pengembangan Cluster Industri CPO - Pengembangan Cluster Peternakan	
14.	Penanggulangan Pasca Bencana Kepulauan Nias	Pelaksanaan Rencana Aksi untuk penanganan pasca bencana Kepulauan Nias	

Keterangan :

\*) Kebijakan Nasional terhadap Provinsi Sumatera Utara yang dituangkan dalam RPJMN-2010-2014

### 2.2.3. Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD yaitu penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum dibahas dalam musrenbangdan agenda kerja DPRD tahun 2011. Penelaahan dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun 2012 berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Rangkuman hasil telaah terhadap pokok-pokok pikiran DPRD tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :



**Tabel 2.74.**  
**Rumusan Usulan Program/Kegiatan**  
**Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD dan Validasi**  
**Provinsi Sumatera Utara \*)**

1	Prioritas/Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Peningkatan Kehidupan Beragama, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan					
2.	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan					

1	Prioritas/Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Peningkatan Aksesibilitas dan Pelayanan Kesehatan					
4.	Revitalisasi Pertanian untuk peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agroindustri/agribisnis					
				-		

1	Prioritas/Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan					
6.	Peningkatan Infrastruktur mendukung pembangunan ekonomi					

1	Prioritas/Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat miskin					

Keterangan

\*) Rangkuman Berdasarkan Hasil Reses sampai dengan bulan Desember Tahun 2011.)

### 2.3. Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan terkait dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dapat disimpulkan berdasarkan bidang urusan dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.75.**  
Identifikasi Permasalahan Pembangunan untuk Penentuan Program Prioritas  
Provinsi Sumatera Utara

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1.</b>	<b>Pendidikan</b>			
1.1.	Angka melek huruf	>	1. Realisasi peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan (guru, siswa, prasarana, sistem) yang menjabarkan UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Kualitas SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang masih terbatas. 3. Kapasitas lembaga pendidikan kejuruan/pelatihan keterampilan yang relatif rendah	1. Penguatan dan pengawasan kurikulum pendidikan berbasis kompetensi dan berbasis lokal 2. Penerapan pendidikan berbasis karakter bagi pendidik dan peserta didik 3. Keberadaan sarana dan prasarana yang layak dan memadai serta terjangkau sesuai kebutuhan di tiap jenjang pendidikan 4. Alokasi dana pendidikan yang terus meningkat untuk membiayai program dan kegiatan prioritas bidang pendidikan
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah	>		
1.3.	Pendidikan dasar 9 tahun	>		
1.4.	Angka partisipasi sekolah	>		
1.5.	Angka partisipasi kasar	>		
1.6.	Angka partisipasi murni	>		
1.7.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	=		
1.8.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata	=		
1.9.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	>		
1.10.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	<		
1.11.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	<		
1.12.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	<		
1.13.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	<		
1.14.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	<		
1.15.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	<		
1.16.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	<		
1.17.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	<		
1.18.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	<		
1.19.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	<		
1.20.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	<		
1.21.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	<		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>2.</b>	<b>Kesehatan</b>			
2.1.	Angka kelangsungan hidup bayi	>	1. Derajat Kesehatan masih rendah yang ditunjukkan dengan masih tingginya Angka Kematian Bayi, Angka Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang dan Angka Kematian Ibu melahirkan. 2. Masih belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	1. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di seluruh bidang pelayanan 2. Universal coverage pelayanan kesehatan gratis melalui Jamkesda dan Jampersal 3. Kesejahteraan tenaga pelayan kesehatan terutama di daerah tertinggal, terpencil dan terluar
2.2.	Angka usia harapan hidup	<		
2.3.	Angka Kematian Ibu Melahirkan	>		
2.4.	Persentase balita gizi buruk	<		
<b>3.</b>	<b>Pekerjaan Umum</b>			
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	<	1. Kerusakan sarana dan prasarana transportasi, kapasitas bandara dan pelabuhan, 2. saluran irigasi/rawa, jaringan pengairan lainnya, air baku, pengendalian banjir dan pengamanan pantai 3. Ketersediaan pasokan energi terbarukan dan penggalan sumber energi baru 4. Pemantapan dan efektifitas jalan raya (jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/ Kota). 5. Realisasi pembangunan	- Peningkatan alokasi anggaran - Peningkatan SDM dan kelembagaan - Peningkatan peralatan - Meningkatkan fungsi jaringan irigasi pada kewenangan Provinsi melalui perbaikan/ rehabilitasi jaringan irigasi - Meningkatkan fungsi jaringan Rawa pada kewenangan Provinsi melalui perbaikan/ normalisasi /rehabilitasi jaringan Rawa - Penanganan banjir akibat sudah berkurangnya hutan di daerah hulu sungai - Penyediaan sarana air baku sebagai kebutuhan dasar masyarakat seiring dengan peningkatan penduduk dan
3.2.	Rasio jaringan irigasi	<		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor -Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.3.	jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum		jalan lingkar luar ( <i>Outer Ring Road</i> ) Danau Toba. 6. Realisasi pembangunan jalan Tanjung Morawa-Saribudok-Tongging (Rawasaring). 7. Realisasi pembangunan kawasan Mebidang-Ro	terjadinya krisis air
3.4.	persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	<		
3.5.	Panjang jalan dilalui Roda 4	<		
3.6.	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)	<		
3.7.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )	<		
3.8.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m)	<		
<b>4.</b>	<b>Perumahan/Permukiman</b>			
4.1.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	=		
<b>5.</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>			
5.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	=		
5.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	=		
5.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	=		
5.4.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	=		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor -Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>6.</b>	<b>Perhubungan</b>			
6.1.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	<	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realisasi pengembangan pelabuhan Belawan dan pelabuhan lainnya</li> <li>2. Pemantapan dan efektifitas transportasi darat (jalan dan jembatan, dan perkeretaapian)</li> <li>3. Sarana dan prasarana pendukung Bandara Kuala Namu</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komitmen pemerintah pusat</li> <li>- Pembebasan lahan</li> </ul>
<b>7.</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan &amp; Perlindungan Anak</b>			
7.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	<	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya peran aktif perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta</li> <li>2. Minimnya Perlindungan hak perempuan dan anak di seluruh sektor</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berjalanya fungsi kelompok kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) di lembaga pemerintahan dan swasta</li> <li>2. Kerjasama yang terintegrasi aparat penegak hukum dengan lembaga perlindungan perempuan dan anak</li> </ol>
7.2.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	<		
7.3.	Rasio KDRT	<		
7.4.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	=		
7.5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan			
7.6.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	=		
<b>12</b>	<b>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>			
12.1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	=	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laju pertumbuhan penduduk terus meningkat tanpa terkendali</li> <li>2. Minimnya minat pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta aktif KB</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Slogan "Dua Anak Lebih Baik" menjadi keinginan setiap pasangan rumah tangga</li> <li>2. Dasar pemahaman yang kuat akan pentingnya ber-KB</li> </ol>
12.2.	Rasio akseptor KB	=		
12.3.	Cakupan peserta KB aktif	=		
12.4.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	=		
<b>13</b>	<b>Sosial</b>			
13.1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	=	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberadaan prasarana dan sarana panti pemerintah dan swasta yang memperhatikan</li> <li>2. Bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial yang minim</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rehabilitasi rutin dan berkala panti pemerintah dan swasta</li> <li>2. Penyandang masalah kesejahteraan sosial memperoleh pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal</li> </ol>
13.2.	PMKS yg memperoleh bantuan social	=		
13.3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	=		



No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>14</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>			
14.1.	Rasio penduduk yang bekerja	=	1. Rendahnya serapan angkatan kerja 2. Rendahnya kualitas tenaga kerja	1. Berjalannya fungsi BLK dalam menghasilkan tenaga kerja siap pakai berkualitas 2. Kerjasama yang sinergi dan terintegrasi antara Pemerintah, Dunia Usaha dan Lembaga Penyedia Tenaga Kerja
14.2.	rasio ketergantungan	=		
14.3.	Kualitas tenaga kerja (rasio lulusan S1/S2/S3)	<		
14.4.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	>		
<b>15</b>	<b>Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</b>			
15.1.	Persentase koperasi aktif	<	Produktifitas koperasi yang masih rendah serta sumber daya manusia belum mampu untuk aplikasi sistem informasi teknologi khususnya pasar	Pelatihan dan pembinaan Koperasi serta pemberian aksesibilitas yang permodalan yang murah antara lain dengan skim kredit bunga murah seperti dengan pendirian Badan layanan Umum Daerah (BLUD) dengan konsep Gramming Bank
15.2.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	<		
15.3.	Jumlah BPR/LKM	<		
15.4.	Usaha Mikro dan Kecil	<		
<b>16</b>	<b>Penanaman Modal</b>			
16.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	<	- Penerbitan izin usaha yang masih terpusat di Pusat, selain itu juga daya saing infrastruktur yang rendah - Promosi investasi yang masih rendah, serta permasalahan lokasi investasi yang belum jelas (status lahan yang bermasalah)	- Perlu ada desentralisasi penerbitan izin investasi di daerah serta perbaikan fasilitas infrastruktur khususnya jalan dan energi - Promosi investasi harus terus ditingkatkan baik skala internasional maupun nasional, serta komitmen Pemerintah dan DPR untuk segera menerbitkan UU tentang Pertanahan yang baru
16.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	>		
16.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	<		
16.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)			
16.5.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	<		
16.6.	Angka kriminalitas			
16.7.	Jumlah demo	<		
16.8.	Lama proses perijinan	<		
16.9.	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	<		
<b>17.</b>	<b>Kebudayaan</b>			
17.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	<	Pagelaran/pertunjukan seni budaya	Fasilitas pendukung gedung pertunjukan

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor -Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17.2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	<	masih terbatas	belum memadai
17.3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	<		
<b>18.</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>			
18.1.	Jumlah organisasi pemuda	<	1. Minimnya Data dan informasi organisasi pemuda dan olahraga 2. Minimnya prestasi olahraga disebabkan prasarana dan sarana olahraga yang tidak mendukung	1. Ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat mengenai kondisi dan keberadaan organisasi pemuda dan olahraga serta prasarana dan sarana olahraga 2. Ketersediaan prasarana dan sarana olahraga yang memadai guna memacu prestasi olahraga
18.2.	Jumlah organisasi olahraga	<		
18.3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	<		
18.4.	Jumlah kegiatan olahraga	<		
18.5.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	<		
18.6.	Lapangan olahraga	<		
<b>19</b>	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>			
19.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	<	1. Minimnya jumlah aparat keamanan swadaya masyarakat dan prasarana pendukung	1. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan lingkungan tempat tinggal
19.2.	Kegiatan pembinaan politik daerah	<		
<b>20</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>			
20.1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	<	2. Minimnya jumlah aparat keamanan swadaya masyarakat dan prasarana pendukung	2. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan lingkungan tempat tinggal
20.2.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	<		
20.3.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	<		
20.4.	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	<		
<b>22</b>	<b>Ketahanan Pangan</b>			
22.1.	Regulasi ketahanan pangan	=	1. Masih berlanjutnya alih fungsi lahan sawah	1. Optimalisasi pemanfaatan irigasi yang ada serta perbaikan dan

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor -Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>2. Menurunnya kualitas kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan</p> <p>3. Terbatasnya penyediaan air bagi budidaya beberapa komoditas pangan pokok dan strategis</p> <p>4. Penyediaan dan penyaluran sarana produksi (terutama pupuk bersubsidi dan benih bersertifikat) yang belum tepat</p> <p>5. Terbatasnya fasilitas permodalan di pedesaan dan meningkatnya suku bunga Kredit Ketahanan Pangan (KKP) yang berdampak kepada terbatasnya penerapan teknologi</p> <p>6. Belum optimalnya penanganan panen dan pasca panen yang berpotensi mengakibatkan kehilangan hasil yang cukup besar</p>	<p>pembangunan jaringan irigasi baru dan penghentian alih fungsi lahan melalui penetapan aturan-aturan yang dilandasi hukum</p> <p>2. Pengembangan konservasi dan rehabilitasi lahan agar potensi lahan yang ada dapat dipertahankan terutama di wilayah usaha berbasis pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan dengan menerapkan teknologi konservasi dan rehabilitasi</p> <p>3. Peningkatan dan penanganan teknologi pasca panen untuk memperoleh efisiensi dan kualitas produksi pertanian</p> <p>4. Penyediaan sarana produksi dan permodalan secara tepat sehingga bermanfaat untuk petani bagi meningkatkan produktivitas hasil</p> <p>5. Penguatan kelembagaan dan system penyuluhan bagi para petani sehingga terjadi penerapan paket teknologi untuk meningkatkan</p>

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor -Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			7. Cukup tingginya jumlah penduduk miskin yang berpotensi menimbulkan kerawanan pangan. Hal ini diakibatkan oleh rendahnya keterampilan, akses permodalan dan lapangan kerja	<p>produktivitas hasil</p> <p>6. Mengurangi rasio ketergantungan terhadap impor dan pemasukan bahan pangan dari provinsi lain guna kebutuhan masyarakat</p> <p>7. Pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat yang menghadapi masalah pangan</p>
22.1.	Ketersediaan pangan utama	=		
<b>24</b>	<b>Statistik</b>			
24.1.	Buku "Provinsi Dalam Angka"	=		
24.2.	Buku "PDRB kabupaten"	<		
<b>25</b>	<b>Kearsipan</b>			
25.1.	Pengelolaan arsip secara baku	=	<p>1. Minimnya keberadaan arsip daerah</p> <p>2. Minimnya kemampuan SDM arsiparis</p>	<p>1. Meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya arsip daerah</p> <p>2. Tata kelola arsip yang tertib dan teratur</p>
25.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	=		
<b>26</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>			
26.1.	Jumlah jaringan komunikasi	=	<p>1. Prasarana dan sarana media informasi baik cetak maupun elektronik belum menjangkau seluruh lokasi di daerah</p>	<p>1. Informasi tersampaikan ke seluruh daerah melalui media cetak dan media elektronik</p>
26.2.	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	=		
26.3.	Jumlah surat kabar nasional/lokal	=		
26.4.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	=		
26.5.	Web site milik pemerintah daerah	=		
26.6.	Pameran/expo	=		
<b>27.</b>	<b>Perpustakaan</b>			
27.1.	Jumlah perpustakaan	<	<p>1. Jumlah perpustakaan dan koleksi buku yang ada belum memenuhi kebutuhan masyarakat</p>	<p>1. Tersedianya perpustakaan desa dengan koleksi buku yang memadai dengan kerjasama TP PKK melalui desa binaan</p>
27.2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	<		
27.3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	<		
<b>B.</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>			

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor -Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1.</b>	<b>Pertanian</b>			
1.1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar		1. Peningkatan produktivitas tidak dibarengi dengan peningkatan luas panen (untuk padi dan kedele) 2. Terjadinya konversi lahan pertanian produktif 3. Anomali iklim yang mempengaruhi pola tanam 4. Penyediaan dan penyaluran sarana produksi (terutama pupuk bersubsidi dan benih bersertifikat) yang belum tepat	1. Revitalisasi pertanian mendukung peningkatan produksi dalam menjaga stabilitas pangan dan mensukseskan swasembada pangan 2. Peningkatan mekanisasi pertanian 3. Pengadaan bibit/benih unggul 4. Peningkatan sarana dan prasarana (Pembangunan jalan produksi, irigasi)
	1.1.1. Padi (Ton)	>		
	1.1.2. Jagung (Ton)	>		
	1.1.3. Kedele (Ton)	<		
1.2.	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	>		
1.3.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	>		
1.4.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	>		
1.5.	Nilai tukar petani	>		
<b>2.</b>	<b>Kehutanan</b>			
2.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis			
2.2.	Kerusakan Kawasan Hutan			
2.3.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	<		
<b>3.</b>	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>			
3.1.	Pertambangan tanpa ijin	<	Penerapan prinsip eco environmental telah menjadi rujukan untuk perijinan tambang	Pembuatan Perda Larangan bagi para PETI untuk beroperasi serta adanya zonasi bagi operasional Legal yang diperbolehkan dan dimasukkan dalam RTRWP/RTRWK
3.2.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	<		
<b>4.</b>	<b>Pariwisata</b>			
4.1.	Kunjungan wisata	<	1. Infrastruktur belum memadai menuju destinasi 2. Destinasi wisata masih monoton	Pembangunan/perbaikan jalan menuju objek wisata ditingkatkan
4.2.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	>		
<b>5.</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>			
5.1.	Produksi perikanan (ton)	<	1. Pengelolaan sumberdaya perikanan belum sepenuhnya	1. Pengembangan produksi perikanan budidaya untuk konsumsi dalam
5.2.	Konsumsi ikan/kapita/thn	<		
5.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	Tidak ada data		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	Tidak ada data	<p>dikelola secara efisien dengan penerapan teknologi maju dengan budaya bisnis.</p> <p>2. Tingkat pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan yang belum merata di seluruh Sumatera Utara, khususnya perikanan tangkap.</p> <p>3. Terjadinya cara-cara pemanfaatan sumberdaya perikanan yang tidak bertanggung jawab.</p> <p>4. Terjadinya pencemaran perairan umum dan perairan pantai akibat limbah industri dan rumah tangga.</p> <p>5. dukungan prasarana terhadap pengembangan perikanan tangkap dan budidaya ikan dibandingkan dengan potensi perikanan yang tersedia</p> <p>6. Jumlah induk unggul untuk kegiatan pembenihan masih sangat terbatas</p> <p>7. Mutu hasil perikanan pada tahap pra panen belum sepenuhnya dapat dikendalikan sesuai dengan standar negara tujuan ekspor</p>	<p>negeri dan ekspor di kawasan budidaya air tawar,air payau/tambak dan air laut</p> <p>2. Pengadaan kapal dan alat penangkap ikan</p> <p>3. Pengembangan kapasitas sarana dan prasarana budidaya melalui pengadaan calon induk unggul dan pengadaan mesin pellet</p> <p>4. Identifikasi potensi dan pemetaan pulau di Sumatera Utara</p> <p>5. Pengembangan kluster industri pengolahan hasil perikanan</p>

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor -Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>6.</b>	<b>Perdagangan</b>			
6.1.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	>		
6.2.	Ekspor Bersih Perdagangan	>		
<b>7.</b>	<b>Perindustrian</b>			
7.1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	<	1. Krisis energi listrik yang menghambat produksi industri rumah tangga 2. Bahan baku masih diimpor dari luar	1. Peningkatan pembangunan infrastruktur dibidang energi listrik
7.2.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	<		
7.3.	Pertumbuhan Industri.	<		